



LAPORAN HASIL PENELITIAN

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2021**



LAPORAN AKHIR

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayat-NYA kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas dengan baik. Amin. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Akhir Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau ini dapat diselesaikan. Kegiatan ini merupakan kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi umum kemiskinan saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan, menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

Demikianlah kami sampaikan Laporan Akhir ini, terimakasih atas perhatiannya. Semoga buku laporan ini dapat memberikan mamfaat sebanyak-banyaknya bagi semua pihak yang terkait.

Tanjungpinang, Oktober 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	xiv
Daftar Gambar	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	11
1.3 Maksud dan Tujuan Kajian	13
1.4 Sasaran	14
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.5.1 Defenisi Kemiskinan	14
1.5.2 Indikator Kemiskinan	18
1.5.3 Determinan Kemiskinan	19
1.5.4 Penanggulangan Kemiskinan	21
1.6 Metode Kajian	23
1.6.1 Tahapan Kajian	23
1.6.2 Metode Pengumpulan Data	26
1.6.3 Analisa Data	26
1.6.4 Ruang Lingkup Kajian	27
1.6.5 Sistematika Penulisan	27
BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
2.1. Kondisi Geografis	29
2.2. Kondisi Topografi	32
2.3. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah	33
2.4. Kondisi Kependudukan	35
2.5. Kondisi Ketenagakerjaan	38
2.6. Potensi Perikanan	40
2.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	42
2.8. Pertumbuhan Ekonomi	49

BAB III PROFIL KEMISKINAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

3.1. Kondisi Kemiskinan Daerah	51
3.1.1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin	51
3.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan	56
3.1.3. Indeks Keparahana Kemiskinan Kepulauan Riau	61
3.1.4. Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan (P0, P1, P2)	64
3.2. Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau	67

BAB IV DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

4.1. Dimensi Pendidikan	70
4.1.1. Permasalahan Dimensi Pendidikan	70
A. Angka Partisipasi Murni (APM)	70
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)	73
C. Harapan Lama Sekolah	75
D. Rata-Rata Lama Sekolah	77
E. Jumlah Sekolah SMA dan SMK	80
F. Angka Putus Sekolah	83
4.1.2. Prioritas Intervensi Dimensi Pendidikan	84
4.1.3. Prioritas Intervensi dan Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Pendidikan	85
A. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah	85
B. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Jumlah Sekolah	86
C. Indikator Gabungan	88
4.2. Dimensi Kesehatan	89
4.2.1. Permasalahan Dimensi Kesehatan	89
A. Umur Harapan Hidup (UHH)	89
B. Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC	92
C. Jumlah Prevalensi HIV	94
D. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Yang Lalu	96
E. Persentase Balita yang di Imunisasi	98
F. Jumlah Fasilitas Kesehatan	99
4.2.2. Prioritas Intervensi Dimensi Kesehatan	103

4.2.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Kesehatan	104
A. Prioritas Wilayah Untuk Menurunkan Angka Kematian	104
B. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan	105
C. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan	106
D. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan	107
4.3. Dimensi Ketenagakerjaan	109
4.3.1. Masalah Utama Dimensi Ketenagakerjaan	109
A. Tingkat Pengangguran Terbuka	109
B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	113
C. Komposisi Pekerja Formal dan Informal	116
D. Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam	122
E. Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha	125
4.3.2. Prioritas Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan	126
4.3.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan	126
A. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja	126
B. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Melalui Bantuan Kredit.	128
C. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun.	129
D. Indikator Gabungan	130
4.4. Dimensi Infrastruktur Dasar	132
4.4.1. Permasalahan Dimensi Infrastruktur Dasar	132
A. Persentase Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak	132
B. Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak	136
C. Persentase Akses 40% RT Bawah terhadap Elektrifikasi	137
D. Infrastruktur Jalan dan Jembatan	138
4.4.2. Prioritas Intervensi Dimensi Infrastruktur.	145
4.4.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Infrastruktur Dasar	145
A. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak	145
B. Prioritas Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik	146
C. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Jembatan	147

Berkondisi Baik	
D. Prioritas Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Konektivitas	149
4.5. Dimensi Ketahanan Pangan	150
4.5.1. Permasalahan Dimensi Ketahanan Pangan	150
A. Konsumsi Kalori dan Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga Miskin	150
B. Persentase Rumah Tangga Miskin dalam Akses terhadap Program Bantuan Pemerintah	157
4.5.2. Prioritas Intervensi Dimensi Ketahanan Pangan	160
4.5.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Ketahanan Pangan	160
BAB V STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	162
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	171
6.2. Rekomendasi	174
Daftar Pustaka	177
Lampiran	181

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015	2
Tabel 1.2 Program Penanggulangan Kemiskinan RPJMD Kepri 2021-2026	9
Tabel 1.3. Target Persentase Penduduk Miskin RPJMD Kepri 2021-2026	10
Tabel 1.4 Indikator Kemiskinan	18
Tabel 1.5. Determinan Kemiskinan	20
Tabel 1.6 Penjelasan Tahapan Kajian	25
Tabel 2.1 Luas Wilayah	30
Tabel 2.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 No. Kabupaten/ Kota Luas Wilayah Laut (km ²)	31
Tabel 2.3 Nama Ibukota Kabupaten/Kota dan Jarak Ke Ibukota	31
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk	37
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk	37
Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Per Km ²	38
Tabel 2.8 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Kepulauan Riau, 2020	38
Tabel 2.9 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau	43
Tabel 2.10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau	44
Tabel 2.11 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020	45
Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase Kontribusi	46

terhadap Jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan	
Tabel 2.13 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	48
Tabel 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota	50
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau	50
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Provinsi Kepri 2017-2020	56
Tabel 3.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia Menurut Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021 (%)	57
Tabel 3.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kepulauan Riau, Relatif dengan Provinsi Lain di Sumatera	61
Tabel 3.4 Analisa Keterkaitan Kondisi Kemiskinan di Kepri	66
Tabel 3.5 Daftar Komoditi Makanan dan Andilnya terhadap Garis Kemiskinan	68
Tabel.4.1. Perkembangan APM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	72
Tabel. 4.2. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi APM Provinsi Kepri	72
Tabel.4.3. Perkembangan APS Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2019	74
Tabel. 4.4. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi APS Provinsi Kepri	75
Tabel. 4.5. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	77
Tabel. 4.6. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepri	77
Tabel.4.7. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di	79

Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Tabel. 4.8. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepri	79
Tabel.4.9. Perkembangan Jumlah Sekoah SMA/Sederajat Negeri & Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	81
Tabel. 4.10. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Jumlah Sekolah SMA/SMK/Sederajat Provinsi Kepri	82
Tabel.4.11. Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	83
Tabel. 4.12. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kepri	84
Tabel 4.13. Prioritas Intervensi Dimensi Pendidikan	84
Tabel 4.14. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah	86
Tabel 4.15. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Jumlah Sekolah	87
Tabel 4.16. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Putus Sekolah	89
Tabel.4.17. Perkembangan UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	91
Tabel. 4.18. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi UHH di Provinsi Kepri	92
Tabel.4.19. Perkembangan Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020 (per 100.000 penduduk)	93
Tabel. 4.20. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi UHH di Provinsi Kepri	94
Tabel.4.21. Perkembangan Prevalensi HIV Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	95
Tabel 4.22. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Prevalensi HIV di Provinsi Kepri	95
Tabel.4.23. Perkembangan Persentase penduduk yang mengalami	97

keluhan kesehatan sebulan yang lalu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	
Tabel. 4.24. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu di Provinsi Kepri	97
Tabel. 4.25. Perkembangan Persentase Balita yang di Imunisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2014-2020	98
Tabel. 4.26. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Persentase balita yang di Imunisasi di Provinsi Kepri	99
Tabel. 4.27. Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	101
Tabel. 4.28. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Perkembangan Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi Kepri	101
Tabel. 4.29. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan 2015-2020	102
Tabel. 4.30. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kepri	103
Tabel 4.31. Prioritas Intervensi Dimensi Kesehatan	104
Tabel 4.32. Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kematian	105
Tabel 4.33 Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan	106
Tabel 4.34. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Jumlah Tenaga Kesehatan	107
Tabel 4.35. Prioritas Wilayah Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	108
Tabel 4.36. Perkembangan TPT Kabupaten/Kota (2017-2020)	112
Tabel 4.37. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri	113
Tabel 4.38. Perkembangan TPAK Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten/Kota (2017-2020)	114
Tabel 4.39. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Posisi Relatif TPAK di Provinsi Kepri	115

Tabel 4.40. Perkembangan Persentase Pekerja Formal-Informal Kabupaten/Kota, Relatif Provinsi dan Nasional (Agustus 2020)	118
Tabel 4.41. Status Bekerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau (2016-2020)	119
Tabel 4.42. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Komposisi Pekerja Formal-Informal di Provinsi Kepri	121
Tabel 4.43. Perkembangan Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang Dari 35 Jam Kerja, Relatif Antar Provinsi	123
Tabel 4.44. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Penduduk Yang Bekerja Kurang Dari 35 Jam di Provinsi Kepri	124
Tabel 45. Perkembangan Persentase Penyaluran Kredit Usaha Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau (2015-2020)	125
Tabel 4.46. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Perkembangan Persentase Penyaluran Kredit Usaha 2015-2020	125
Tabel 4.47. Prioritas Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan	126
Tabel 4.48. Pemetaan Wilayah Intervensi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja	127
Tabel 4.49. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Melalui Bantuan Kredit	129
Tabel 4.50. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun	130
Tabel 4.51. Prioritas Wilayah Pemetaan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gabungan	131
Tabel 4.52. Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak	134
Tabel 4.53. Persentase RT Miskin Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama	134
Tabel 4.54. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Akses Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak di Kepri	135
Tabel 4.55. Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak	136

Tabel 4.56. Persentase RT Miskin Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama	137
Tabel 4.57. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Elektrifikasi di Provinsi Kepri	138
Tabel 4.58 Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	140
Tabel 4.59 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Baik Dari Tahun 2015 - 2020	141
Tabel 4.60. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Jalan Berkondisi Baik tahun 2015-2020	142
Tabel 4.61 Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau	142
Tabel 4.62. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Jembatan Berkondisi Baik tahun 2015-2020	143
Tabel 4.63 Jembatan Berkondisi Baik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau	144
Tabel 4.64. Prioritas Intervensi Dimensi Infrastruktur	145
Tabel 4.65. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak	146
Tabel 4.66. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik	147
Tabel 4.67. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik	148
Tabel 4.68. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Konektivitas	150
Tabel 4.69. Rata- Rata Konsumsi Kalori Perkapita (Kilo Kalori/Kapita/Hari)	152
Tabel 4.70. Persentase Pengeluaran Perkapita Makanan RT Miskin Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau (2016-2020)	156
Tabel 4.71. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Pengeluaran Perkapita Makanan RT Miskin di Provinsi Kepri	156
Tabel 4.72. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di Kepri dan Provinsi Lainnya	158

(2016-2020)	
Tabel 4.73. Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di Kabupaten/Kota (2016-2020)	159
Tabel. 4.74. Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Akses Rumah Tangga Miskin terhadap Program Bantuan Pangan di Provinsi Kepri	160
Tabel 4.75. Prioritas Intervensi Dimensi Katahanan Pangan	160
Tabel 4.76. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Meningkatkan Rata-Rata Konsumsi	161
Tabel 5.1. Matrik Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Analisis Profil Kemiskinan	163
Tabel 5.2. Matrik Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Analisis Determinan Kemiskinan	166

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Riau (Maret 2011-2021)	3
Grafik 1.2. Penduduk Miskin Desa dan Kota	4
Grafik 1.3. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau 2011-2020 (Rp)	5
Grafik 1.4. Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah Provinsi Kepulauan Riau (2017-2021)	6
Grafik 1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau	6
Grafik. 2.1. Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2020	41
Grafik.2.2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD) Tahun 2015-2020	41
Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepri (2015-2020)	49
Grafik 3.1 Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia Menurut Provinsi 2021	52
Grafik 3.2. Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2021	52
Grafik 3.3. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Nasional Tahun 2015-2021	53
Grafik 3.4. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia menurut Provinsi tahun 2021 (Ribuan Jiwa)	53
Grafik 3.5. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015-2021	54
Grafik 3.6. Persentase Penduduk Miskin Kepri menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015-2021	54
Grafik 3.7. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2020	55
Grafik 3.8. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	58

Provinsi-se Indonesia Tahun 2015-2021 (%)

Grafik 3.9. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepri Tahun 2015 – 2020	59
Grafik 3.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2021 (%)	59
Grafik 3.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepri menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Periode Maret 2015 – September 2021	60
Grafik 3.12 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2020	60
Grafik 3.13 Indeks keparahan kemiskinan (P2) provinsi di indonesia, 2021	61
Grafik 3.14 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Provinsi Kepri, dibandingkan Nasional.	62
Grafik 3.15 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menurut Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Periode Maret 2016-September 2020	63
Grafik 3.16 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Wilayah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2020	63
Grafik 3.17 Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (2016-2020)	68
Grafik 3.18 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)	69
Grafik. 4.1. Posisi Relatif APM Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2019	71
Grafik. 4.2.Trend APM Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2019	71
Grafik. 4.3. Posisi Relatif APS Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2020 (16-18 Tahun)	73
Grafik. 4.4. Trend APS Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020 (16-18 Tahun)	74
Grafik. 4.5. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepri	76

Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2020	
Grafik. 4.6. Trend Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020 (16-18 Tahun)	76
Grafik. 4.7. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2020	78
Grafik. 4.8. Trend Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020	78
Grafik. 4.9. Posisi Relatif Jumlah Desa yang Memiliki Sekolah SMU/SMK Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2018	80
Grafik. 4.10. Trend Jumlah Desa yang Memiliki Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2018	81
Grafik. 4.11. Jumlah Sekolah SMA dalam Kondisi Rusak di Kepri dan Nasional 2020	82
Grafik.4.12. Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020	83
Grafik 4.13. Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah	85
Grafik 4.14. Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah	87
Grafik 4.15. Pemetaan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah- Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah	88
Grafik. 4.16. Posisi Relatif UHH Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2018	90
Grafik. 4.17. Trend UHH Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020	91
Grafik. 4.18. Trend Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020	93
Grafik. 4.19. Trend Prevalensi HIV Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020	95
Grafik. 4.20. Trend Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu Provinsi Kepri Terhadap	96

Nasional Tahun 2014-2019	
Grafik. 4.21. Trend Persentase Balita yang di Imunisasi Provinsi Kepri Terhadap Nasional berdasarkan jenisnya Tahun 2020	98
Grafik. 4.22. Posisi Relatif Puskesmas Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2015	100
Grafik. 4.23. Posisi Relatif Rumah Sakit Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2015	100
Grafik 4.24. Pemetaan Menurunkan Angka Kematian	104
Grafik 4.25. Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan	105
Grafik 4.26. Pemetaan Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Jumlah Tenaga Kesehatan	107
Grafik 4.27. Pemetaan Wilayah Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	108
Grafik 4.28. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepri terhadap Provinsi Lain dan Nasional (Februari 2021	110
Grafik 4.29. Tren Pengangguran Terbuka Kepri Dan Nasional (2016-2021)	110
Grafik 4.30. Jumlah Pengangguran Terbuka Antar Provinsi Februari 2021 (dalam ribuan)	111
Grafik 4.31. Jumlah Orang (dalam ribuan) dan Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur di Kepulauan Riau, Agustus 2020.	112
Grafik 4.32. Tren TPAK Kepri dan Nasional periode 2016-2020 (Agustus)	114
Grafik 4.33. Posisi TPAK Kepulauan Riau , Relatif Antar Provinsi dan Nasional (Agustus 2020)	115
Grafik 4.34. Perkembangan Komposisi Pekerja Formal-Informal, Kepri dan Nasional (2016-2020)	116
Grafik 4.35. Perkembangan Pekerja Sektor Informal dan Formal Kepulauan Riau, Relatif Provinsi dan Nasional (2020)	117
Grafik 4.36. Tren Fluktuasi Sektor Pekerja Formal dan Informal, Kepri-Nasional (2016-2020)	118
Grafik 4.37. Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam,	122

Agustus 2020

Grafik 4.38. Perkembangan Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam, Relatif Antar Provinsi, 2020	123
Grafik 4.39. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja	127
Grafik 4.40. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Melalui Bantuan Kredit.	128
Grafik 4.41. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun.	129
Grafik 4.42. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Dimensi Ketenagakerjaan	131
Grafik 4.43. % Akses 40% RT Kalangan Bawah Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (2015-2019)	132
Grafik 4.44. % Akses 40% Bawah RT Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (2015-2019)	133
Grafik 4.45. Persentase Akses 40% RT Bawah terhadap Elektrifikasi	138
Grafik 4.46. Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak	145
Grafik 4.47. Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama	147
Grafik 4.48. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Dimensi Infrastruktur Dasar	148
Grafik 4.49. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik	149
Grafik 4.50. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Jembatan Berkondisi Baik	150
Grafik 4.51. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Konektivitas	151
Grafik 4.52. Perkembangan Produksi Komoditas Pertanian Kepulauan Riau (2016-2020)	151
Grafik 4.53. Rata-Rata Konsumsi Kalori Perkapita Kepulauan Riau Menurut Komoditas Golongan Padi-Padian (2018-2020)	152
Grafik 4.54. Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Beras di Indonesia, 2019	153
Grafik 4.55. Fluktuasi Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin	154

untuk Makanan di Kepulauan Riau	
Grafik 4.56. Persentase Perkapita RT Miskin untuk Makanan Relatif Antar Provinsi (2020)	155
Grafik 4.57. Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin untuk Makanan di Kepulauan Riau (Tahun 2020)	155
Grafik 4.58. Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Miskin dalam Akses terhadap Program Bantuan Pangan	157
Grafik 4.59. Tren Persentase Rumah Tangga Miskin dalam Akses terhadap Program Bantuan Pangan Kepri dan Nasional (2016-2020)	158
Grafik 4.60. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Rata-Rata Konsumsi	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Riau (Desa & Kota)	4
Gambar 1.2 Tahapan Kajian	24
Gambar 4.1 Pola Distribusi Perdagangan Beras di Kepulauan Riau	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia. Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang banyak dihadapi oleh negara-negara dunia ketiga. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional sejak lama. Esensi dasar dari keberadaan negara adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, begitu juga dengan Negara Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat yang berbunyi ; *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan telah dilaksanakan baik dalam skala Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga desa untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

Secara nasional, kebijakan penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari perencanaan jangka panjang nasional dan penjabarannya dalam perencanaan jangka menengah yang bersifat lima tahunan, yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam agenda pembangunan nasional, masalah kemiskinan merupakan bagian dari dua konsekuensi

penting dari adanya pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia. Pertama, penduduk golongan menengah ke bawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, adanya potensi meningkatnya kesenjangan antarkelompok berpendapatan terbawah dan menengah ke atas yang menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Untuk itu pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Tahun 2022 berada pada rentang 8,5% hingga 9,0% dari total populasi penduduk.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai komitmen yang kuat dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2010-2015, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan 7 kabupaten/kota membangun kerjasama dalam pengentasan kemiskinan. Tepat pada Pada hari ini Jumat tanggal 20 bulan Agustus 2010, bertempat di Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau, sepakat untuk melaksanakan Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Secara terperinci program/kegiatan pengentasan kemiskinan tersebut ada pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Program Pengentasan Kemiskinan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015

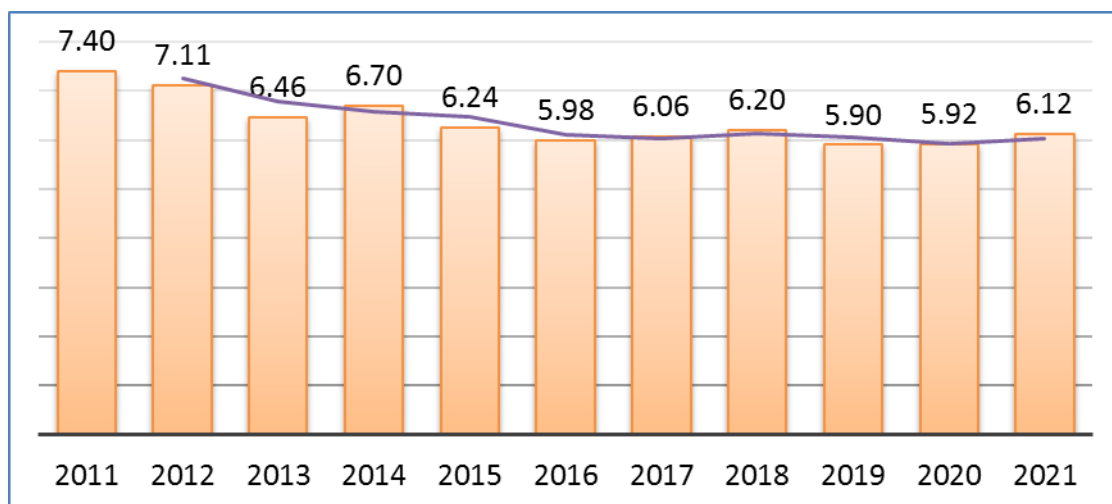
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa Tertinggal		Program Rumah Layak Huni		Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal	
1.	Pemberian makanan tambahan balita, Ibu hamil.	1.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga,	1.	Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama , KUKM diutamakan kepada Ibu-Ibu/Perempuan.
2.	Perawatan kasus gizi buruk/gizi kurang.	2.	Penyediaan sarana/sumber air bersih.	2.	Kegiatan menumbuh kembangkan usaha tani .
3.	Pelayanan kesehatan melalui (Jamkesda).	3.	Penyediaan Listrik Rumah.	3.	Kegiatan menumbuh kembangkan usaha nelayan .
4.	Pembangunan / rehabilitasi Posyandu, Pustu.				
5.	Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA.				

Sumber : Bahan Pemaparan Barenlibang, Pemanfaatan Hasil Monitoring Program Oleh Provinsi Bersama Kab/Kota Dalam Perbaikan Program Hibah Provinsi Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Komitmen untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan terus berlanjut dengan berbagai program/kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau. Pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 secara tegas dalam Misi 4 memfokus pada penanganan kemiskinan. Dimana misi tersebut sebagai berikut *“Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”*.

Berbagai program/kegiatan pengentasan kemiskinan sudah dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam 10 tahun terakhir persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau bersifat fluktuatif. Sepanjang tahun 2011-2016 mengalami trend penurunan dan dalam dua tahun terakhir persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat. Dalam 10 tahun terakhir persentase penduduk miskin yang paling rendah pada tahun 2019 yaitu 5,90%, per bulan Maret 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,12%. Secara lebih lengkap pada grafik berikut ini.

Grafik 1.1
Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Riau (Maret 2011 2021)

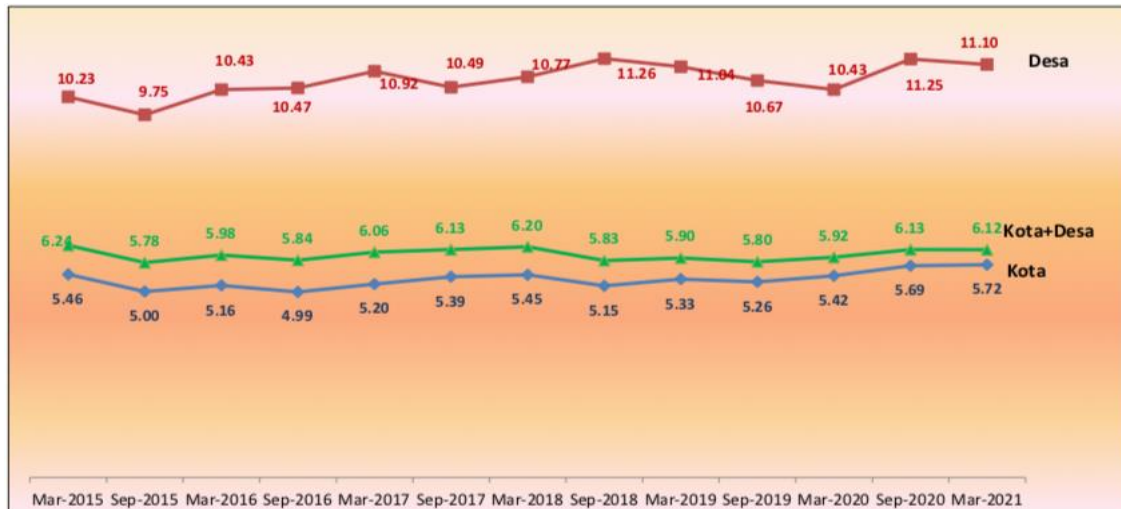


Sumber : BPS, olahan tahun 2021

Berdasarkan tempat tinggal penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau dalam 10 tahun terakhir selalu di atas 10% berdomisili di pedesaan dan sekitar 5% berdomisili di perkotaan. Terakhir sejak September 2020 sampai dengan Maret 2021 yang bertempat tinggal di perkotaan naik

sebesar 0,03% dan di perdesaan turun sebesar 0,15%. Secara lebih detail ada pada grafik berikut ini.

Grafik 1.2
Persentase Penduduk Miskin Desa dan Kota



Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan jumlah penduduk miskin di pedesaan di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang September 2020 sampai dengan Maret 2021 mengalami penurunan dari 20.788 orang turun menjadi 19.566 orang, sedangkan di bertambah dari 121.823 orang menjadi 124.896 orang. Secara keseluruhan disparitas kemiskinan perdesaan masih tinggi, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi. Secara terperinci ada pada gambar berikut.

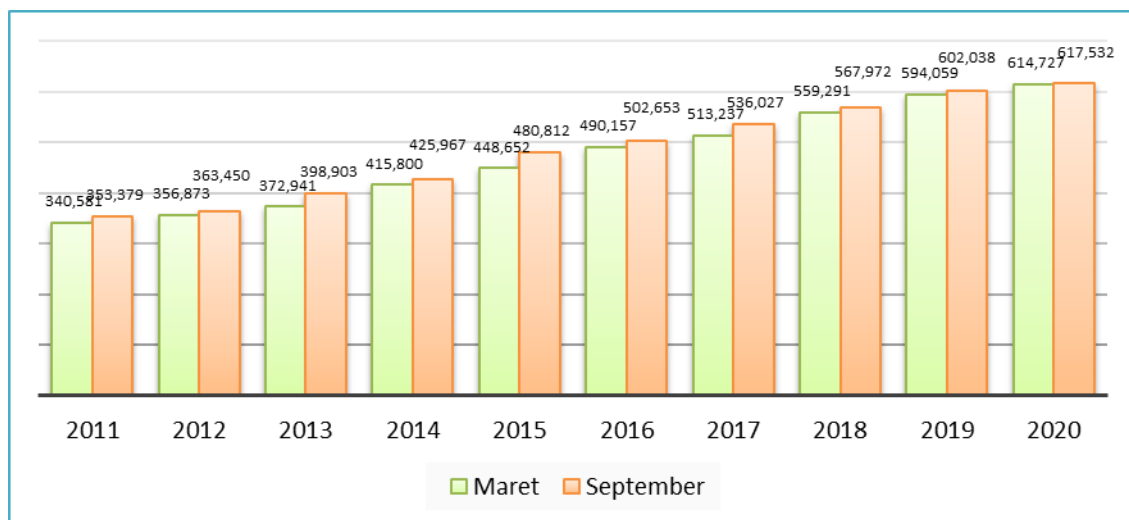


Gambar 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Riau (Desa & Kota)

Sumber : BPS 2021

Selama sepuluh tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau 2011-2020 (Rp) juga mengalami peningkatan, pada September 2011 hanya Rp. 353.375 sedangkan pada September 2020 naik menjadi Rp. 617.532. Maknanya penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berpenghasilan di bawah Rp. 617.532 masuk pada kategori penduduk miskin.

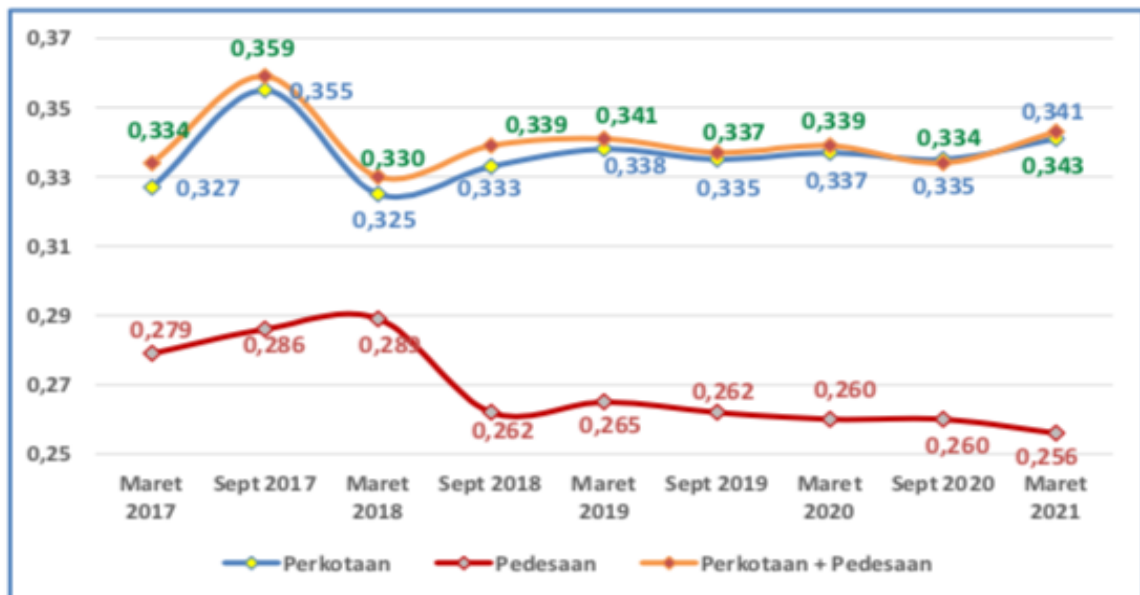
Grafik 1.3.
Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
2011-2020 (Rp)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau semakin kompleks, karena gini ratio semakin meningkat dalam 5 tahun terakhir. Indeks gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Pada Maret 2021, gini ratio di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,341 naik 0,007 dibandingkan September 2020. Secara sebaran di perkotaan pada bulan Maret 2021 gini ratio di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,343 naik 0,008 dibandingkan September 2020, sedangkan di pedesaan sebesar 0,256 turun 0,005 dibandingkan September 2020.

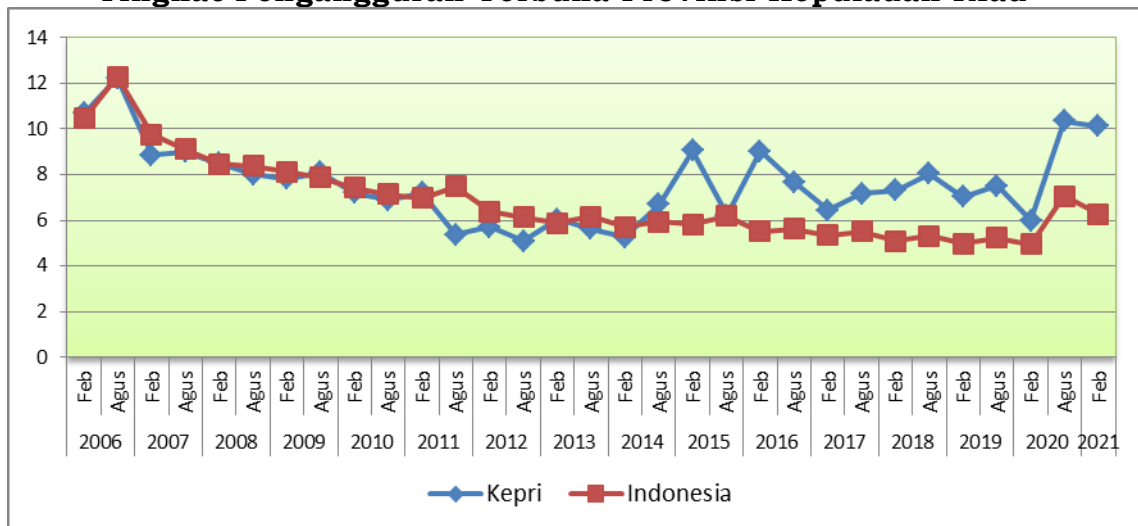
Grafik 1.4.
Perkembangan Gini Ratio Menurut Daerah
Provinsi Kepulauan Riau (2017-2021)



Sumber : BPS, 2021

Tantangan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau semakin pelik, karena dalam 7 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sejak Agustus 2014 selalu di atas tingkat pengangguran terbuka nasional, terakhir pada bulan Februari 2021 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 10,12% dan paling tertinggi di Indonesia. Data ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.5.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : BPS, olahan tahun 2021

Saat ini, kebijakan penurunan angka kemiskinan juga dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dalam kebijakan pembangunan jangka menengah ini, Provinsi Kepulauan Riau lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumber Daya Manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan, serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri. Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Kepulauan Riau menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun ke depan memiliki target dalam penanggulangan kemiskinan yaitu menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,74 pada tahun 2023.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Implikasi permasalahan kemiskinan sangat mempengaruhi berbagai aspek/dinamika kehidupan manusia secara keseluruhan, sehingga akan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia dari berbagai bidang, terutama bidang Pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Untuk itu masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

Secara umum, kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Kepulauan Riau adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, asset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodic, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran (petani dan nelayan) menuju industrialisasi komoditas pertanian (industri pengolahan hasil pertanian,) dan belum optimalnya pendmappingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Kemiskinan juga di pengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana memnciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politiknya lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di daerah termasuk di Provinsi Kepulauan Riau mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mnegurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, serta pelibatan berbagai unsur *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat.

Pada Bab IX RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 ada 7 Kebijakan pembangunan yang bersifat *cross cutting* yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan stunting, pembangunan infrastruktur, kluster daerah pertanian, *tourism linkage networking*, industri perikanan dan kelautan serta *link and match* pendidikan dan industri. Kebijakan pembangunan *cross cutting* merupakan upaya dalam melakukan pembangunan pada suatu sektor yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa permasalahan kemiskinan ke depan di Provinsi akan ditangani secara bersama-sama lintas OPD dan pemerintah daerah. Ada 30 program

penanggulangan kemiskinan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Tabel 1.2
Program Penanggulangan Kemiskinan RPJMD Kepri 2021-2026

Program Penanggulangan Kemiskinan		
<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Peningkatan Kualitas Keluarga • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Pengelolaan Persampahan • Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan • Program Pengelola Energi Terbarukan • Program Pengelola Ketenagalistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Menengah, Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri • Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Kemudian masih dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 menarget pada tahun 2026 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau hanya 5,57% atau turun 0,5% dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 6,07%. Kemudian untuk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 juga diharapkan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Untuk Kabupaten Karimun ditarget sebesar 6,75% pada tahun 2026, turun sebanyak 0,31% dibandingkan tahun 2021, di Kabupaten Bintan sebesar 6,12% atau turun 0,42%, di Kabupaten Natuna sebesar 4,33% atau turun 0,24%, di Kabupaten Lingga sebesar 13,36% atau turun 0,9%, di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 5,90% atau turun 0,77%, di Kota Batam

sebesar 4,20% atau turun 0,63% dan di Kota Tanjungpinang sebesar 6,12% atau turun 0,96%.

Tabel 1.3.
Target Persentase Penduduk Miskin RPJMD Kepri 2021-2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	
1	Karimun	7.06	7.04	6.79	6.78	6.76	6.76	6.75
2	Bintan	6.54	6.50	6.24	6.20	6.16	6.12	6.12
3	Natuna	4.57	4.55	4.38	4.37	4.35	4.33	4.33
4	Lingga	14.26	14.17	13.60	13.52	13.44	13.36	13.36
5	Kepulauan Anambas	6.67	6.56	6.22	6.11	6.01	5.90	5.90
6	Kota Batam	4.82	4.72	4.46	4.37	4.28	4.20	4.20
7	Kota Tanjungpinang	9.56	9.43	8.97	8.85	8.72	8.60	8.60
	Provinsi Kepulauan Riau	6.07	6.01	5.74	5.69	5.63	5.57	5.57

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Berdasarkan uraian di atas ada sejumlah argumen yang memperkuat urgensi kajian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan di Kepulauan Riau meningkat mulai tahun 2019 s.d 2021 dari 5,90 % hingga mencapai 6,12% , jumlah penduduk miskin Maret 2021 mencapai 144.462 orang.
2. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepri sejak Agustus 2014 selalu di atas Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, pada Februari 2021 TPT Kepri tertinggi di Indonesia
3. Pertumbuhan ekonomi melemah dan tingkat kemiskinan bertambah akibat bencana non-alam covid 19.
4. Dalam beberapa tahun terakhir tidak ada lagi kerjasama (MOU) antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan 7 kabupaten/kota dalam pengentasan kemiskinan.
5. Dalam RPJMD Kepri Tahun 2021-2026, pada Bab IX Program Program Pendukung Pembangunan *Cross Cutting*, ada 30 Program Penanggulangan Kemiskinan.
6. Target Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 sebesar 5,57%.

7. Kompleksitas kemiskinan di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itu strategi penanggulangan kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi daerah.

Dengan disusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih lima tahun yang akan datang dalam konteks penanggulangan kemiskinan di daerah. Keberadaan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini merupakan cara dalam mengurangi persoalan kompleks menjadi lebih mudah dalam menetapkan konsep, menentukan masalah utama, serta mempermudah pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan. Diharapkan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Tambahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
 15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 631); Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 723).

1.3. Maksud dan Tujuan Kajian

Maksud dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai arus utama (*mainstreaming*) dalam menyusun program kerja di daerah;
2. Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Sosial adalah :

1. Menggambarkan kondisi umum kemiskinan saat ini dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menjadi salah satu tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

1.4. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan adalah Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berkualitas.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Definisi Kemiskinan

Banyak pendapat dan pandangan para ahli dan lembaga dalam mendefinisikan kemiskinan. World Bank tahun 1995 menyatakan bahwa *"Poverty has many faces, changing from place to place and across time, and*

has been described in many ways". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki makna yang beragam, dihitung dengan cara yang beragam, dan diselesaikan dengan cara yang beragam juga.

Menurut Mubyarto (1998:8) kemiskinan adalah *"Suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya keterampilan, produktivitas, pendapatan, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat"*.

Menurut Subandi (2014:78) kemiskinan adalah kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Disamping itu pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka.

Ahli lain Mowafi (2015) merumuskan empat konsep kemiskinan, yaitu kemiskinan yang dilihat dari pendapatan (*income poverty*), kualitas sumber daya manusia (*human poverty*), kehilangan kemampuan (*capabilities deprivation*), dan konsep partisipatori dari orang miskin (*voice of the poor*). Income poverty, melihat kemiskinan dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan absolut, yaitu menghitung kemiskinan berdasarkan minimum standar kebutuhan, misalnya pendapatan 1,9 dolar perhari. Mereka yang memiliki pendapatan kurang dari 1,9 dolar per hari per orang dikatakan masuk dalam katagori orang miskin. Di tahun 2015, *World Bank* mencatat terdapat 10% populasi di dunia masuk dalam katagori miskin karena memiliki pendapatan kurang dari 1,9 dolar per hari. Kedua, pendekatan relatif, yaitu melihat kemiskinan individu atau masyarakat tertentu relatif dengan seluruh masyarakat yang ada. Dari kedua pendekatan tersebut, pendekatan absolut dianggap metode yang paling mudah dan sering dijadikan sebagai indikator untuk mengurangi tingkat kemiskinan di dunia, sedangkan pendekatan relatif jarang dijadikan acuan dalam program pengentasan kemiskinan, karena sulit untuk dapat membuat setiap individu

di dunia ini memiliki standar kehidupan yang sama (Sharpe, 2016) (dalam Vanda Ningrum, 2019).

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kosep kemiskinan menurut BPS inilah yang digunakan dalam kajian ini.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Konsep berikutnya adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang dirujuk dari BPS. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahana Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran

pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Kosep tentang kemiskinan dapat di bagi kedalam empat kelompok berikut ini :

1. Kemiskinan Absolut

Kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan Relatif

Kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

3. Kemiskinan Kultural

Mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan Struktural

Situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Penyebab Kemiskinan, menurut Bappenas (2018) berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

1. Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
2. Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
3. Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
4. Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
5. Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

1.5.2. Indikator Kemiskinan

Banyak lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri yang merilis indikator kemiskinan, seperti yang ada pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Indikator Kemiskinan

Lembaga Indikator		
United Nations Development Programs (UNDP)	a. Standar/Kualitas Kehidupan dengan indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Aset • Kondisi & luas lantai rumah • Sumber penerangan • Air bersih • MCK /sanitasi • Bahan bakar untuk memasak 	b. Kualitas Pendidikan dengan indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran dalam pendidikan • Lama sekolah c. Kesehatan dengan Indikator : <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kematian bayi • Gizi/Nutrisi
World Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari • Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari 	
Badan Pusat Statistik (BPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan

	<p>sebagai penduduk miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll) 	<p>kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan</p>
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria yaitu:	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk penargetan keluarga miskin yang dibagi dalam lima kategori kesejahteraan, yaitu keluarga prasejahtera (Pra-KS), keluarga sejahtera 1 (KS1), keluarga sejahtera 2 (KS2), keluarga sejahtera 3 (KS3), dan keluarga sejahtera 3 plus (KS3 Plus). 	<p>Dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, Sebuah keluarga dikategorikan sebagai Pra-KS bila belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator 1 hingga 5, KS1 bila memenuhi indikator 1 hingga 5, KS2 bila memenuhi indikator 1 hingga 14, KS3 bila memenuhi indikator 1 hingga 21, dan dikategorikan KS3 Plus bila memenuhi seluruh indikator 1 hingga 23.</p>
The SMERU Research Institute mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria yaitu:	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan). • Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi). • Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga). • Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam. • Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat. • Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. • Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.

1.5.3. Determinan Kemiskinan.

Determinan kemiskinan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, maka strategi dalam penanggulangan kemiskinan akan mudah untuk dilakukan. Banyak pendapat para ahli dan lembaga yang determinan kemiskinan. Pada tabel berikut akan digambarkan secara ringkas pandangan tersebut.

Tabel 1.5.
Determinan Kemiskinan

No	Pakar/Ahli	Penjelasan
1	Sharp (1996)	1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; 2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia; 3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.
2	Ginandjar Kartasasmita (1996)	Rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian.
3	Todaro (2006)	Pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan.
4	Sukirno (2004)	Pengangguran mempengaruhi angka kemiskinan, bahwa efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapaiseseorang.
5	Octaviani (2001)	Jumlah pengangguran erat kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh.
6	Puspita (2015), Ramdani (2015), Afda (2016)	Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
7	Myrdal (2000)	Semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Angka Harapan Hidup (AHH) maka produktivitas akan semakin meningkat.
8	Arsyad (1999)	Faktor kesehatan mempengaruhi angka kemiskinan. perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan <i>output</i> .

Sumber : olahan tahun 2021.

Berdasarkan uraian pada tabel di atas banyak faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan diantaranya pola kepemilikan sumberdaya, kualitas sumberdaya manusia, perbedaan akses dalam modal, pendidikan, kesehatan, pengangguran dan penghasilan atau pendapatan.

Merujuk pada Pedoman Penanggulangan Kemiskinan yang dikeluarkan Sekretariat Wakil Presiden RI strategi analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah dengan melakukan analisis pada beberapa Indikator Utama Kemiskinan yaitu :

1. Masalah Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.
2. Masalah Kesehatan.
3. Masalah Pendidikan.
4. Masalah Infrastruktur Dasar.
5. Masalah Ketahanan Pangan.

1.5.4. Penanggulangan Kemiskinan.

Adelman dan Robinson (2000) Menyebutkan ada 4 pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan :

- a. Pendekatan yang berorientasi kepada aset, yaitu kebijakan untuk meningkatkan kuantitas aset kelompok miskin.
- b. Strategi penciptaan permintaan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kelompok miskin, yang umumnya terdiri dari tenaga kerja tidak terampil.
- c. Strategi atau kebijakan yang dapat meningkatkan harga dari aset utama yang dimiliki kelompok miskin.
- d. Strategi atau kebijakan yang dapat mendorong peningkatan produktivitas, yaitu suatu kebijakan yang beroperasi melalui pasar faktor produksi atau pasar komoditi, dan/atau kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas dari aset yang dimiliki kelompok miskin.

Pandangan lain dikemukakan oleh Nafziger (2005) strategi dan kebijakan penurunan kemiskinan dalam bukunya yang berjudul *Economic Development*, dapat dilakukan melalui:

- 1) Reformasi agraria dan redistribusi lahan.

Di banyak negara berkembang, ketersediaan lahan pertanian yang subur sudah semakin berkurang. Sementara kepemilikan lahan terkonsentrasi pada sekelompok kecil petani pemilik lahan. Adanya reformasi agraria dan redistribusi lahan menjadi hal utama dalam upaya mengurangi kemiskinan.

- 2) Permodalan dan perkreditan.

Kelompok miskin mengalami kesulitan dalam mengakses sumber kredit dan permodalan misalnya perbankan. Hal ini disebabkan karena prosedur yang rumit dan tidak tersedia jaminan.

- 3) Kebijakan peningkatan pendidikan dan latihan yang merupakan investasi modal manusia sangat penting untuk menghasilkan aliran pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar universal dan gratis merupakan cara penting untuk meredistribusi modal manusia kepada kelompok miskin.

Selanjutnya, Todaro dan Smith (2015) menyampaikan bahwa salah satu strategi kebijakan penurunan kemiskinan adalah dengan dana tunai/subsidi. Namun transfer langsung dan subsidi sangat efektif dengan beberapa prasyarat. Pertama, karena sumber daya terbatas sehingga harus dipastikan bahwa transfer dan subsidi diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Kedua, penerima tidak tergantung pada bantuan, tetapi termotivasi membangun aset seperti pendidikan anak yang nantinya dapat mencegah anaknya tetap dalam kondisi miskin.

Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Kemudian program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Masih berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara :

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kemudian, Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui :

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

1.6. Metode Kajian

Kajian strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau ini berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyusunan SPKD dan Buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan yang diterbitkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

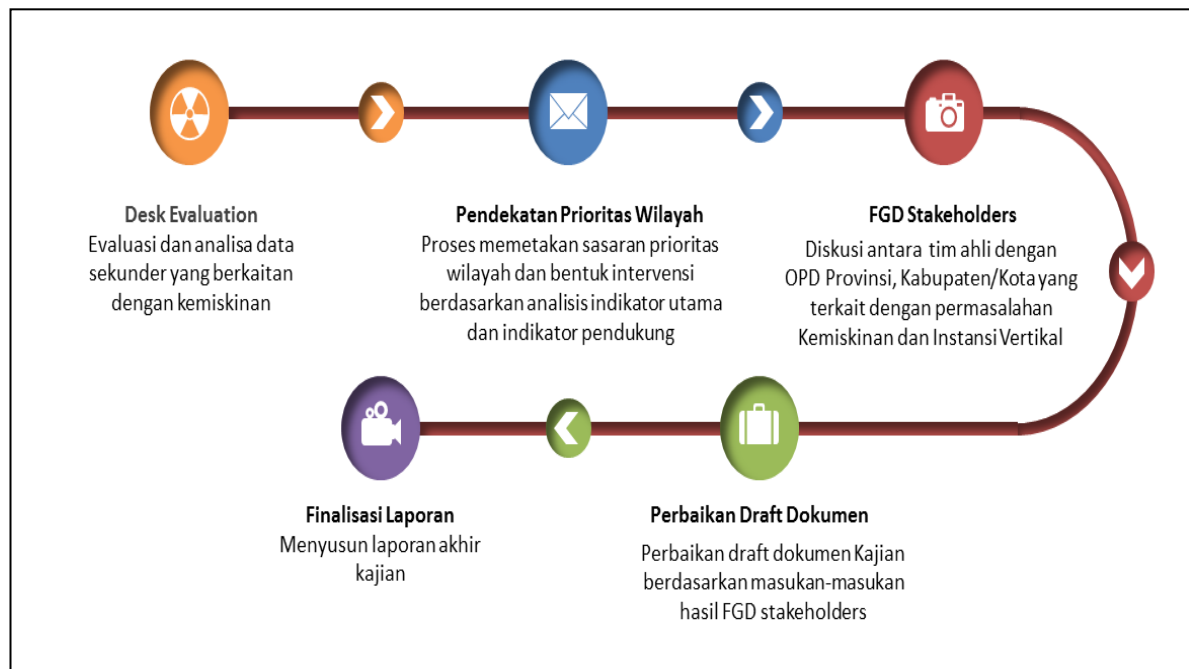
1.6.1. Tahapan Kajian

Ada lima tahapan yang akan dilakukan dalam penyusunan kajian strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau ini.

1. Tahapan Desk Evalution adalah tahapan evaluasi dan analisa data sekunder yang berkaitan dengan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional.
2. Tahapan Pendekatan Prioritas Wilayah adalah proses memetakan sasaran prioritas wilayah dan bentuk intervensi berdasarkan analisis indikator utama dan indikator pendukung.
3. Tahapan *Focus Group Discussion Stakeholders* adalah diskusi terarah antara tim ahli dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota

yang terkait dengan permasalahan Kemiskinan dan Instansi Vertikal.

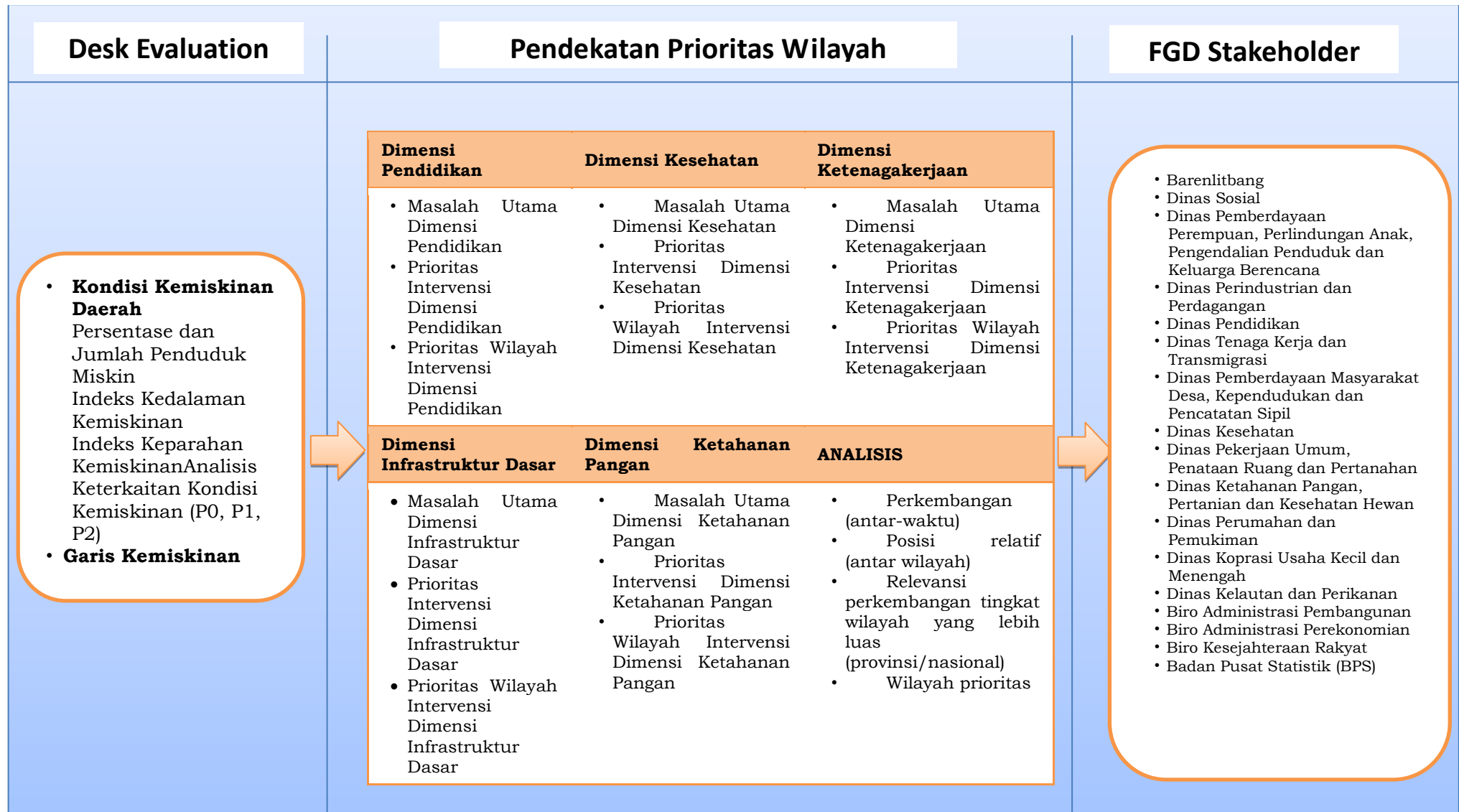
4. Tahapan Perbaikan Draft Dokumen adalah tahapan perbaikan draft dokumen Kajian berdasarkan masukan-masukan hasil FGD stakeholders
5. Finalisasi Laporan adalah proses menyusun laporan akhir kajian.



Gambar 1.2 Tahapan Kajian

Sumber : Peneliti

Tabel 1.6 Penjelasan Tahapan Kajian



1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam kajian ini melalui ; pertama, kajian literatur melalui buku, jurnal, hasil penelitian, *prosiding*, *working paper*, aturan perundang-undangan media cetak dan elektronik serta dokumen lain yang relevan dengan masalah kajian. Kedua, dokumentasi telaah dokumen yang bersumber dari rilis BPS dan lembaga pemerintahan lainnya. Ketiga, *focus group discussion stakeholders* yang melibatkan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang terkait dengan permasalahan Kemiskinan dan Instansi Vertikal.

1.6.3. Analisa Data

Analisa data pada Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau akan dilakukan dalam lima analisis berikut :

- a. Mengetahui perkembangan (antar-waktu) dari capaian penanggulangan kemiskinan menurut indikator utama.
- b. Mengetahui posisi relatif (antar wilayah) dari capaian penanggulangan kemiskinan menurut indikator utama.
- c. Mengetahui relevansi perkembangan capaian penanggulangan kemiskinan terhadap perkembangan capaian tersebut di tingkat wilayah yang lebih luas (provinsi/nasional), menurut indikator utama.
- d. Mengetahui efektivitas intervensi kebijakan terhadap indikator utama.
- e. Analisis wilayah intervensi ini menggunakan teknik analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan. Melalui analisis kuadran ini dapat ditentukan 4 kategori prioritas intervensi sebagai berikut :
 1. Prioritas 1: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya negatif.
 2. Prioritas 2: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x negatif, namun indikator y positif.
 3. Prioritas 3: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x positif, namun indikator y negatif.

4. Prioritas 4: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya positif. Prioritas 4, ini memiliki derajat prioritas yang paling rendah atau disebut dengan wilayah non prioritas.

1.6.4. Ruang Lingkup Kajian

Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dipandang perlu untuk memberikan batasan terhadap kegiatan/pekerjaan yang dilakukan. Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun ruang lingkup materi pekerjaan yang akan dilakukan secara umum adalah:

1. Mendeskripsikan tentang kondisi kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau periode lima tahun terakhir ;
2. Melakukan analisis dimensi kemiskinan dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan;
3. Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Kajian Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau ini akan terdiri dari 6 bab berikut :

Bab I Pendahuluan	Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, tinjauan teori, metode dan tahapan penyusunan kajian, dan sistematika penulisan.
Bab II Kondisi Umum Provinsi Kepulauan Riau	Berisi uraian tentang luas dan batas wilayah administrasi, aspek geografi dan demografi, dan struktur dan pertumbuhan wilayah.
Bab III Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau	Berisi uraian tentang konsep kemiskinan dan kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.
Bab IV	Berisi uraian tentang analisis akar masalah

Determinan Daerah	Kemiskinan	dan analisis prioritas wilayah intervensi
Bab V Strategi Kemiskinan	Penanggulangan	Berisi uraian tentang strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.
Bab VI Penutup		Berisi Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi hasil kajian.

BAB II

GAMBARAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1. Kondisi Geografis

Secara Geografis, Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 00°29' Lintang Selatan dan 04°40' Lintang Utara serta antara 103°22' Bujur Timur sampai dengan 109°4' Bujur Timur. Berdasarkan data dari Biro Pemerintahan, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 1.800 pulau.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- b. Sebelah Timur : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- c. Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- d. Sebelah Barat : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- b. Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- c. Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- d. Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 Km², terdiri dari luas lautannya sebesar 241.215,30 Km² (95,79 %) dan sisanya seluas 10.595,41 Km² (4,21 %) merupakan wilayah daratan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, luas wilayah masing-masing kabupaten/ kota Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Karimun (912,75 Km²)
2. Bintan (1.318,21 Km²),
3. Natuna (2.009,04 Km²),
4. Lingga (2.266,77 Km²),
5. Kepulauan Anambas (590,14 Km²)
6. Kota Batam (960,25 Km²)
7. Kota Tanjungpinang (144,56 Km²)

Tabel 2.1
Luas Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Pulau
1	Karimun	912,75	249
2	Bintan	1 318,21	241
3	Natuna	2 009,04	154
4	Lingga	2 266,77	537
5	Kepulauan Anambas	590,14	238
6	Tanjungpinang	144,56	372
7	Batam	960,25	9
Total Provinsi Kepulauan Riau		8 201,72	1.800

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai
Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 No. Kabupaten/ Kota Luas
Wilayah Laut (km²)

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Laut (Km ²)
1	Karimun	102.964,08
2	Bintan	4.698,09
3	Natuna	216.113,42
4	Lingga	43.339,00
5	Kepulauan Anambas	46.074,00
6	Batam	3.675,25
7	Tanjungpinang	149,13
Provinsi Kepulauan Riau		417.012,97

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

Jarak dan aksesibilitas yang terdapat antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya akan mempengaruhi tingkat interaksi penduduk antar wilayah. Semakin jauh jarak dan minimnya sarana aksesibilitas suatu wilayah dengan pusat-pusat layanan misalnya seperti pusat pemerintahan, pusat pendidikan, maupun pusat perdagangan, maka akan memperkecil intensitas interaksi antar penduduk wilayah dan semakin memperbesar rentang kendali beban pembangunan.

Tabel 2.3
Nama Ibukota Kabupaten/Kota dan Jarak Ke Ibukota

No	Kabupaten/Kota	Nama Ibukota	Jarak Ke Ibukota Provinsi (Km)
1	Tanjungpinang	Tanjungpinang	0
2	Batam	Batam	70,4
3	Bintan	Bintan Buyu	32
4	Karimun	Tanjung Balai	120,8
5	Natuna	Ranai	704
6	Lingga	Daik	96
7	Kepulauan Anambas	Tarempa	310,4

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jarak yang paling jauh dengan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah Ibu kota Kabupaten Natuna (Ranai), sedangkan Ibu kota Kabupaten/Kota yang paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi adalah Bintan Buyu dengan jarak 32 Km dari Tanjungpinang.

2.2. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.
2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).
3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.
4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

2.3. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempati di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh

Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarang juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya- timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, podsolik merah kuning, latosol dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau bulkdensity kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertotol kuning, merah dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompok di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

2.4. Kondisi Kependudukan

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu dalam pembangunan, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek tapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat

tercapainya kondisi penduduk yang ideal. Sehingga perlu didorong kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk yang didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan agar persebaran penduduk antar wilayah dapat optimal.

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 2.064.564 jiwa yang terdiri atas 1.053.296 jiwa penduduk laki-laki dan 1.011.268 jiwa penduduk perempuan. Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,16 ini berarti diantara 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Karimun	129.761	123.696	253.457
2	Bintan	82.190	77.328	159.518
3	Natuna	41.890	39.605	81.495
4	Lingga	50.870	47.763	98.633
5	Kepulauan Anambas	24.502	22.900	47.402
6	Batam	609.399	586.997	1.196.396
7	Tanjungpinang	114.684	112.979	227.663
Kepulauan Riau		1.053.296	1.011.268	2.064.564

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2000-2010	2010-202
1	Karimun	2,22	1,72
2	Bintan	2,65	1,11
3	Natuna	3,01	1,62
4	Lingga	0,86	1,31
5	Kepulauan Anambas	2,41	2,32
6	Tanjungpinang	2,80	1,9
7	Kota Batam	7,69	2,32
Provinsi Kepulauan Riau		4,95	2,02

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Batam sebesar 57,95 persen. Sedangkan Kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 251,72 penduduk per km², dimana wilayah yang terpadat berada di Kota Tanjungpinang sebesar 1.574,87 penduduk per km².

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk	
		2000-2010	2010-2021
1	Karimun	12,66	12,28
2	Bintan	8,47	7,73
3	Natuna	4,11	3,95
4	Lingga	5,14	4,78
5	Kepulauan Anambas	2,23	2,30
6	Tanjungpinang	11,16	11,03
7	Batam	56,24	57,95
Provinsi Kepulauan Riau		100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah yang terbuka, menjadikan pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh

pertumbuhan penduduk alamiah tapi juga dipengaruhi oleh pertumbuhan non alamiah. Kondisi ini menyebabkan kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau meningkat cukup tinggi, kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau per Km² dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Per Km²

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk Per Km ²	
		2000-2010	2010-202
1	Karimun	232,88	277,69
2	Bintan	107,95	121,01
3	Natuna	34,35	40,56
4	Lingga	38,05	43,51
5	Kepulauan Anambas	63,39	80,32
6	Tanjungpinang	1296,06	1574,87
7	Batam	983,37	1245,87
Provinsi Kepulauan Riau		100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

2.5. Kondisi Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebanyak 1.133.776 penduduk, dimana sebesar 1.016.600 penduduk yang bekerja dan 117.176 penduduk pengangguran. Jika dirinci per Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 yang paling besar berada di Kota Batam sebesar 11,79.

Tabel 2.8
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama
Seminggu yang Lalu di Provinsi Kepulauan Riau, 2020

No	Kabupaten/ Kota	Bekerja	Angkatan Kerja				Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja			
			Pengangguran			Jumlah Angkatan Kerja		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
			Pernah Bekerja	Tidak Pernah Bekerja	Jumlah						
1	Karimun	96.925	6.340	2.446	8.786	105.081	91,64	16.077	44.567	10.101	70.745
2	Bintan	67.874	4.159	2.442	6.601	74.475	91,14	12.133	29.852	5.603	47.048
3	Natuna	38.486	990	654	1.644	40.130	95,90	4.503	10.851	2.350	17.704
4	Lingga	42.548	1.329	636	1.965	44.513	95,59	4.435	17.745	2.258	24.438
5	Anambas	20.759	338	402	740	21.499	96,56	2.496	6.416	1.019	9.931
6	Batam	657.642	65.531	22.372	87.903	745.545	88,21	96.269	214.388	34.921	345.578
7	Tanjungpinang	92.996	7.172	2.365	9.537	102.533	90,70	17.444	36.123	7.807	61.374
	Kepulauan Riau	1.016.600	85.859	31.317	117.176	1.133.776	89,66	153.357	359.942	63.519	576.818

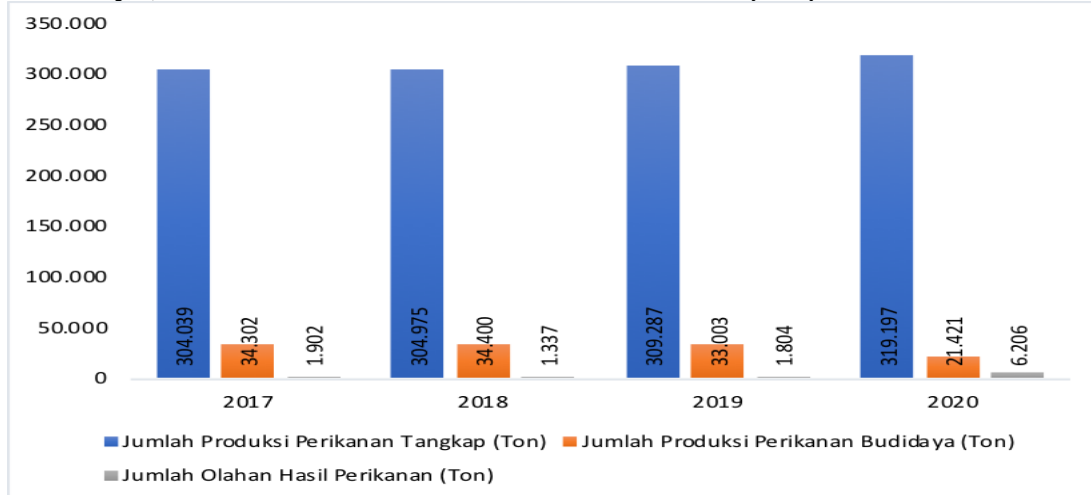
Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

2.6. Potensi Perikanan

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan berbagai macam gugusan pulau-pulau baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, berdasarkan letak geografisnya, Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis di Indonesia dan Internasional serta memiliki sumber daya dalam bidang kemaritiman yang potensial seperti perikanan, industri kemaritiman, perhubungan laut, dan wisata bahari. Meskipun demikian, potensi sumberdaya kemaritiman yang besar ini belum dikelola secara maksimal. Provinsi Kepulauan Riau memiliki lima unsur potensi sumberdaya dasar, diantaranya (1) Potensi sumberdaya perikanan, mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya dan sentra pengolahan hasil perikanan, (2) Potensi Sumberdaya mineral dan migas (seabed) yang terdapat di perairan laut, (3) Potensi transportasi laut dan industri maritim (4) Potensi ekonomi baru, mencakup: jasa lingkungan (tempat bersejarah, kuliner lokal, budaya lokal masyarakat pulau) wisata bahari, sumberdaya hayati non- ikan (seperti rumput laut dan produk turunannya, biodiversity lokal, dll) dan energi terbaruka serta, (5) Potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil strategis sebagai pusat perdagangan, yang mengatur pola interaksi dari masing-masing unsur sumberdaya tersebut (Kajian Pengembangan Ekonomi Maritim Provinsi Kepulauan Riau, 2018).

Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang sangat besar mengingat lebih dari 96 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kawasan perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh wilayah laut dan perairan yang terdiri dari Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budidaya. Dari kawasan tersebut, komoditas unggulan terdiri dari rumput laut (*seaweed*), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Berlimpahnya kekayaan kelautan Provinsi Kepulauan Riau tidak lantas menjadikan sektor perikanan sebagai sektor unggulan daerah. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Namun, penurunan jumlah produksi perikanan budidaya justru menunjukkan tren yang menurun sampai dengan Tahun 2020 meskipun di saat yang bersamaan jumlah olahan hasil perikanan mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2020.

Grafik. 2.1
Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2020



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Selain jumlah produksi perikanan, kinerja perikanan juga dapat dilihat dari nilai ekspor perikanan berdasarkan US Dollar (USD).

Grafik.2.2
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD) Tahun 2015-2020



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, nilai ekspor perikanan meningkat signifikan pada tahun 2018 namun pada tahun 2019-2020 sangat drastis kembali mengalami penurunan. Jika melihat pada grafik diatas, pada tahun 2015 nilai ekspor

perikanan mencapai USD 30,789,629, angka tersebut meningkat ke angka USD 35.493.497 pada tahun 2020.

2.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Untuk itu bagian ini menyajikan karakter ekonomi wilayah Kepulauan Riau melalui tabel kontribusi sektor dan pertumbuhan ekonomi melalui tabel pertumbuhan dan persebaran ekonomi melalui PDRB kabupaten/kota.

Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 38,35-40,76 persen selama periode 2015 hingga 2020. Adapun 5 Sektor ekonomi yang menunjukkan kontribusi terbesar sepanjang tahun 2015-2020 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut.

Tabel 2.9
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2020
Provinsi Kepulauan Riau

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.689,22	3,67	6.018,41	3,70	5.945,61	3,58	5.757,78	3,32	5.717,73	3,14	5.466,78	3,12
B	Pertambangan dan Penggalian	25.417,33	16,38	26.883,19	16,51	25.648,83	15,44	25.995,36	14,98	26.037,64	14,31	24.951,04	14,26
C	Industri Pengolahan	59.498,19	38,35	61.497,86	37,76	62.436,28	37,59	65.018,04	37,47	69.079,81	37,98	71.325,79	40,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.400,52	0,90	1.523,11	0,94	1.621,70	0,98	1.600,28	0,92	1.653,05	0,91	1.580,66	0,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	193,11	0,12	203,26	0,12	222,66	0,13	225,03	0,13	224,90	0,12	218,65	0,12
F	Konstruksi	26.871,95	17,32	28.073,93	17,24	29.042,76	17,49	31.345,83	18,07	33.924,66	18,65	31.752,17	18,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.738,60	7,57	12.858,55	7,90	13.665,03	8,23	14.523,51	8,37	15.408,88	8,47	13.449,61	7,69
H	Transportasi dan Pergudangan	4.161,12	2,68	4.413,81	2,71	4.654,49	2,80	4.696,77	2,71	4.280,15	2,35	2.558,45	1,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.002,93	1,94	3.159,14	1,94	3.536,02	2,13	3.895,60	2,25	4.283,34	2,35	2.526,91	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	3.230,70	2,08	3.469,62	2,13	3.736,38	2,25	4.136,74	2,38	4.626,51	2,54	5.392,39	3,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.105,52	2,65	4.335,03	2,66	4.466,53	2,69	4.724,11	2,72	4.951,67	2,72	4.798,29	2,74
L	Real Estate	2.340,43	1,51	2.443,35	1,50	2.549,27	1,53	2.539,78	1,46	2.542,82	1,40	2.330,97	1,33
M,N	Jasa Perusahaan	7,8	0,01	8,28	0,01	8,88	0,01	9,49	0,01	8,65	0,00	5,03	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.386,49	2,18	3.583,27	2,20	3.750,53	2,26	4.013,02	2,31	4.073,85	2,24	4.398,45	2,51
P	Jasa Pendidikan	2.022,48	1,30	2.201,37	1,35	2.418,96	1,46	2.450,78	1,41	2.461,46	1,35	2.259,58	1,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.405,32	0,91	1.467,87	0,90	1.618,90	0,97	1.668,14	0,96	1.714,54	0,94	1.679,46	0,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	659,67	0,43	712,98	0,44	758,86	0,46	898,50	0,52	906,21	0,50	282,47	0,16
PDRB		155.131,35	100	162.853,04	100	166.081,68	100	173.498,75	100	181.895,86	100	174.976,70	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2.10
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.087,96	3,55	7.729,47	3,58	7.981,53	3,51	8.100,22	3,26	8.223,77	3,07	8.061,29	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	31.400,49	15,73	33.083,03	15,29	32.061,78	14,08	35.148,52	14,13	34.964,44	13,06	28.391,33	11,17
C	Industri Pengolahan	74.966,24	37,56	80.842,35	37,43	84.404,23	37,07	91.792,57	36,89	100.705,38	37,62	105.899,71	41,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.218,91	1,11	2.468,48	1,14	2.689,97	1,18	2.644,61	1,06	2.763,73	1,03	2.603,10	1,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	233,26	0,12	252,52	0,12	282,71	0,12	288,74	0,12	291,29	0,11	281,46	0,11
F	Konstruksi	36.456,42	18,27	38.848,43	17,98	41.409,19	18,19	46.628,25	18,74	52.239,25	19,52	49.317,72	19,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.424,15	7,73	17.716,68	8,20	19.653,11	8,63	22.074,79	8,87	24.314,35	9,08	21.561,95	8,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6.260,55	3,14	6.953,59	3,22	7.471,82	3,28	7.648,63	3,07	7.219,02	2,7	4.111,95	1,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.951,43	1,98	4.346,14	2,01	5.061,47	2,22	5.585,88	2,24	6.208,87	2,32	3.391,34	1,33
J	Informasi dan Komunikasi	3.603,55	1,81	3.969,12	1,84	4.485,79	1,97	5.016,21	2,02	5.603,09	2,09	6.483,54	2,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.301,54	2,66	5.800,41	2,69	6.254,65	2,75	6.781,34	2,73	7.271,53	2,72	6.991,38	2,75
L	Real Estate	2.863,61	1,43	3.131,44	1,45	3.415,73	1,50	3.467,24	1,39	3.563,18	1,33	3.195,11	1,26
M,N	Jasa Perusahaan	9,15	-	10,10	0,01	11,34	-	12,48	0,01	11,38	-	5,82	-
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.627,75	2,32	5.106,64	2,36	5.914,07	2,60	6.385,00	2,57	6.791,47	2,54	7.347,30	2,89
P	Jasa Pendidikan	2.569,03	1,29	2.931,37	1,36	3.415,20	1,50	3.708,43	1,49	3.849,23	1,44	3.896,18	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.737,40	0,87	1.882,15	0,87	2.119,21	0,93	2.228,24	0,9	2.305,97	0,86	2.277,84	0,9
R,S,T,U	Jasa Lainnya	858,96	0,43	980,77	0,45	1.075,07	0,47	1.311,08	0,53	1.332,30	0,5	436,25	0,17
PDRB		199.570,39	100	216.007,66	100	227.706,88	100	248.822,23	100	267.658,24	100	254.253,29	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Mengacu pada kajian *Background Study* Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, dibandingkan dengan nasional maka struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat berciri industri sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.11
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020

No	Sektor	Nasional		Provinsi Kepulauan Riau	
		Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)	Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,70	1,75	3,17	-4,39
B	Pertambangan dan Penggalian	6,44	-1,95	11,17	-4,17
C	Industri Pengolahan	19,88	-2,93	41,65	3,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,16	-2,34	1,02	-4,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	4,94	0,11	-2,78
F	Konstruksi	10,71	-3,26	19,4	-6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	-3,72	8,48	-12,72
H	Transportasi dan Pergudangan	4,47	-15,04	1,62	-40,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,55	-10,22	1,33	-41,01
J	Informasi dan Komunikasi	4,51	10,58	2,55	16,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,51	3,25	2,75	-3,1
L	Real Estate	2,94	2,32	1,26	-8,33
M/N	Jasa Perusahaan	1,91	-5,44	0	-41,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	-0,03	2,89	7,97
P	Jasa Pendidikan	3,56	2,63	1,53	-8,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	11,60	0,9	-2,05
R-U	Jasa Lainnya	1,96	-4,10	0,17	-68,83
PDRB		100	-2,07	100	-3,80

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Dilihat dari persebarannya, maka Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,80 persen pada tahun 2015 dan meningkat 63,97 persen pada tahun 2020. Selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 7,78 persen pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan menjadi 8,22 persen pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,53 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase Kontribusi terhadap Jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Karimun	9.632,11	4,84	10.610,20	4,98	11.618,49	5,14	12.628,78	5,16	13.544,17	5,15	13.310,63	5,28
Bintan	15.481,10	7,78	16.596,40	7,78	17.982,66	7,95	19.597,81	8,01	21.301,01	8,10	20.743,70	8,22
Natuna	17.893,99	9	18.552,33	8,70	19.604,96	8,67	21.123,65	8,64	21.795,5	8,29	18.405,91	7,30
Lingga	3.043,43	1,53	3.284,25	1,54	3.659,73	1,62	3.969,33	1,62	4.274,27	1,62	4.292,43	1,70
Kepulauan Anambas	16.074,02	8,08	16.597,58	7,78	17.256,61	7,63	16.849,27	6,89	17.439,77	6,63	14.453,58	5,73
Batam	120.945,74	60,80	130.553,21	61,22	137.925,34	60,99	151.285,14	61,87	164.490,12	62,55	161.364,18	63,97
Tanjungpinang	15.842,11	7,96	17.065,53	8,00	18.088,95	8	19.078,15	7,80	20.167,98	7,67	19.665,01	7,80
Kepulauan Riau	199.570,39	100	216.007,66	100	227.706,88	100	248.822,23	100	267.658,24	100	254.253,29	100

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi oleh harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu jika dilihat berdasarkan Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengeluarkan inflasi maka Kabupaten Lingga merupakan kota yang memiliki penurunan ekonomi terendah akibat dampak Covid-19 sebesar -0,68 % pada tahun 2020 dan Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan penurunan ekonomi tertinggi yaitu sebesar -7,83. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.13
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Laju Pertumbuhan PDRB
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

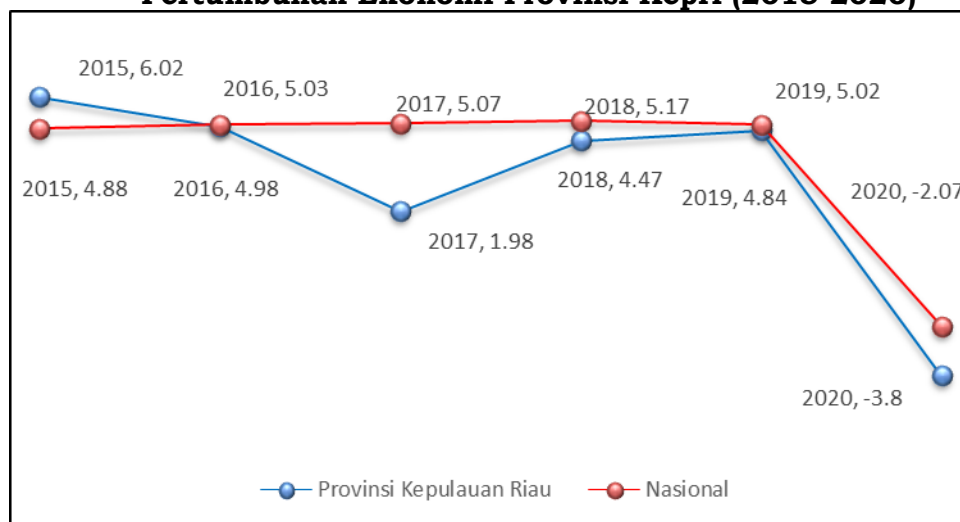
Kabupaten/ Kota	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Karimun	7.678,54	6,54	8.152,07	6,17	8.583,14	5,29	9.016,34	5,05	9.456,92	4,89	9.117,12	-3.59
Bintan	12.013,39	5,16	12.620,12	5,05	13.244,04	4,94	13.886,09	4,85	14.540,07	4,71	13.917,80	-4.28
Natuna	14.115,27	3,90	14.538,93	3,00	14.665,42	0,87	15.036,09	2,53	15.299,36	1,75	14.642,75	-4.29
Lingga	2.429,75	2,38	2.529,11	4,09	2.682,78	6,08	2.790,12	4,00	2.934,66	5,18	2.914,60	-0.68
Kepulauan Anambas	12.784,25	3,03	13.155,24	2,90	13.142,46	-0,1	12.063,35	-8,21	12.047,35	-0,13	11.104,45	-7.83
Batam	90.457,74	6,87	95.369,70	5,43	97.862,56	2,61	102.718,60	4,96	108.804,35	5,92	106.029,65	-2.55
Tanjungpinang	12.568,74	5,70	13.197,81	5,01	13.544,58	2,63	13.979,22	3,21	14.436,94	3,27	13.938,24	-3.45
Kepulauan Riau	155.131,35	6,02	162.853,04	4,98	166.081,68	1,98	173.498,75	4,47	181.895,86	4,84	174.976,7	-3,80

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

2.8. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam enam tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian turun menjadi 4.98 persen di tahun 2016 dan akhirnya mencapai titik terendah sebesar 1.98 persen di tahun 2017. Setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menunjukkan tren positif dengan adanya kenaikan menjadi 4.58 persen di tahun 2018 dan mencapai level kenaikan tertinggi di level 4.89 persen di tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau bertumbuh secara negatif dengan nilai sebesar -3,80. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang sejalan dengan ekonomi nasional berkaitan dengan tingginya peran Covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor industri mengalami pelemahan.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepri (2015-2020)



Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 2.14
Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	6,54	6,17	5,29	5,05	4,89	-4,28
Bintan	5,16	5,05	4,94	4,85	4,71	-4,29
Natuna	3,90	3,00	0,87	2,53	1,75	-4,29
Lingga	2,38	4,09	6,08	4,00	5,18	-0,68
Kepulauan Anambas	4,09	2,90	-0,10	-8,21	-0,13	-7,83
Batam	6,08	5,43	2,61	4,96	5,92	-2,55
Tanjungpinang	5,70	5,01	2,63	3,21	3,27	-3,45
Kepulauan Riau	6,02	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Hampir seluruh sektor perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemik Covid-19. Sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dan Jasa Lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif di atas 40% di tahun 2020 ini. Sementara itu, tercatat hanya 3 sektor yang bertumbuh secara positif di tahun 2020 yaitu pada sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,78	5,79	-1,21	-3,16	-0,7	-4,39
B	Pertambangan dan Penggalan	9,22	5,77	-4,59	1,35	0,16	-4,17
C	Industri Pengolahan	5,61	3,36	1,53	4,14	6,25	3,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,6	8,75	6,47	-1,32	3,3	-4,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,85	5,26	9,54	1,07	-0,06	-2,78
F	Konstruksi	3,53	4,47	3,45	7,93	8,23	-6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	9,54	6,27	6,28	6,1	-12,72
H	Transportasi dan Pergudangan	5,62	6,07	5,45	0,91	-8,87	-40,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,63	5,2	11,93	10,17	9,95	-41,01
J	Informasi dan Komunikasi	5	7,4	7,69	10,71	11,84	16,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,47	5,59	3,03	5,77	4,82	-3,1
L	Real Estate	4,24	4,4	4,33	-0,37	0,12	-8,33
M,N	Jasa Perusahaan	2,77	6,18	7,25	6,84	-8,82	-41,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,5	5,81	4,67	7	1,52	7,97
P	Jasa Pendidikan	6,15	8,85	9,88	1,32	0,44	-8,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	4,45	10,29	3,04	2,78	-2,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,55	8,08	6,43	18,4	0,86	-68,83
PDRB		6,02	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

BAB III

PROFIL KEMISKINAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

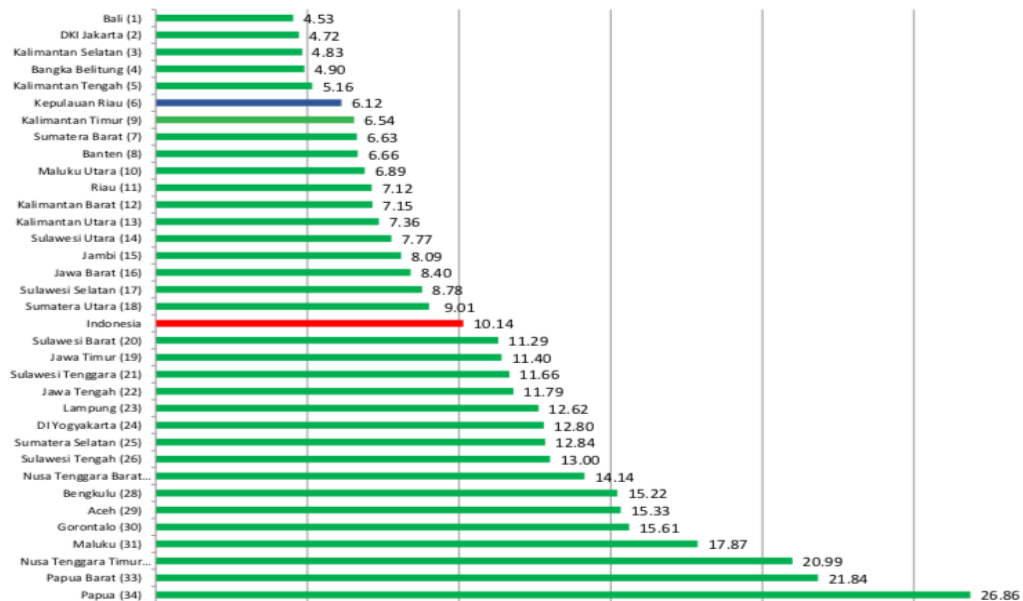
3.1. Kondisi Kemiskinan Daerah

3.1.1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dalam terminologi umum, hal tersebut didefinisikan sebagai kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut umumnya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita perhari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Peningkatan maupun penurunan angka kemiskinan sangat bergantung pada program-program pengentasan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penduduk miskin adalah penduduk yang sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya, terutama dengan perubahan harga pada bahan makanan. Oleh karena itu, bantuan pemerintah berupa bahan makanan pokok mampu menekan angka kemiskinan. Namun demikian, bantuan berupa bantuan pangan tidak serta merta mampu mengentaskan kemiskinan, perlu bantuan dalam bentuk lain sehingga penduduk miskin dapat sepenuhnya keluar dari kemiskinan. Adapun bantuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan diharapkan juga mampu menanggulangi kemiskinan. Sehingga dalam jangka panjang, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan dapat hidup mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar 6,12%, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 10,14%, dan berada pada urutan ke 6 dari semua Provinsi yang ada di Indonesia sebagaimana gambar berikut:

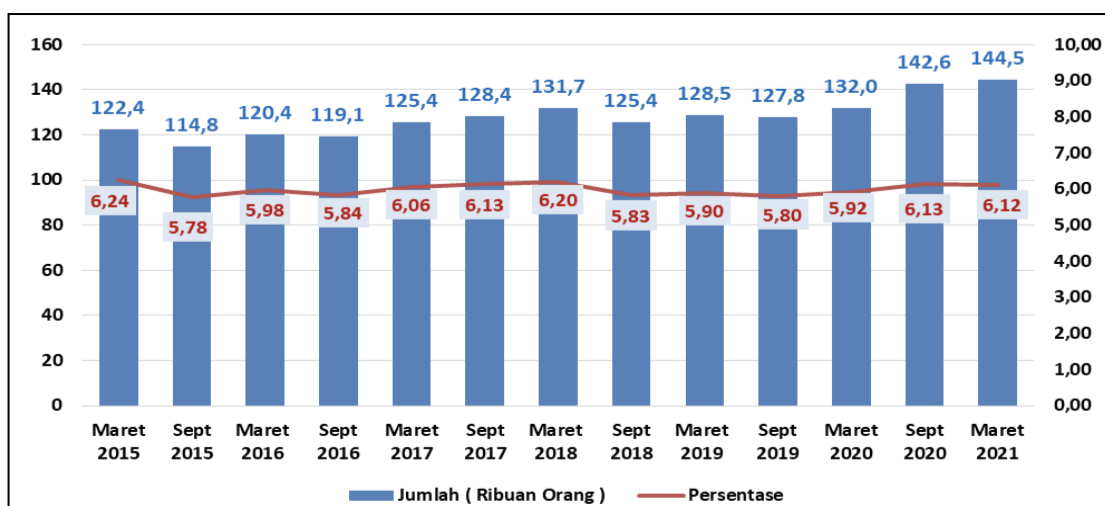
Grafik 3.1
Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia Menurut Provinsi 2021



Sumber : BPS

Secara umum, pada periode Maret 2015–Maret 2021 tingkat kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun Maret 2015-Maret 2021 ditunjukkan oleh gambar berikut :

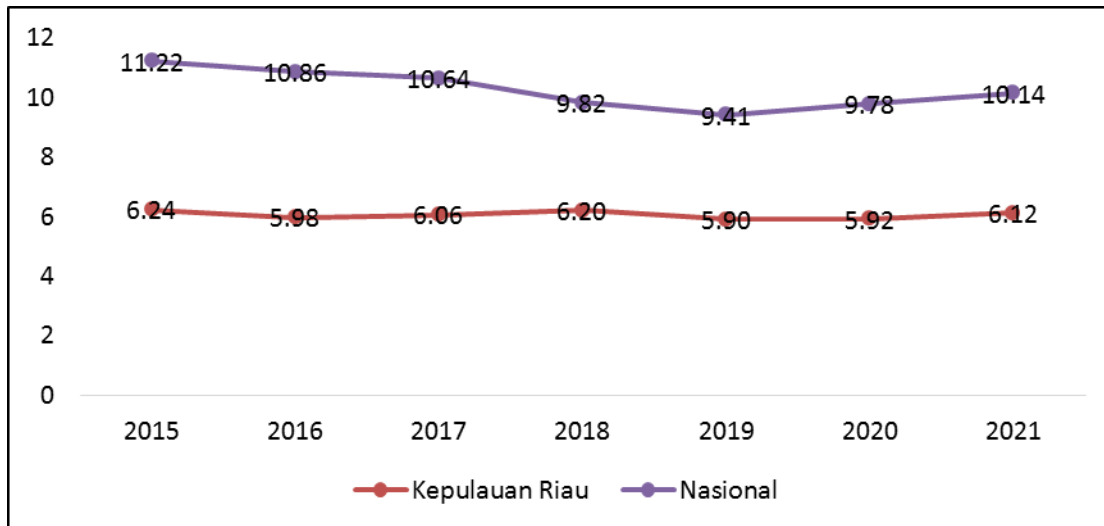
Grafik 3.2.
Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2021

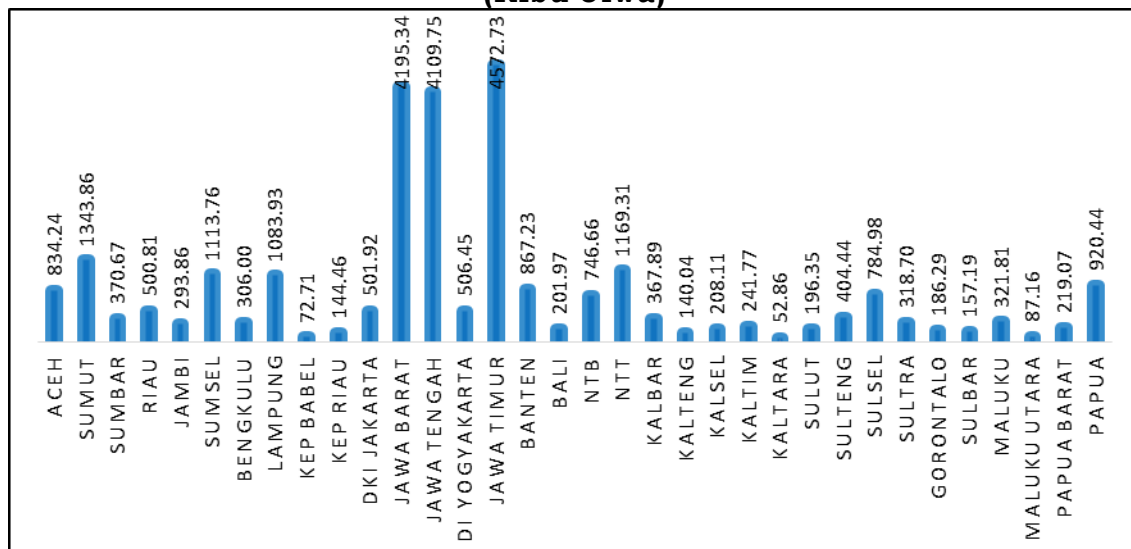
Penduduk miskin di Kepulauan Riau selama kurun waktu 2015- 2021 terus mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:

Grafik 3.3.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Nasional Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2021

Grafik 3.4.
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia menurut Provinsi tahun 2021 (Ribuan Jiwa)

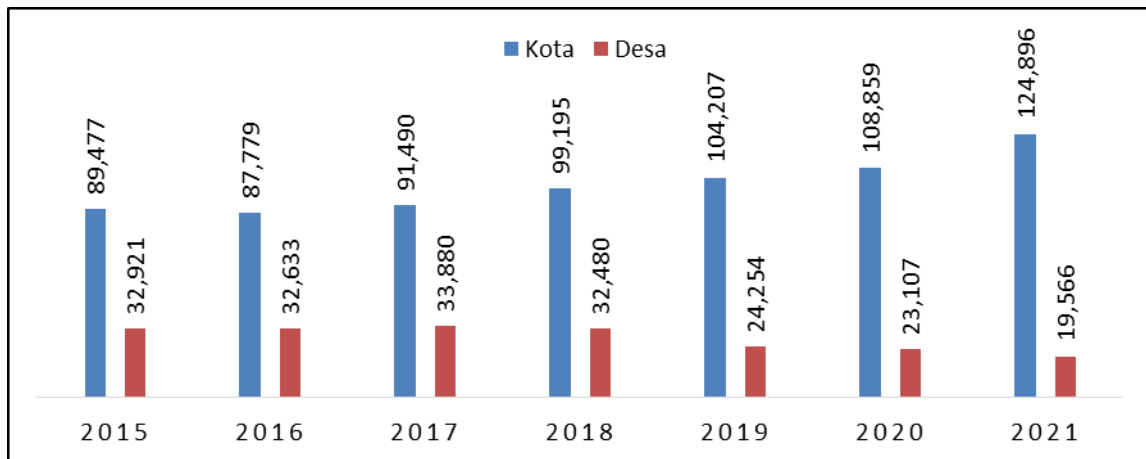


Sumber : BPS, 2021

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kepulauan Riau merupakan permasalahan dan prioritas yang penting untuk segera

diselesaikan. Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, pada periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah dari 108.859 orang menjadi 124.896 orang, sedangkan daerah perdesaan berkurang dari 23.107 orang menjadi 19.566 orang, sebagaimana gambar berikut:

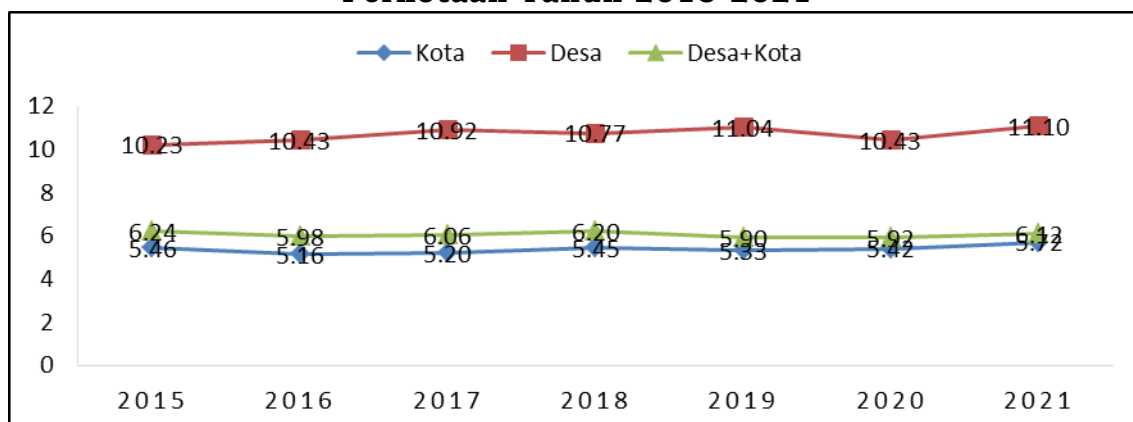
Grafik 3.5.
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan tahun 2015-2021



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,42 persen menjadi 5,72 persen. Sementara itu di perdesaan terjadi kenaikan dari 10,43 persen menjadi 11,10 persen pada periode Maret 2020-Maret 2021, sebagaimana gambar berikut:

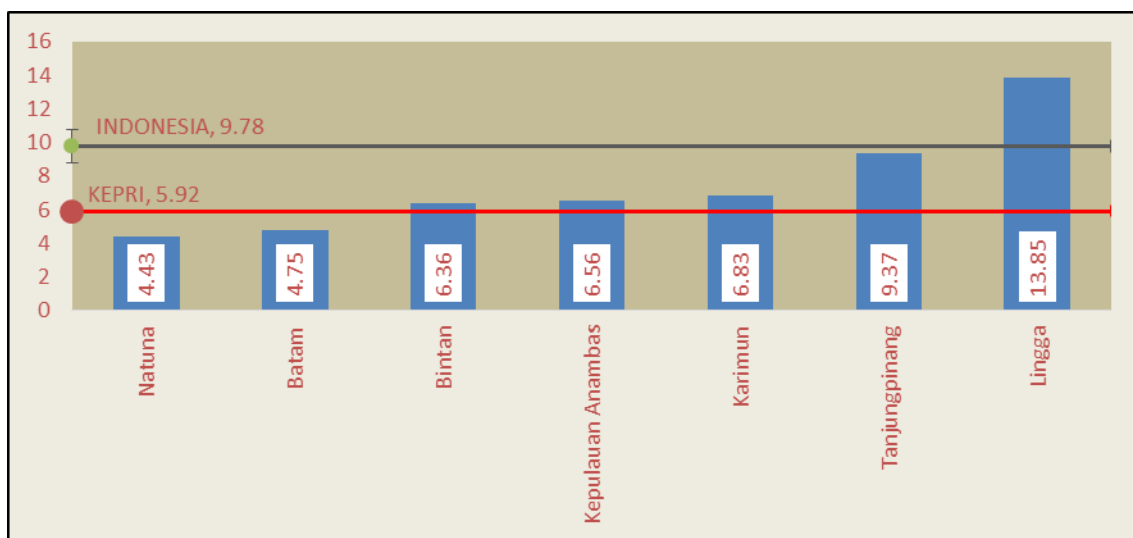
Grafik 3.6.
Persentase Penduduk Miskin Kepri menurut Wilayah Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, 2021.

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota sampai dengan tahun 2020, terdapat 6 Kabupaten di Kepulauan Riau dengan angka kenaikan angka kemiskinan di bawah nasional dan dilihat dari garis linear Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan persentase tertinggi yakni 13,85 persen sedangkan terendah adalah Kabupaten Natuna dengan angka 4,43 persen juga berada dibawah provinsi kepri, sebagaimana gambar berikut:

Grafik 3.7.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2020



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Jika berdasarkan sebaran data jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) Provinsi Kepri 2017-2020

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau		125,37	131,68	128,46	131,97
Tanjungpinang		19,19	19,30	19,05	19,98
Bintan		9,37	10,42	10,14	10,21
Batam		61,16	67,41	66,21	67,06
Karimun		16,94	15,93	15,36	15,99
Lingga		12,35	12,13	11,56	12,45
Natuna		3,53	3,60	3,43	3,47
Kepulauan Anambas		2,84	2,90	2,72	2,80

Sumber : RPJMD Provinsi Kepri, 2021-2026

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

3.1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Upaya penanggulan kemiskinan tentu tidak hanya berfokus pada berapa jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Lebih daripada itu, penanggulangan kemiskinan harus meliputi beberapa aspek, seperti seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari Garis Kemiskinan serta distribusi pengeluaran antara penduduk miskin.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, ada tiga ukuran kemiskinan yang bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan di suatu daerah. Ukuran tersebut adalah *poverty incidence* (P0) merupakan ukuran yang menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Angka ini memiliki kelemahan karena tidak menggambarkan seberapa parah kemiskinan yang terjadi di suatu daerah. *Poverty Gap* (P1), mengukur seberapa jauh jurang/Gap pendapatan si miskin

dari Garis Kemiskinan, akan tetapi tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin serta tidak terdeteksi distribusi antar penduduk miskin yang timpang. Ukuran terakhir adalah *poverty severity* (P2), mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Kelemahan dari P2 adalah tidak menggambarkan jumlah penduduk miskin.

Dalam analisis kemiskinan dan pengambilan kebijakan dalam hal penanggulangan kemiskinan, ketiga ukuran kemiskinan ini harus disertakan. Dengan mempertimbangkan ketiga ukuran tersebut, diharapkan kebijakan yang akan diambil dapat menyentuh seluruh aspek sehingga penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.2.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia
Menurut Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2021 (%)

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2020	1,13	2,21	1,61
September 2020	1,26	2,39	1,75
Maret 2021	1,29	2,27	1,71
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2020	0,25	0,55	0,38
September 2020	0,31	0,68	0,47
Maret 2021	0,31	0,57	0,42

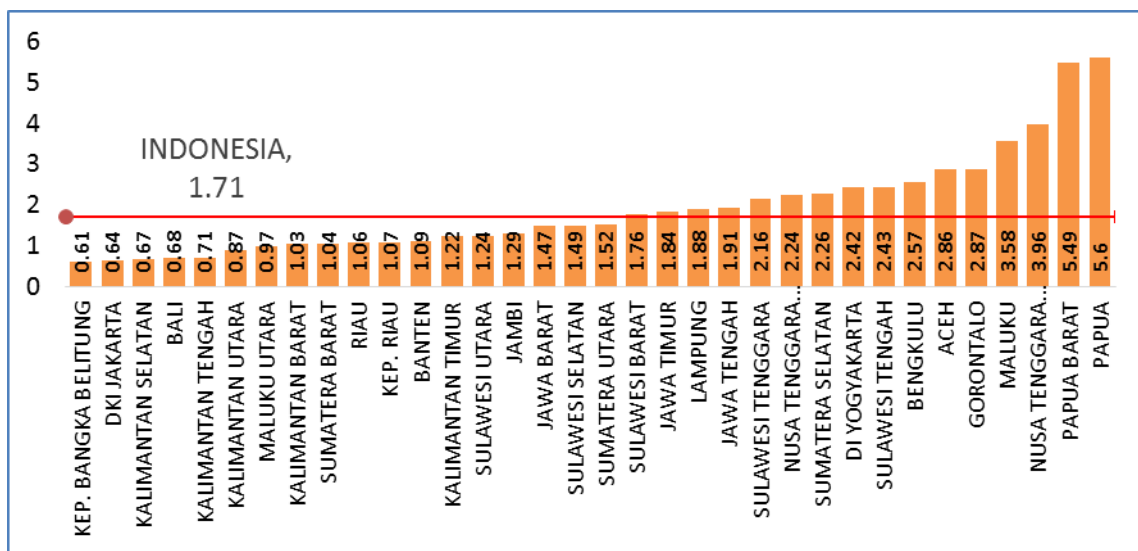
Sumber : BPS, 2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode September 2020–Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami

penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 1,71, turun dibandingkan September 2020 yang sebesar 1,75. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,47 menjadi 0,42.

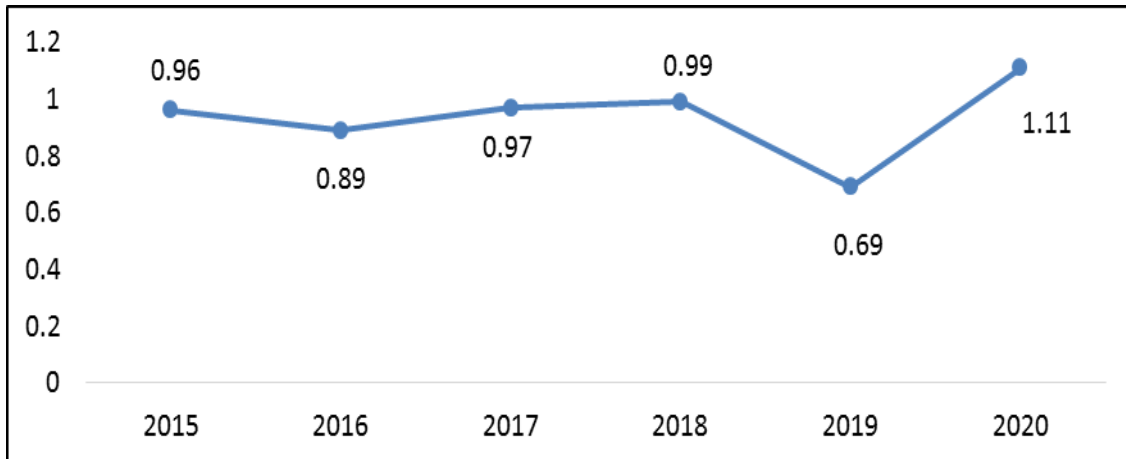
Grafik 3.8
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi-se
Indonesia Tahun 2015-2021 (%)



Sumber : BPS, olahan 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (P1) terukur sebesar 0,86. Pada tahun 2016 kondisi menurun sebesar 0,89 dan tren kembali naik pada tahun 2017 dengan nilai P1 sebesar 0,97 dan 2018 sebesar 0,99. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan tren menurun pada tahun 2019 adalah 0,69 dan naik kembali di tahun 2020 sebesar 1,11. Namun demikian, di mengalami penurunan dalam yang mencapai angka 1,11 ini disebabkan dampak dari Covid-19 yang ikut mempengaruhi penurunan dari indeks ini. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut :

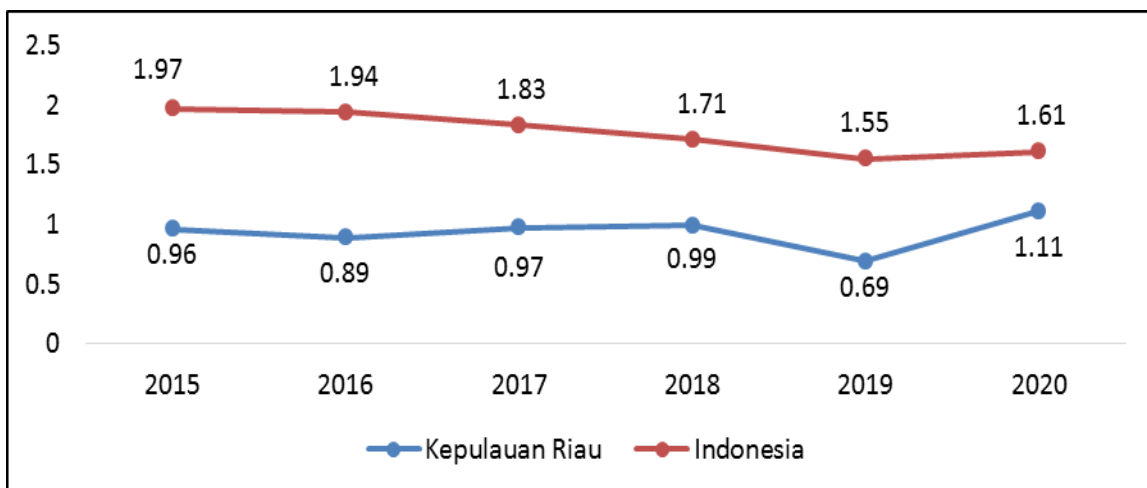
Grafik 3.9.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Provinsi Kepri Tahun 2015 – 2020



Sumber : BPS, 2021.

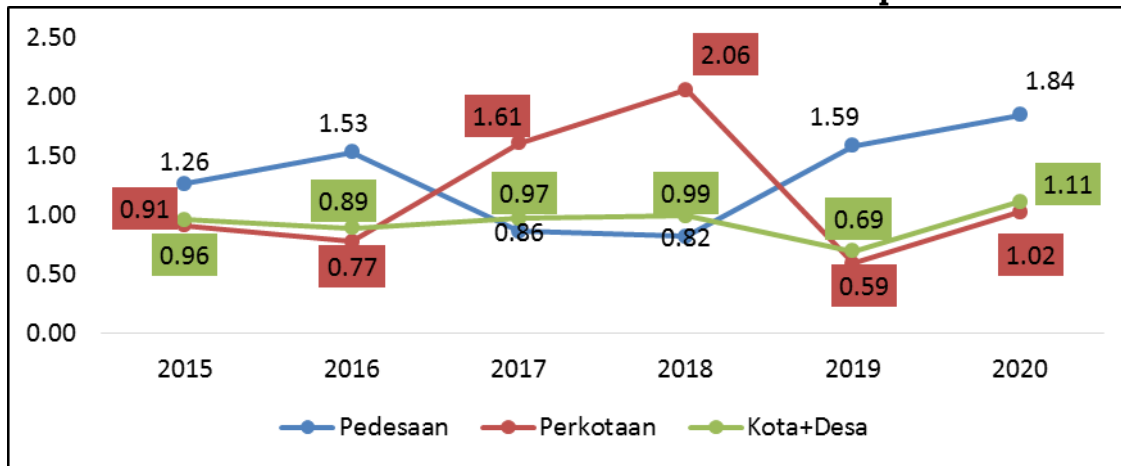
Apabila dianalisis dari sisi relevansi, rata-rata penurunan kemiskinan di Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) lebih kecil dibandingkan Nasional (1,61), sebagaimana gambar berikut:

Grafik 3.10
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2021 (%)



Sumber : BPS, 2021.

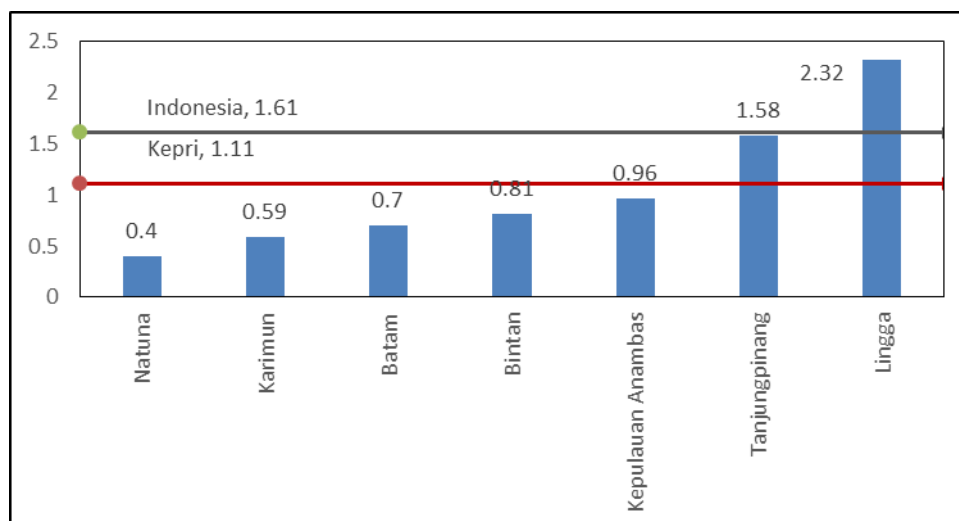
Grafik 3.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepri menurut Wilayah
Perdesaan dan Perkotaan Periode Maret 2015 – September 2021



Sumber : BPS, 2021

Indeks tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan. Sementara itu, jika melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan per Maret 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota maka Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks tertinggi dan yang terendah di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Grafik berikut:

Grafik 3.12
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota
Dibandingkan dengan Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2020

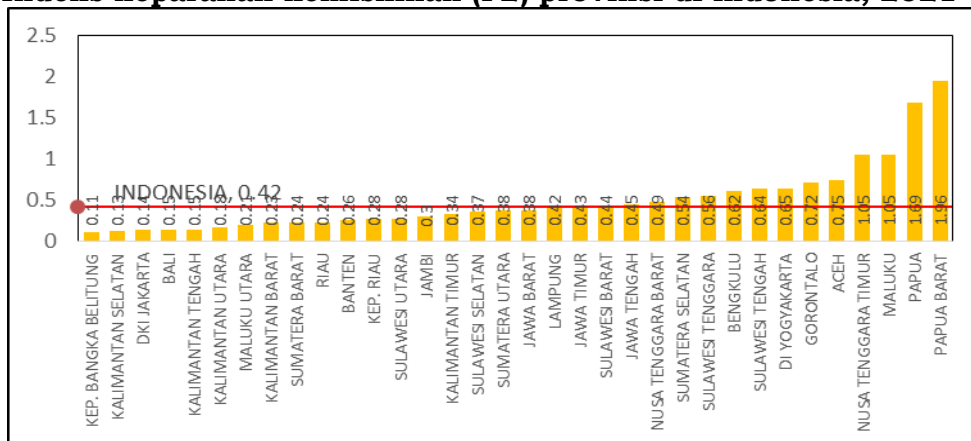


Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

3.1.3. Indeks Keparahan Kemiskinan Kepulauan Riau

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar 0,27 berada di bawah rata-rata Nasional sebesar 0,31, sebagaimana gambar berikut:

Grafik 3.13
Indeks keparahan kemiskinan (P2) provinsi di Indonesia, 2021



Sumber : BPS, 2021.

Kondisi ini menjelaskan bahwa ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk miskin di Kepulauan Riau relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata capaian Nasional.

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau berada pada urutan ke-4 (empat) terendah, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.3
Indeks Keparahan Kemiskinan Kepulauan Riau, Relatif dengan Provinsi Lain di Sumatera

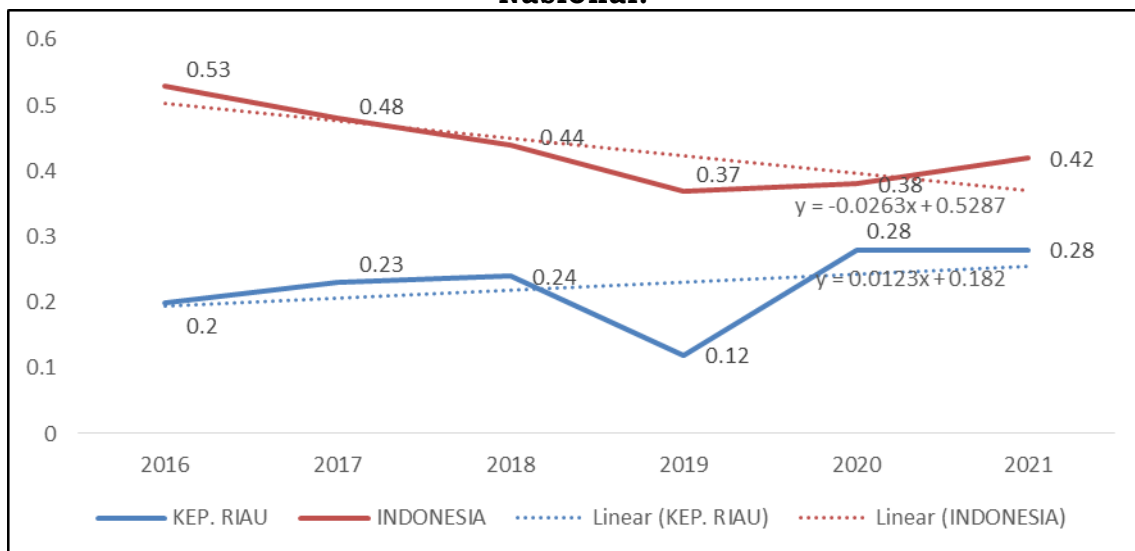
No.	PROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021
1	KEP. BANGKA BELITUNG	0.1	0.13	0.11
2	SUMATERA BARAT	0.21	0.2	0.24
3	RIAU	0.27	0.28	0.24
4	KEP. RIAU	0.12	0.28	0.28
5	JAMBI	0.3	0.25	0.3
6	SUMATERA UTARA	0.31	0.39	0.38
7	LAMPUNG	0.44	0.41	0.42
8	SUMATERA SELATAN	0.51	0.48	0.54
9	BENGKULU	0.58	0.56	0.62
10	ACEH	0.66	0.71	0.75
	INDONESIA	0.37	0.38	0.42

Sumber : BPS, 2021.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi yang relative membaik, yaitu

pada kurun 2017-2019 dimana terdapat tren penurunan dari 0,21 menjadi 0,18 lalu turun lagi menjadi 0,1 namun turun pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,25 dan seterusnya naik lagi pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,27 sebagaimana gambar berikut:

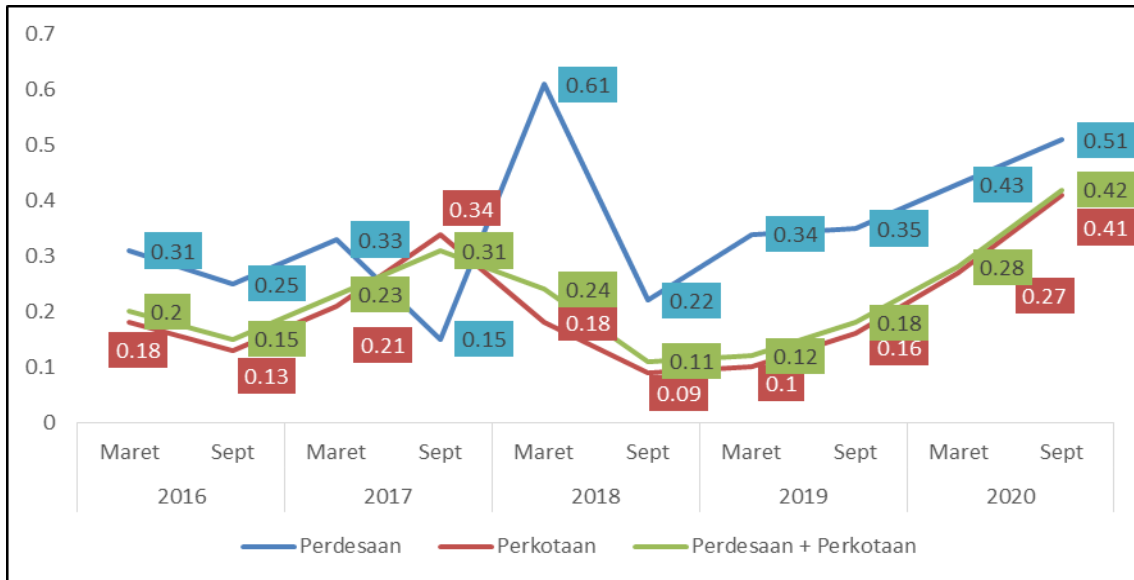
Grafik 3.14
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepri, dibandingkan Nasional.



Sumber : BPS, 2021.

Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan Indeks Keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau memiliki pola yang hampir mirip atau sejalan terhadap perkembangan nasional. Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) periode September 2020 di daerah perdesaan sebesar 0,51 lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan 0.42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di pedesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan, sebagaimana gambar berikut:

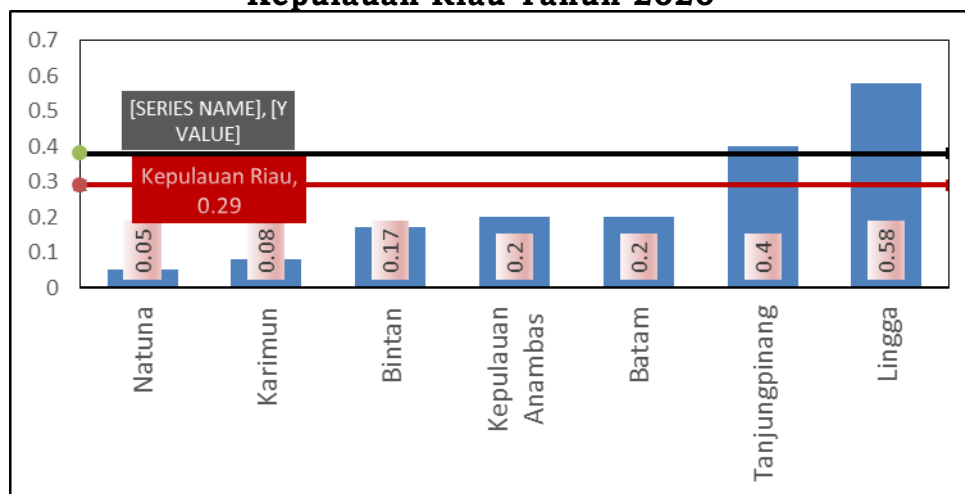
Grafik 3.15
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurut Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Periode Maret 2016-September 2020



Sumber : BPS, 2021.

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2020 menunjukkan bahwa Kabupaten Lingga memiliki indeks tertinggi (0,58) dan Kabupaten Natuna terendah (0,05) sebagaimana gambar berikut:

Grafik 3.16
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Wilayah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau Tahun 2020



Sumber : BPS, 2021.

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 (Maret) sebagai berikut:

1. Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu daerah-daerah yang tingkat Keparahan Kemiskinannya berada di atas level provinsi maupun nasional adalah Tanjungpinang dan Lingga;
2. Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional namun dengan jarak yang relative mendekati yaitu Batam, Anambas dan Bintan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional dengan jarak yang relatif jauh yaitu Natuna dan Karimun;

3.1.4. Analisis Keterkaitan Kondisi Kemiskinan (P0, P1, P2)

Perkembangan kemiskinan di Kepulauan Riau selama periode 2016-2020 ditunjukkan dengan kondisi yang fluktuatif, dimana terdapat tren kenaikan sampai pada periode awal tahun 2018 yang disusul kemudian dengan tren penurunan sampai periode akhir tahun 2019. Sayangnya, dikarenakan dampak pandemi COVID-19 terjadi perubahan yang sangat drastis pada jumlah dan persentase kemiskinan Kepri sejak periode awal 2020 sehingga awal 2021. Apabila dibandingkan dengan kondisi di provinsi lainnya, secara relatif tingkat kemiskinan di Provinsi Kepri masih terhitung lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan posisi paling rendah ke-6 dari segi persentase penduduk miskin, atau setidaknya lebih baik dibandingkan dengan 28 provinsi yang lain.

Di sisi lain masih terdapat indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang perlu diperhatikan dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan di Provinsi Kepri. Dari segi Indeks Kedalaman Kemiskinan, masih terdapat dua daerah Kabupaten/Kota yang berada di bawah posisi Indeks Kemiskinan Provinsi yaitu Kabupaten Lingga dan Tanjungpinang, yang berarti keadaan penduduk miskin di dua daerah tersebut dalam upaya mendekati atau keluar dari garis kemiskinan

relatif lebih berat dibandingkan keadaan penduduk miskin kabupaten/kota lainnya di Kepri. Realita yang sama juga diperkuat dengan indikator Indeks Keparahannya Kemiskinan di dua daerah tersebut. Namun secara umum, dapat dilihat tren perubahan Indeks Kedalaman dan Keparahannya di Provinsi Kepri di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, menunjukkan pentingnya kebijakan penanganan kemiskinan mulai memperhatikan dimensi pedesaan. Mandat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh RPJMD 2016-2021 menerangkan pula bahwa penanganan masalah kemiskinan merupakan satu prioritas yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana diperlihatkan di dalam tabel berikut

Tabel 3.4 Analisa Keterkaitan Kondisi Kemiskinan di Kepri

Indikator	Perspektif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Penduduk Miskin (P0)	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih rendah dari nasional pada tahun 2021. • Dari 7 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Lingga yang berada di atas persentase tingkat kemiskinan nasional. 	Kecenderungan meningkat dalam kurun 2016-2021 diperburuk dengan dampak pandemi COVID-19 pada awal 2020 hingga 2021.	Memerlukan strategi dan fokus yang lebih kuat untuk memperkuat/mempercepat langkah-langkah penurunan.	Tingkat perubahan persentase kemiskinan pasca pandemic lebih tinggi dari tren sebelum pandemic.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung fluktuatif, bersamaan dengan gambaran perubahan persentase penduduk miskin (P0) dalam kurun 2016-2021. Namun perubahan kenaikan maupun penurunan P1 dan P2 tidak berpengaruh langsung terhadap persentase penduduk miskin yang fluktuatif.
Jumlah Penduduk Miskin	• Terendah kelima pada awal 2021 (periode Maret)	Tren kenaikan jumlah penduduk miskin relatif konstan.	Menunjukkan pentingnya kebijakan dan program yang fokus untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.	N/A	
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berada di bawah nasional. • Urutan ke-11 terendah dari 34 provinsi. • Dari 7 kabupaten/kota, dua daerah Lingga dan Tanjungpinang berada di atas provinsi. 	Tren momentum penurunan yang terjaga sampai 2019 berubah naik secara drastis akibat pandemi COVID-19.	Kondisi tren penurunan menunjukkan adanya perbaikan, yang dapat diperberat oleh pandemi COVID-19.	Rata-rata perubahan kenaikan masih lebih rendah dibanding nasional.	
Indeks Keparahan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih berada di bawah nasional • Urutan ke-18 terendah dari 34 provinsi. • Dari 7 kabupaten/kota, dua daerah Lingga dan Tanjungpinang berada di atas provinsi. 	Ada tren penurunan sampai 2019 namun berubah drastis akibat pandemi COVID-19.	Kondisi tren penurunan menunjukkan adanya perbaikan, yang kemudian berubah drastic akibat pandemi COVID-19.	Rata-rata perubahan kenaikan masih lebih rendah dibanding nasional.	

Sumber : Olahan Tahun 2021

3.2. Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau

Selama periode Maret 2020-September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,46 persen, yaitu dari Rp 614.727,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 617.532,- per kapita per bulan di bulan September 2020. Sementara pada periode September 2019-September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,57 persen, yaitu dari Rp 602.038,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 617.532,- per kapita per bulan pada September 2020.

Pada daerah perkotaan Garis Kemiskinan September 2020 sebesar Rp.619.461,- per kapita per bulan atau naik 2,35% dari kondisi September 2019 (Rp.605.210,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan September 2020 juga mengalami peningkatan sebesar 1,38% menjadi sebesar Rp.597.899,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2019 yaitu sebesar Rp.577.259,- per kapita per bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Terlihat pada Tabel berikut bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2020 sebesar 66,52 persen.

Dengan memperhatikan komponen garis kemiskinan, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan, terlihat bahwa peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan adalah :

1. Komoditi Makanan

Pada September 2020, komoditi makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada Garis Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter, yaitu sebesar 14,05 persen, lebih besar dari kontribusi komoditi beras yang sebesar 12,70 persen. Cabe merah memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap GK, yaitu 5,69 persen. Sementara itu untuk wilayah perdesaan, beras dan rokok kretek filter memberikan kontribusi terbesar terhadap GK, masing-masing sebesar 17,95 persen dan 17,77 persen.

2. Komoditi Bukan Makanan

Sedangkan Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, listrik, dan bensin. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

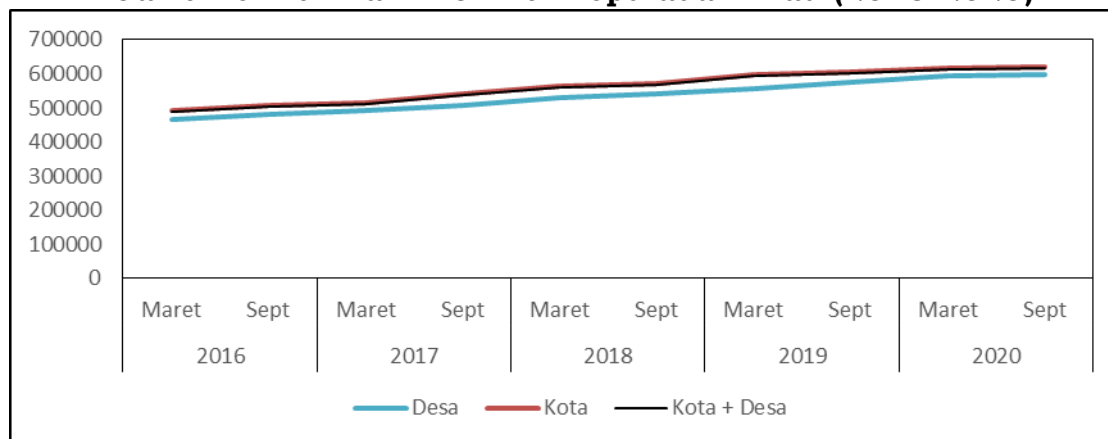
Tabel 3.5
Daftar Komoditi Makanan dan Andilnya terhadap Garis Kemiskinan

Perkotaan	Persentase	Perdesaan	Persentase
Daftar Komoditas :		Daftar Komoditas :	
Makanan:	65,89	Makanan:	74,30
Rokok kretek filter	14,05	Beras	17,95
Beras	12,70	Rokok kretek filter	17,77
Cabe merah	5,69	Gula pasir	3,64
Daging ayam ras	3,39	Telur ayam ras	3,41
Telur ayam ras	3,21	Daging sapi	3,39
Tongkol/ tuna/ cakalang	2,53	Kue basah	3,16
Kue basah	2,27	Tongkol/ tuna/ cakalang	3,14
Cabe rawit	1,81	Cabe rawit	2,71
Kerupuk mentah	1,58	Bawang merah	2,36
Gula pasir	1,49	Mie instan	2,15
Mie instan	1,42	Daging ayam ras	1,53
Kembung	1,32	Tepung terigu	1,31
Lainnya	14,43	Lainnya	11,80
Bukan Makanan:	34,11	Bukan Makanan:	25,70
Perumahan	10,04	Perumahan	8,51
Listrik	5,37	Listrik	3,38
Bensin	4,00	Bensin	2,31
Pendidikan	2,32	Pendidikan	2,31
Air	1,56	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,22
Perlengkapan mandi	1,37	Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,07
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	1,35	Perlengkapan mandi	1,05
Lainnya	8,09	Lainnya	5,84

Sumber : BPS, 2021.

Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) terus meningkat, sebagaimana gambar berikut:

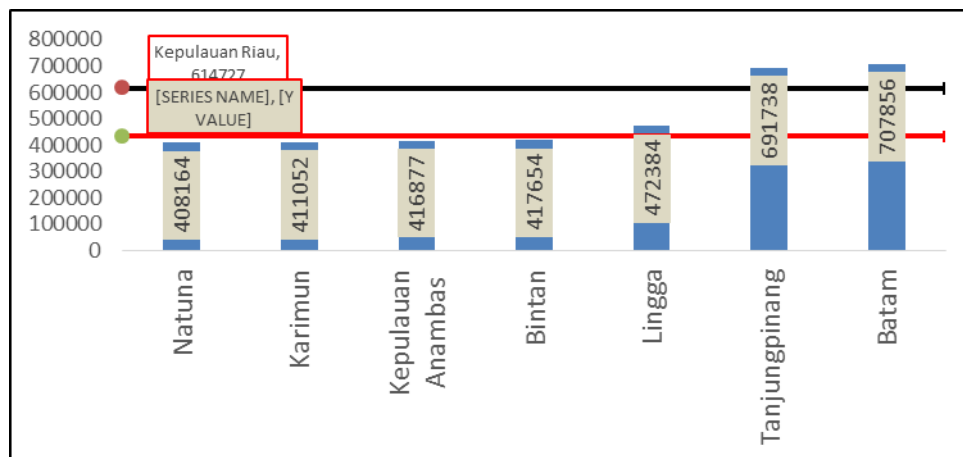
Grafik 3.17
Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau (2016-2020)



Sumber : BPS, 2021.

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, sebagaimana gambar berikut:

Grafik 3.18
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)



Sumber : BPS, 2021.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa garis kemiskinan paling rendah berada di Kabupaten Natuna sebesar Rp. 408.164,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi berada di Kota Batam sebesar Rp. 707.856,- per kapita per bulan. Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Kepulauan Riau tahun 2020 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 4 kabupaten, yaitu Bintan, Anambas, Karimun dan Natuna;
2. Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan nasional dan di bawah garis kemiskinan provinsi yaitu Kabupaten Lingga;
3. Garis Kemiskinan Tinggi, adalah daerah yang berada di atas garis kemiskinan nasional dan garis kemiskinan provinsi, yaitu Kota Batam dan Tanjungpinang.

BAB IV

DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH

4.1. Dimensi Pendidikan

4.1.1. Permasalahan Dimensi Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Menurut Ihsan (2011) tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan (Suryawati, 2005).

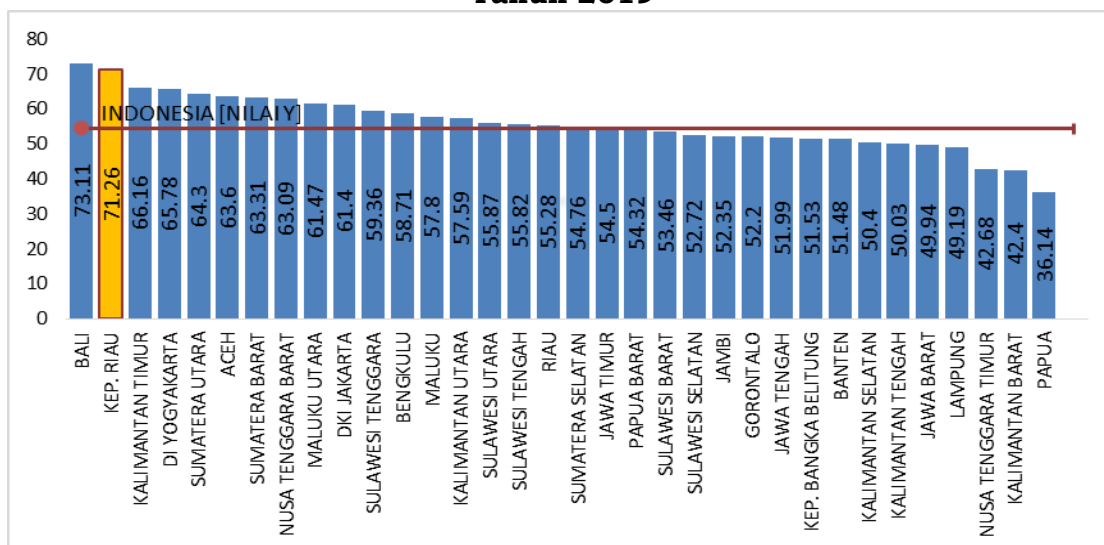
Pendidikan membantu manusia dalam menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaan yang ada dalam dirinya. Potensi kemanusiaan merupakan benih untuk mengembangkan seseorang menjadi manusia seutuhnya (Nurihsan, 2007).

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yang bervariasi antara golongan umur maupun jenis kelamin. Ketepatan waktu bersekolah atau bersekolah sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah pada jenjangnya dapat ditunjukkan oleh Indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang

bersangkutan. Di Indonesia, semakin bertambah usia semakin besar peluangnya untuk menjalani pendidikan sesuai dengan jenjang yang seharusnya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya APM di Indonesia seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Pada tahun 2019, APM berada pada 54,35 persen di tingkat SMA/Sederajat.

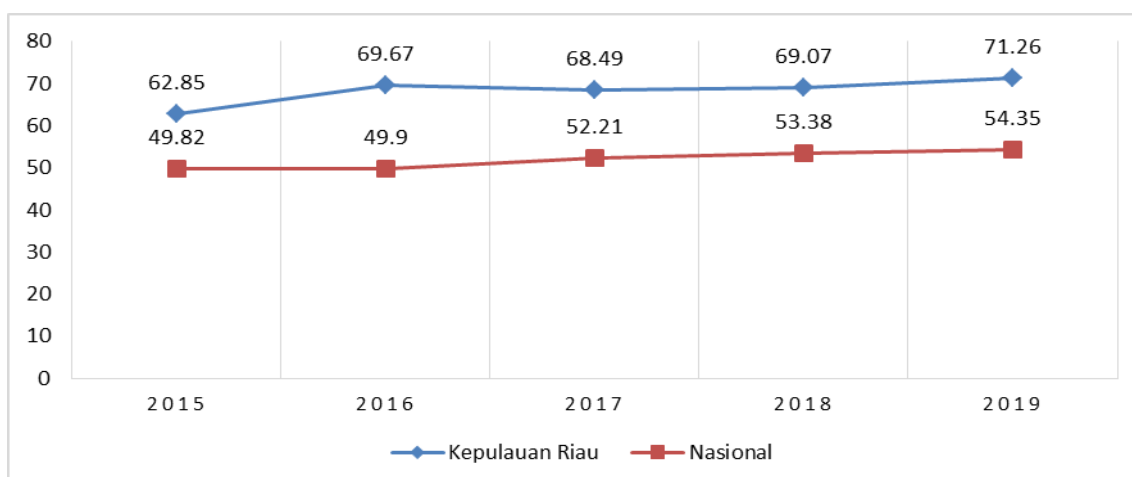
Grafik. 4.1.
Posisi Relatif APM Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2019



Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya jika dilihat pada data berikut trend APM Provinsi Kepri berada di atas Nasional dengan angka yang terus meningkat mulai dari tahun 2015 pada persentase 62.85% hingga 2019 sampai pada angka 71.26%.

Grafik. 4.2.
Trend APM Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS, 2021

Perkembangan trend APM tersebut tentu akan dinilai berdasarkan kabupaten kota di Provinsi Kepri dan pada tabel berikut gambaran perkembangan APM Provinsi Kepri berdasarkan Kabupaten/Kota mulai tahun 2015-2020.

Tabel.4.1.
Perkembangan APM Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	60.66	71.7	68.85	70.29	71.29	82.59
Bintan	69.27	77.64	69.25	77.16	80.02	73.31
Natuna	97.65	76.71	65.22	66.72	71.72	65.14
Lingga	58.88	74.09	59.99	67.84	75.78	65.81
Kepulauan Anambas	57.73	52.86	61.4	61.76	76.55	64.11
Batam	69.61	73.84	84.42	83.59	71.01	78.88
Tanjungpinang	84.34	92.28	80.94	70.66	71.21	80.1

Sumber : BPS Kepri, 2021

Dari beberapa data yang telah digambarkan diatas maka dapat dipetakan berdasarkan hubungannya mulai dari posisi relatif, antar waktu, efektivitas dan relevansi hingga dapat dianalisa keterkaitannya sebagai berikut :

Tabel. 4.2.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi APM Provinsi Kepri

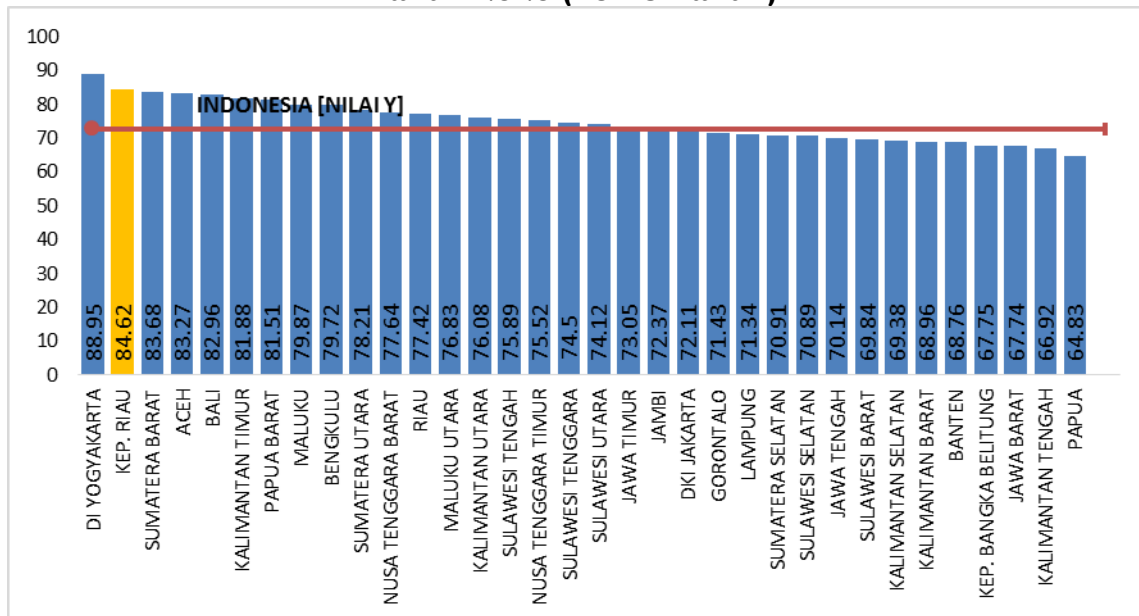
Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Angka Partisipasi Murni (APM)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepri menunjukan urutan kedua setelah Bali dari 34 Provinsi di Indonesia. - Relatif pada 71,26 dan berada pada garis diatas nasional yakni 54,35. 	<ul style="list-style-type: none"> - APM di provinsi Kepri mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2015 pada angka 62,85 hingga tahun 2020 mencapai angka 71,26. - Covid 	<ul style="list-style-type: none"> Kepri memiliki penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya pada urutan kedua dari semua provinsi yang ada di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat perubahan persentase stabil meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> Hal ini menunjukkan diperlikannya kebijakan peningkatan infrastruktur sekolah dan kualitas/kuantitas guru.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau sama seperti APM jika dibandingkan dari seluruh Provinsi menduduki urutan kedua namun kali ini setelah Provinsi DI.Yogyakarta yang dapat dilihat pada grafik berikut :

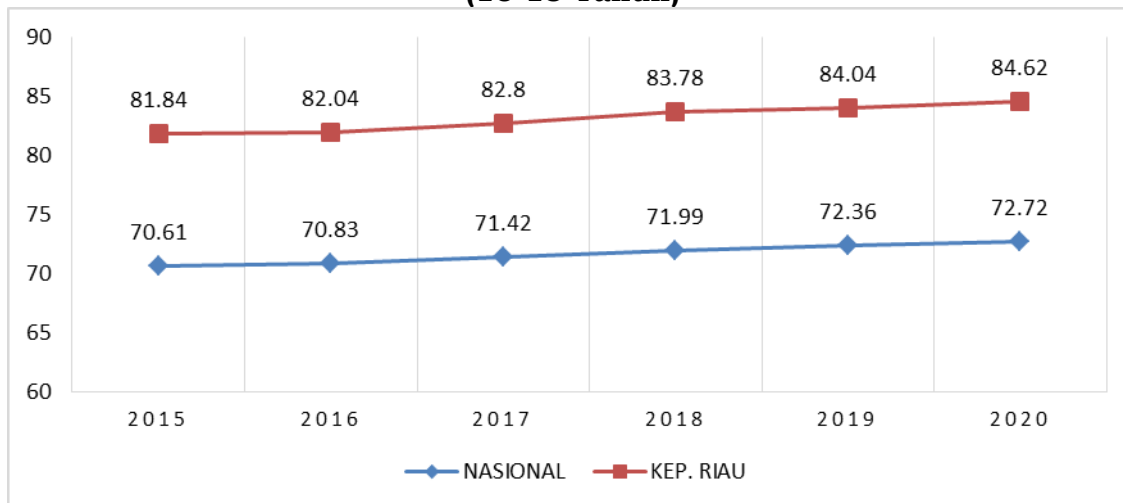
Grafik. 4.3.
Posisi Relatif APS Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia
Tahun 2020 (16-18 Tahun)



Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya pada grafik dibawah ini juga dibandingkan data perkembangan trend pada APS di Provinsi Kepri terhadap Nasional mulai tahun 2015-2020. Kepulauan Riau tetap berada di atas angka Nasional yang artinya perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase menunjukkan banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah yakni Kepri di bandingkan Rata-rata Nasional.

Grafik. 4.4.
Trend APS Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020
(16-18 Tahun)



Sumber : BPS, 2021.

Kemudian berdasarkan perkembangan di tiap kabupaten/kota akan digambarkan kondisinya mulai tahun 2015-2019 pada table berikut :

Tabel. 4.3.
Perkembangan APS Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Karimun	59.61	79.58	72.78	77.03	77.82
Bintan	83.63	88.27	89.25	92.13	90.8
Natuna	83.26	86.19	76.57	75.12	76.54
Lingga	77.18	80.29	78.92	77.6	79.21
Kepulauan Anambas	78.87	90.08	82.42	86.62	87.86
Batam	89.76	80.21	84.27	83.68	81.46
Tanjungpinang	81.89	84.21	86.94	91.95	90.91

Sumber : BPS Kepri, 2021

Sama hal nya dengan APM, APS juga merupakan indikator yang mempengaruhi dimensi pendidikan dan merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah, keterkaitannya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel. 4.4.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi APS Provinsi Kepri

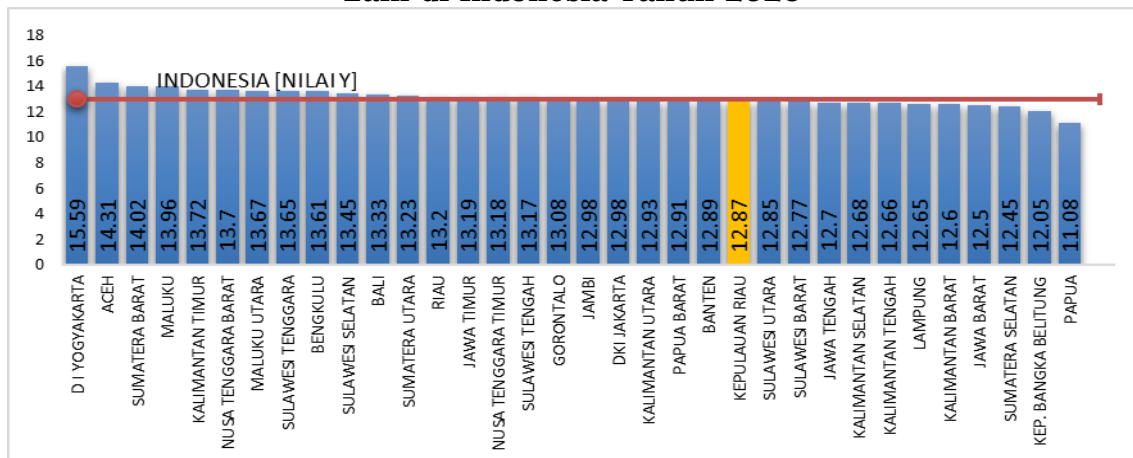
Perspekif					
Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Posisi relatif APS di Provinsi Kepri menunjukkan urutan ke dua setelah D.I. Yogyakarta dari 34 Provinsi di Indonesia. Relatif pada 84,62 dan berada pada garis diatas nasional dimana nasional hanya pada angka 72,72.	Trend antar waktu perkembangan APS di provinsi Kepri mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2015 pada angka 81,84 hingga tahun 2020 mencapai angka 84,62. Jika dibandingkan dengan nasional mulai tahun 2015-2020 kepri tetap berada di atas nasional.	Kepri memiliki penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya pada urutan kedua dari semua provinsi yang ada di Indonesia.	Tingkat perubahan persentase stabil meningkat	Hal ini menunjukkan Kepulauan Riau tetap berada di atas angka Nasional yang artinya perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase menunjukkan banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah yakni Kepri di bandingkan Rata-rata Nasional

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

C. Harapan Lama Sekolah

Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar bagi perkembangan suatu peradaban. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka lebar. Dimensi pendidikan lainnya dapat digambarkan dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS). Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan 34 Provinsi Lainnya berada pada posisi 23. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

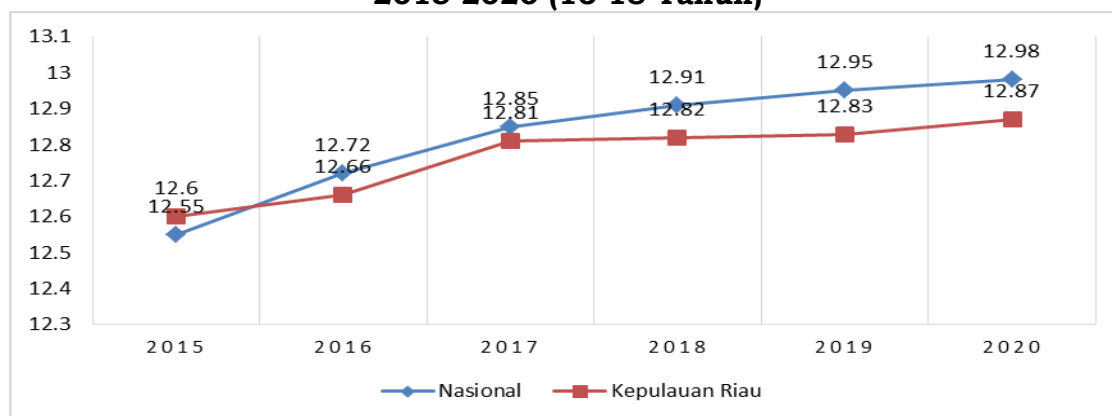
Grafik. 4.5.
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2020



Sumber : BPS, 2021

Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan rata-rata nasional masih berada jauh di bawah rata-rata. Ini berarti masih sedikit peluang anak-anak di Kepri dalam menamatkan sekolah. Grafik berikut akan menggambarkan trend perkembangannya :

Grafik. 4.6.
Trend Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020 (16-18 Tahun)



Sumber : BPS, 2021

Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,21 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,45 tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,33 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di Tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah mencapai

12,87 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

Tabel. 4.5.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	11.78	12.14	12.15	12.16	12.3	12.42
Bintan	11.98	12.27	12.6	12.75	12.95	13.1
Natuna	14.85	13.86	13.87	13.88	13.89	13.9
Lingga	11.78	12.06	12.42	12.43	12.44	12.45
Kepulauan Anambas	11.63	11.87	11.87	12.32	12.75	12.81
Batam	12.65	12.67	12.67	12.95	13.15	13.16
Tanjungpinang	14.05	14.06	14.07	12.08	14.09	14.12

Sumber : BPS Kepri, 2021

Kondisi beberapa aspek perkembangan yang telah dijelaskan pada tabel dan grafik di atas akan dianalisa kembali pada kondisi keterkaitannya yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.6.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas,
Relevansi Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Harapan Lama Sekolah	Kondisi relatif Harapan lama sekolah di Provinsi Kepri hanya menempati urutan ke 23 dari 34 Provinsi yang ada.	Trend antar waktu perkembangan Harapan Lama Sekolah di provinsi Kepri mengalami rata-rata masih berada jauh di bawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi lainnya.	Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di Tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah mencapai 12,87.	Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah meningkat sebesar 0,21 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,45 tahun.	Harapan Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah mencapai 12,87 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA.

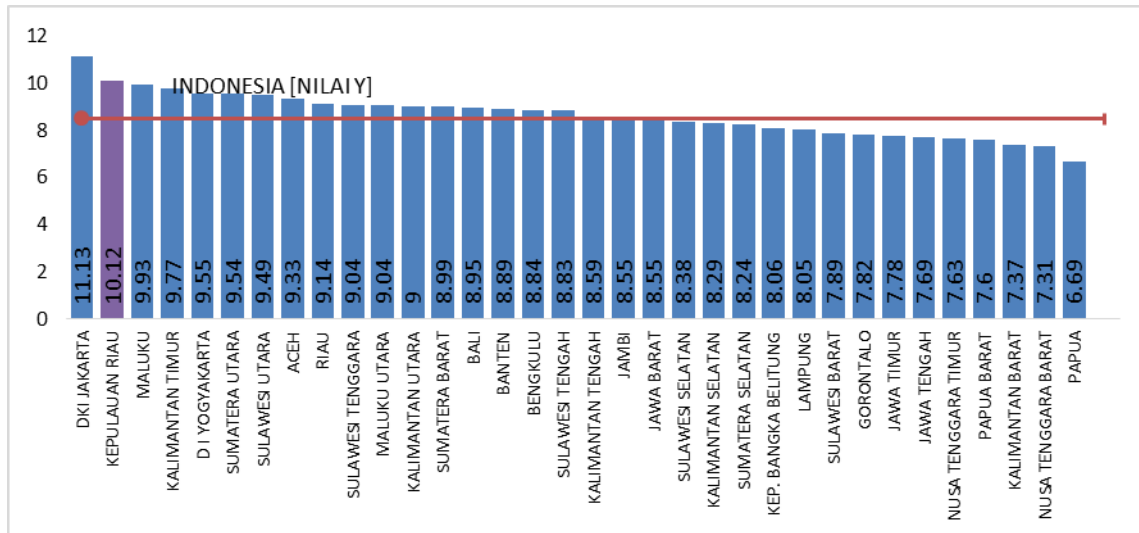
Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

D. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia tumbuh 0,94 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih

baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

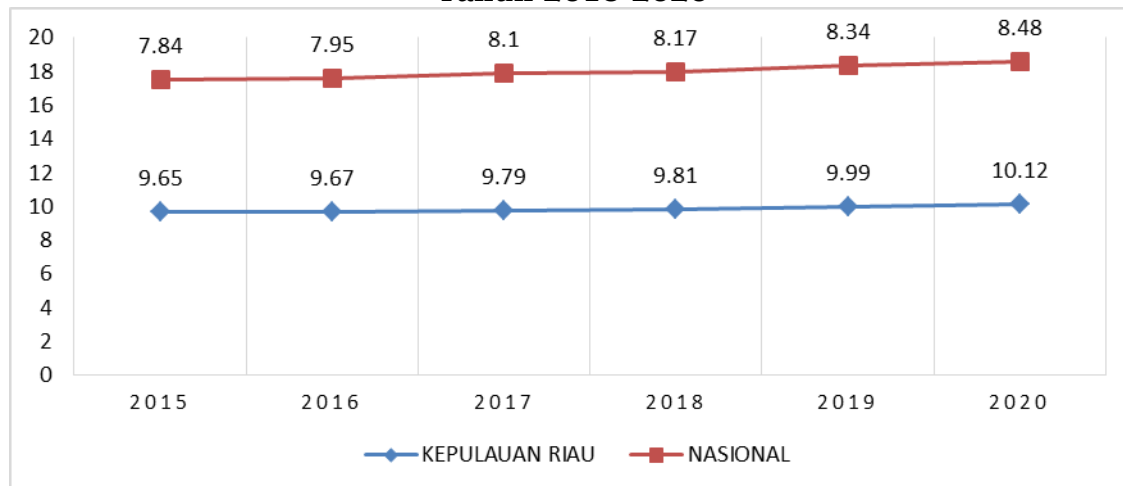
Grafik. 4.7.
Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2020



Sumber : BPS, 2021

Trend perkembangan Rata-rata lama sekolah ini jika dibandingkan dengan Provinsi Kepri akan terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik. 4.8.
Trend Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya dapat dilihat perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2015 hingga tahun 2020 pada tabel dibawah ini :

Tabel.4.7.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	7.74	7.75	7.75	7.81	7.92	8.17
Bintan	8.32	8.33	8.33	8.35	8.36	8.44
Natuna	8.45	8.46	8.46	8.71	8.72	8.73
Lingga	5.54	5.85	5.85	6.27	6.51	6.67
Kepulauan Anambas	6.62	6.63	6.63	6.7	6.91	7.17
Batam	10.81	11.1	11.1	11.12	11.13	11.14
Tanjungpinang	9.95	9.96	9.96	9.98	9.99	10.25

Sumber : BPS Kepri, 2021

Sama seperti sub-sub bab sebelumnya, untuk menganalisa lebih jauh maka dipertakan berdasarkan perkembangannya sehingga dapat dianalisa keterkaitan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepri sebagai berikut :

Tabel. 4.8.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas,
Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Rata-rata Lama Sekolah	Posisi relatif Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepri menunjukkan Kepulauan Riau menempati urutan ke 2 dari 34 Provinsi yang ada setelah DKI Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia tumbuh 0,94% per tahun selama periode 2016 hingga 2020, - Sedangkan untuk kepri tahun 2015-2020 rata-rata lama sekolah di Kepri tumbuh 0,47%. - Kondisi ini semakin memburuk di tahun 2019-2020 saat pandemi covid melanda pertumbuhan rata-rata lama sekolah di kepri hanya 0,13 persen. 	Rata-Rata Lama Sekolah di Kepulauan Riau telah meningkat hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).	Wilayah perkotaan di Provinsi Kepri menempati rata-rata lama sekolah dengan angka yang cukup baik, yakni Batam di Tahun 2020 pada angka 11,14 dan disusul dengan Kota Tanjungpinang pada angka 10,25.	Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kepri yang lebih baik, sebab secara rata-rata penduduk Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

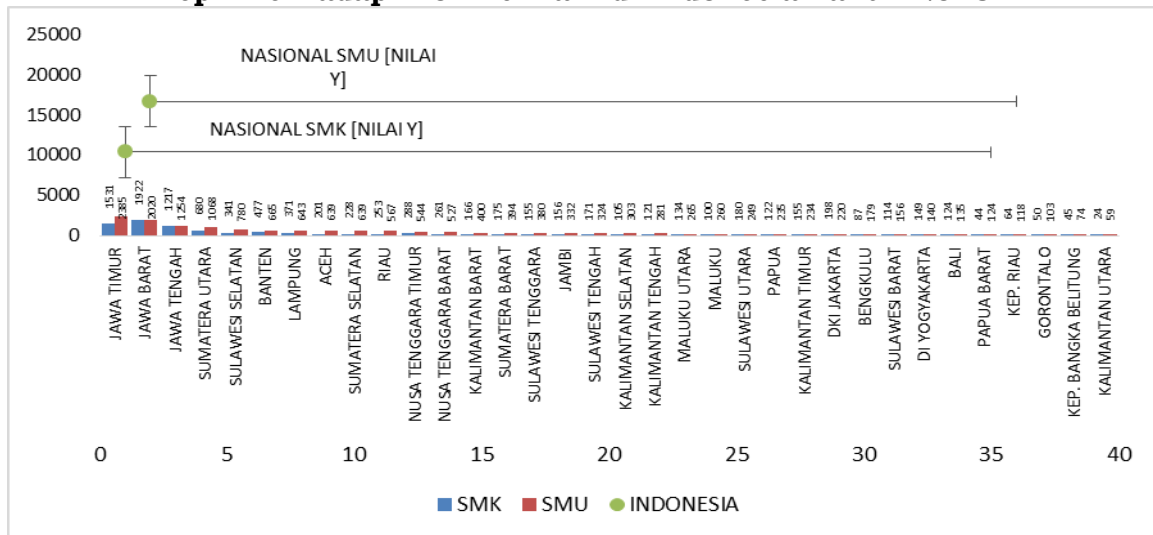
Sumber : Olahan Penelitian, 2021

E. Jumlah Sekolah SMA dan SMK

Indikator pendidikan yang lain yang tak kalah pentingnya adalah kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan tersedianya sekolah yang menjadi urusan pemerintah provinsi Kepri adalah SMA/SMK/Sederajat. Data terakhir yang didapatkan adalah pada tahun 2018 dengan posisi relatif Kepulauan Riau memiliki infrastruktur sekolah paling sedikit dari provinsi yang ada di Indonesia dan berada di urutan 31 dari 34 Provinsi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik. 4.9.

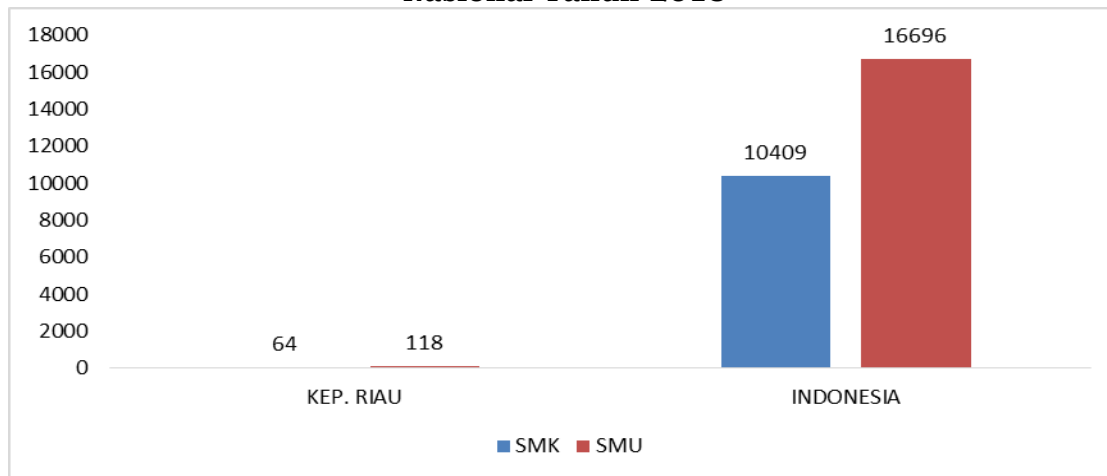
Posisi Relatif Jumlah Desa yang Memiliki Sekolah SMU/SMK Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2018



Sumber : BPS, 2021

Selanjutnya dari data di atas jika dibagi berdasarkan wilayah pedesaan memiliki infrastruktur sekolah yang sangat sedikit dengan gambaran trend sebagai berikut :

Grafik. 4.10.
Trend Jumlah Desa yang Memiliki Sekolah Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2018



Sumber : BPS, 2021

Perkembangan jumlah sekolah tersebut dapat dikategorikan berdasarkan status sekolah yakni Negeri dan Swasta di tiap-tiap Kabupaten/Kota sebagai berikut :

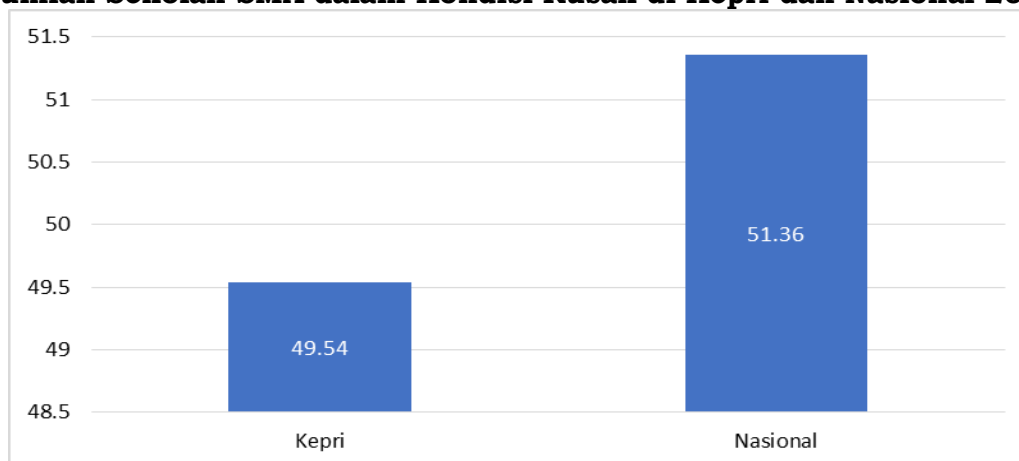
Tabel.4.9.
Perkembangan Jumlah Sekolah SMA/Sederajat Negeri & Swasta Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Negeri						
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	14	14	14	14	15	15
Bintan	8	8	9	10	10	10
Natuna	14	14	14	14	14	14
Lingga	11	11	11	13	13	14
Kepulauan Anambas	5	5	5	5	5	5
Batam	19	21	22	24	24	26
Tanjungpinang	6	6	7	7	7	7
Swasta						
Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	3	3	3	3	3	3
Bintan	2	2	2	2	3	3
Natuna	0	0	0	0		1
Lingga	0	0	0	1	1	1
Kepulauan Anambas	0	0	0	0	0	0
Batam	27	32	34	34	34	42
Tanjungpinang	6	6	6	5	5	6

Sumber : BPS Kepri, 2021

Dari perkembangan kondisi sekolah di atas, jika dilihat dari persentase jumlah sekolah yang rusak di Provinsi Kepri dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik. 4.11.
Jumlah Sekolah SMA dalam Kondisi Rusak di Kepri dan Nasional 2020



Sumber : BPS, 2021

Pada grafik di atas menunjukkan persentase fasilitas pendidikan dalam hal ruang kelas SMA masih berada di posisi kurang baik, karena terdapat 49,54 % jumlah sekolah SMA dalam kondisi Rusak. Kondisi infrastruktur seperti jumlah sekolah memang penting untuk menanggapi perkembangan baik APM, APS, HLS, dan Rata-rata lama sekolah, untuk itu akan dipetakan berdasarkan analisa keterkaitan perkembangan jumlah sekolah SMA/SMK/Sederajat sebagai berikut :

Tabel. 4.10.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Jumlah Sekolah SMA/SMK/Sederajat Provinsi Kepri

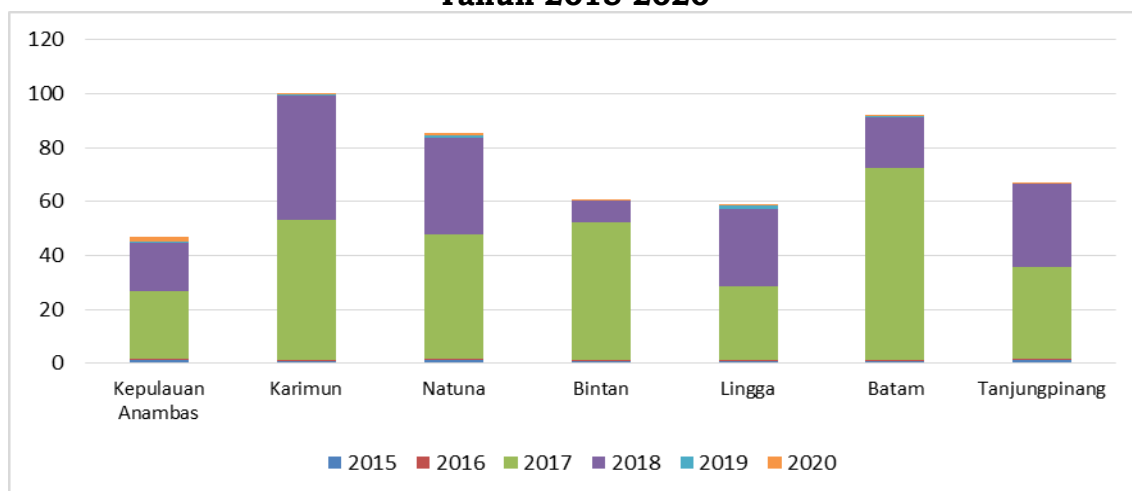
Perspekif					
Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Jumlah Sekolah SMA/SMK/Sederajat	Posisi relatif Jumlah sekolah di Provinsi Kepri menunjukkan Kepulauan Riau hanya menempati urutan ke 31 dari 34 Provinsi yang ada.	Jika melihat antar waktu enambahan sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tidak signifikan perkembangannya dibandingkan tiap tahunnya hanya bertambah lebih kurang 1 s/d 3 ditiap tahunnya pada tiap kab dan kota yang ada. Pembangunan infrastruktur sekolah SMA dan sederajat dimasa pandemi juga tidak ada penambahan hanya di Kota Batam.	Kualitas pelayanan pendidikan tentunya dilihat juga dari infrastruktur sekolah yakni jumlah sekolah.	Perkembangan Jumlah sekolah berdasarkan kab/kota yang ada di Provinsi Kepri menunjukkan perkembangan yang signifikan pada kota Batam dengan penambahan lebih kurang 6-8 sekolah.	Pertumbuhan kebutuhan akan sekolah semestinya direspon pemerintah dari melihat kondisi ini. Keterkaitan relatif, antar waktu dan lainnya menunjukkan kebutuhan jumlah sekolah yang harus terus bertambah sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

F. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan berdasarkan umur. Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu ini dikelompokkan pada umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Untuk Provinsi karena usia SMA adalah 16-18 tahun maka yang diukur adalah usia tersebut. Angka Putus Sekolah tertinggi terdapat pada kabupaten Karimun dan disusul Kota Batam.

Grafik.4.12.
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kepri, 2021

Perkembangan antar waktu jika dibagi berdasarkan kabupaten dan Kota yang ada diprovinsi Kepri mulai Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4.11.
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	0.77	0.38	52	46	0.48	0.75
Bintan	0.73	0.42	51	8	0.08	0.54
Natuna	1.22	0.59	46	36	0.83	0.68
Lingga	0.82	0.56	27	29	1.32	0.43
Kepulauan Anambas	1.23	0.6	25	18	0.46	1.82
Batam	0.87	0.48	71	19	0.28	0.26
Tanjungpinang	0.97	0.53	34	31	0.33	0.23
Provinsi Kepulauan Riau	0.95	0.51	0.44	0.42	0.41	0.4

Sumber : BPS Kepri, 2021

Berikut akan dijelaskan mengenai data perkembangan angka putus sekolah di Kepri dan bagaimana keterkaitannya yang akan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel. 4.12.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Angka Putus Sekolah	Posisi relatif Angka Putus Sekolah di Kepri tidak dapat dibandingkan secara nasional karena tidak semua provinsi memiliki data tersebut.	Di Provinsi Kepri dari tahun 2015-2020 Angka putus sekolah terjadi lonjakan pada Tahun 2017 dan 2018. Namun kembali turun pada tahun 2019 dan 2020. Pada masa pandemi covid 19 di tahun 2019-2020 angka putus sekolah menurun namun terjadi peningkatan di Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2020.	Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan berdasarkan umur sehingga efektif dalam mengukur kebutuhan dimensi pendidikan.	Untuk Provinsi karena usia SMA adalah 16-18 tahun maka yang diukur adalah usia tersebut. Angka Putus Sekolah tertinggi terdapat pada kabupaten Karimun dan disusul Kota Batam.	Hubungan angka putus sekolah dengan dimensi pendidikan memiliki keterkaitan dan dalam perkembangannya menunjukkan wilayah dengan jumlah penduduk yang banyak angka putus sekolahnya meningkat dan pernah terjadi lonjakan di tahun 2017 dan 2018.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

4.1.2. Prioritas Intervensi Dimensi Pendidikan.

Berdasarkan sub bahasan permasalahan dimensi pendidikan, dari enam indikator terdapat dua indikator yang berada di bawah rata-rata nasional, prioritas intervensi dimensi pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13.
Prioritas Intervensi Dimensi Pendidikan

No	Indikator	Keterangan
1	Harapan Lama Sekolah	Kondisi relatif harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau hanya menempati urutan ke 23 dari 34 Provinsi yang ada.
2	Jumlah Sekolah SMA dan SMK	Kondisi relatif jumlah sekolah di Provinsi Kepulauan Riau hanya menempati urutan ke 31 dari 34 Provinsi.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

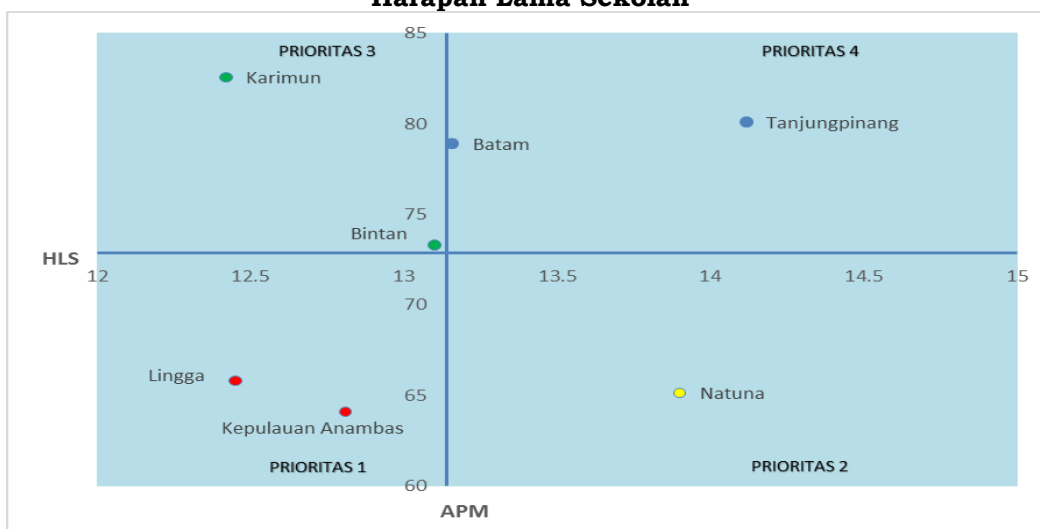
4.1.3. Prioritas Intervensi dan Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Pendidikan.

Analisis prioritas wilayah intervensi ini bertujuan untuk menentukan wilayah Kabupaten/Kota yang akan diprioritas untuk segera mendapatkan intervensi berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung pada lingkup Kabupaten/Kota lainnya. Analisis wilayah intervensi ini menggunakan teknik analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan.

A. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah

Indikator pertama yang disandingkan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah wilayah Kabupaten/Kota dalam 4 kuadran. APM merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Semakin tinggi APM semakin baik. Sedangkan Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Secara statistik angka HLS yang tinggi menunjukan kondisi yang baik. Analisa kuadran APM dan HLS sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.13
Pemetaan Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah



Sumber : BPS, Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang mempunyai angka HLS di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : kab/kota yang mempunyai angka HLS di atas rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : kab/kota yang mempunyai angka HLS di bawah rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : kab/kota yang mempunyai angka HLS di atas rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah pada pendidikan SMA/MA/Sederajat di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.14.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah

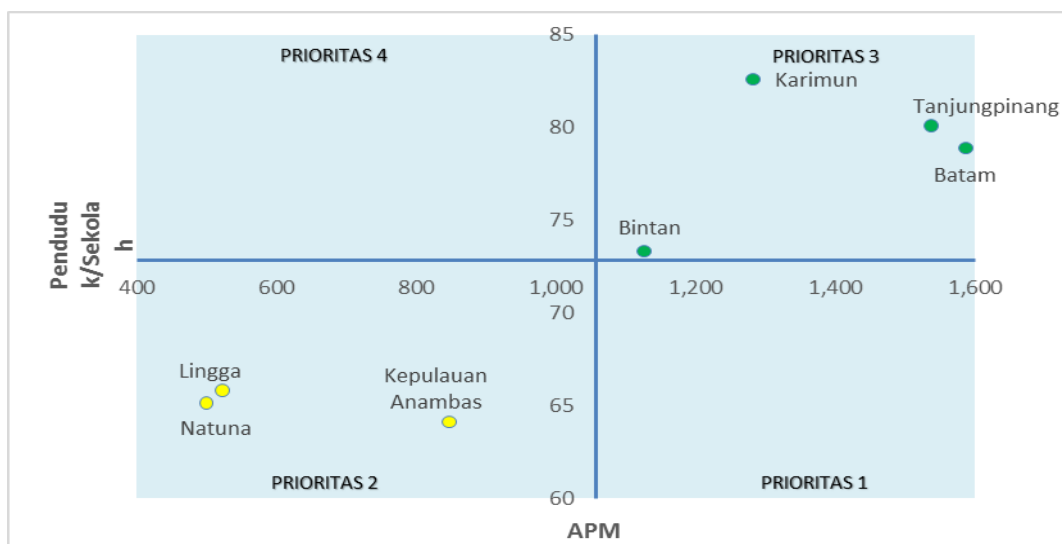
Prioritas 1	: Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas
Prioritas 2	: Kabupaten Natuna
Prioritas 3	: Kabupaten Karimun dan Bintan
Prioritas 4	: Kota Tanjungpinang dan Batam

Sumber : Olahan 2021.

B. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah.

Indikator berikut yang disandingkan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Angka Partisipasi Murni (APM) yang tinggi menunjukkan kondisi yang baik dan Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah yang makin kecil atau rendah menunjukkan kondisi yang baik. Analisa kuadrannya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.14
Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM)
dan Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di atas rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di atas rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah pada pendidikan SMA/MA/Sederajat di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.15.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM)
dan Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah

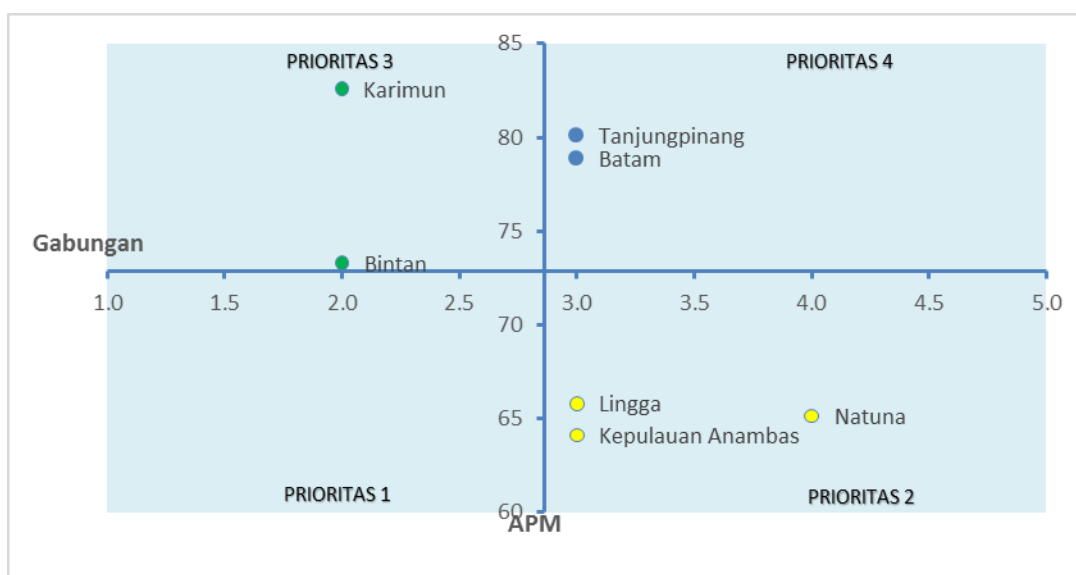
Prioritas 1	: -
Prioritas 2	: Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas
Prioritas 3	: Kabupaten Bintan, Karimun, Kota Kota Batam dan Tanjungpinang
Prioritas 4	: -

Sumber : Olahan tahun 2021

C. Indikator Gabungan

Indikator berikut yang disandingkan adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan gabungan Harapan Lama Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia 15-19 Tahun/Jumlah Sekolah pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran, sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.15
**Pemetaan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Harapan Lama Sekolah-
Jumlah Penduduk Usia 15-19/Jumlah Sekolah**



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang kabupaten/kota yang skor indikator gabungan di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata (kurang) 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang skor indikator gabungan di atas rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang skor indikator gabungan di bawah rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang skor indikator gabungan di atas rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Gabungan Harapan Lama Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia 15-19/Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.16.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM)
dan Jumlah Penduduk Usia 15-19/Jumlah Sekolah

Prioritas 1	: -
Prioritas 2	: Kabupaten Kepulauan Anambas, Natuna dan Lingga
Prioritas 3	: Kabupaten Bintan dan Karimun
Prioritas 4	: Kota Batam dan Tanjungpinang

Sumber : Olahan tahun 2021

4.2. Dimensi Kesehatan

4.2.1. Permasalahan Dimensi Kesehatan

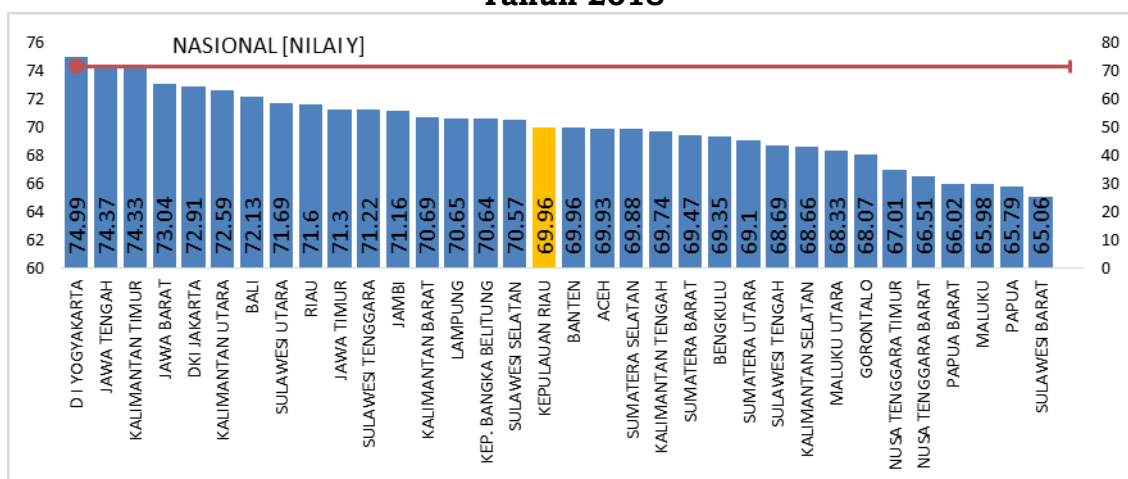
Kemiskinan merupakan masalah klasik di negara-negara berkembang, dan juga menjadi perhatian negara-negara maju di dunia. Sektor Kesehatan berkaitan erat dengan kemiskinan karena berhubungan erat dengan masalah-masalah kesehatan yang dijabarkan dalam beberapa indikator dari derajat kesehatan itu sendiri. Derajat kesehatan yang rendah berpengaruh pada produktifitas dalam perekonomian. Sebaliknya kemiskinan menyebabkan tidak terjangkaunya pelayanan kesehatan, sehingga tidak tercapai upaya peningkatan derajat kesehatan. Untuk itu berikut akan dijabarkan beberapa indikator yang mempengaruhi sector atau dimensi kesehatan ini adalah sebagai berikut :

A. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup juga merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, dengan adanya peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir dapat diindikasikan adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya di suatu negara. Dengan evaluasi tersebut pemerintah dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi para penduduknya.

Apabila ditemukan Angka Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Sementara peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan bahwa bayi-bayi telah terjamin kesehatan dan kemiskinan sudah diatasi lebih baik. Pada negara berkembang, biasanya Angka Umur Harapan Hidup masih berkisar 40-60 tahun. Namun dalam negara maju, Angka Harapan Hidup relatif lebih tinggi hingga mencapai umur 90 tahun. Posisi Relatif UHH Provinsi Kepulauan Riau terletak pada urutan ke 17 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia dan berada jauh dibawah angka nasional dan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

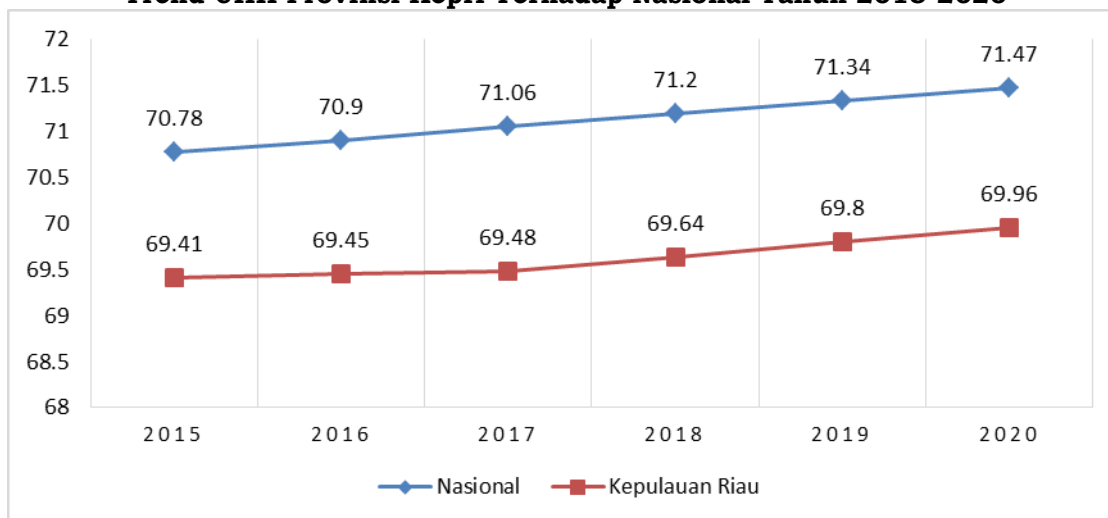
Grafik. 4.16
Posisi Relatif UHH Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia Tahun 2018



Sumber : BPS, 2021

Jika dilihat dari trend perkembangannya Kepulauan riau dari tahun 2015-2020 berada tetap dibawah rata-rata nasional dan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik. 4.17.
Trend UHH Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, 2021

Perkembangan UHH di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020 menunjukkan daerah Perkotaan Batam dan Tanjungpinang memiliki angka rata-rata UHH yang tinggi terlihat pada tabel berikut :

Tabel.4.17.
Perkembangan UHH Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bintan	69,92	70,02	70,12	70,21	70,30	70,38
Natuna	63,64	63,99	64,33	64,57	64,81	65,06
Lingga	59,77	60,44	61,14	61,44	61,75	62,06
Kepulauan Anambas	66,33	66,54	66,76	66,91	67,06	67,21
Batam	73,00	73,09	73,19	73,24	73,29	73,33
Tanjungpinang	71,65	71,74	71,84	71,93	72,02	72,10
Karimun	69,71	70,02	70,32	70,52	70,71	70,91

Sumber : BPS Kepri, 2021

Umur Harapan Hidup juga merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang dapat dianalisa keterkaitannya sebagai berikut :

Tabel. 4.18.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas,
Relevansi UHH di Provinsi Kepri

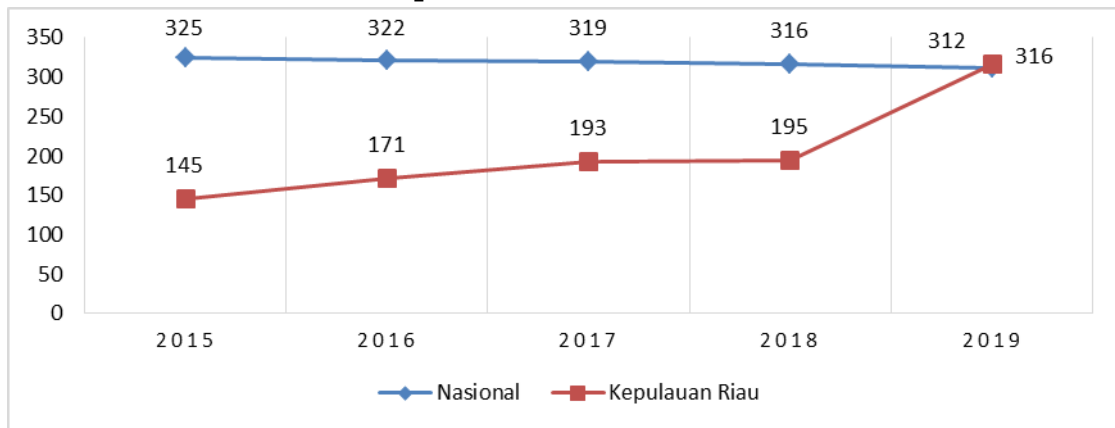
Indikator	Perspektif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Umur Harapan Hidup (UHH)	Posisi relatif UHH di Kepri masih dibawah rata-rata angka nasional yakni 71,47 di tahun 2020.	UHH di Provinsi Kepri dari tahun 2015-2020 menunjukkan peningkatan mulai pada angka 69,41 di tahun 2015 dan mencapai angka 69,96. Perkembangan ini menunjukkan posisi antar waktu Umur Harapan Hidup Masyarakat kepri terus meningkat.	Apabila ditemukan Angka Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan.	Jika dilihat Perkembangan UHH di Kepri berdasarkan Kabupaten/Kota wilayah perkotaan dan dengan jumlah masyarakat yang banyak menunjukkan UHH yang cukup tinggi ketimbang wilayah perdesaan yakni Lingga, Natuna dan Anambas.	Perkembangan UHH di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020 menunjukkan daerah Perkotaan Batam dan tanjungpinang memiliki angka rata-rata UHH yang tinggi, dan kabupaten dengan ciri perdesaan lainnya juga naik stabil menunjukkan Umur Harapan Hidup Masyarakat kepri terus meningkat.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

B. Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC

Tuberculosis (TBC) merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas di negara berkembang (Rodrigues & Smith, 1990) dan juga menjadi salah satu dari sepuluh penyebab utama kematian tertinggi di seluruh dunia (WHO, 2019). Percepatan peningkatan kesehatan dalam sebuah negara merupakan salah satu hal yang terpenting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Lebih jauhnya lagi, kualitas kesehatan yang buruk akan mengurangi pertumbuhan dari pendapatan nasional (Gupta & Mitra, 2004). Oleh karena itu, pencegahan dari penyebaran penyakit, terlebih penyakit menular telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Penyakit Tuberculosis menjadi salah satu penyakit menular yang juga menjadi penyakit prioritas dalam pembangunan nasional jangka panjang bidang kesehatan tahun 2020-2025 dan berkaitan dengan penanganan kemiskinan (Depkes RI, 2009).

Grafik. 4.18.
Trend Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020



Sumber : BPS, 2021

Tabel.4.19.
Perkembangan Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020 (per 100.000 penduduk)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bintan	114	114	146	152	214	121
Natuna	118	33	117	93.59	137	81
Lingga	95	118	106		122	96
Kepulauan Anambas	79	30	105	183	181	109
Batam	143	177	278	215	385	182
Tanjungpinang	170	235	362	232	274	192
Karimun	168	200	269	156	208	133

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, 2021

Tuberculosis (TBC) merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas dan berkaitan dengan kematian, tentunya dengan kualitas kesehatan yang buruk akan mengurangi pertumbuhan dari pendapatan, analisa perkembangan Insiden Kasus TBC di Kepri akan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel. 4.20.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Insiden Kasus TBC di Provinsi Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Insiden Kasus Semua Jenis TBC	Posisi relatif Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di Kepri jika dibandingkan secara nasional masih dibawah rata-rata angka nasional, namun melebihi angka nasional di tahun 2020 sehingga perlu perhatian serius.	Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di Provinsi Kepri dari tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan mulai pada angka 145 di tahun 2015 dan mencapai angka 316 di Tahun 2019. Perkembangan ini menunjukkan posisi antar waktu kasus TBC Masyarakat kepri terus meningkat.	Tuberculosis (TBC) merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas dan berkaitan dengan kematian, tentunya dengan kualitas kesehatan yang buruk akan mengurangi pertumbuhan dari pendapatan di Provinsi Kepri.	Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di Kepri berdasarkan Kabupaten /Kota wilayah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang dan dengan jumlah masyarakat yang banyak menunjukkan Kasus TBC yang cukup tinggi ketimbang wilayah perdesaan yakni Lingga dan Natuna. Sementara karimun dan Anambas di Tahun 2020 juga mencapai angka lebih besar dari 100.	Perkembangan Insiden Tuberculosis (TBC) Kepri di menunjukkan tren naik hingga tahun 2020 melebihi angka nasional, kemudian wilayah perkotaan perlu perhatian serius terkait penanganan kasus TBC karena cukup tinggi.

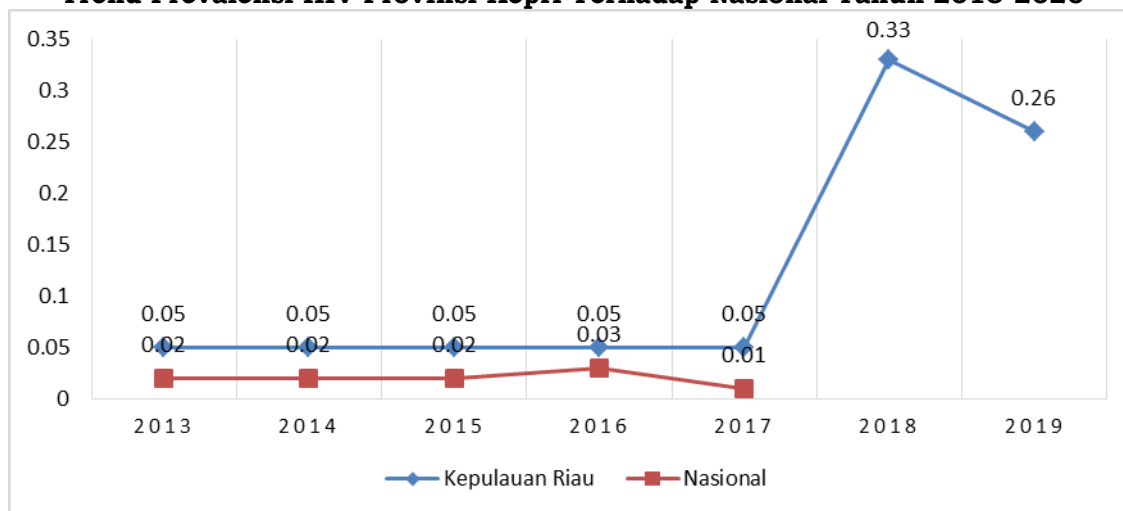
Sumber : Olahan Penelitian, 2021

C. Jumlah Prevalensi HIV

Indikator ini mengukur jumlah individu dengan kelompok usia yang hidup dengan HIV, yang dinyatakan dengan persentase terhadap total penduduk pada kelompok usia, serta tingkat pengobatan dengan terapi anti-retroviral menurut kelompok usia tertentu. Indikator ini menggambarkan kemajuan dalam mengurangi infeksi HIV dan meningkatkan akses terhadap pengobatan. Indikator pengobatan menggambarkan persentase penduduk di

setiap kelompok umur dengan HIV saat ini yang menerima terapi antiretroviral (ART), yang terdiri dari penggunaan setidaknya tiga antiretroviral (ARV), yang secara maksimal menekan HIV dan menghentikan perkembangan penyakit. Indikator ini juga menambahkan gambaran kematian yang disebabkan oleh HIV.

Grafik. 4.19.
Trend Prevalensi HIV Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2015-2020



Sumber : BPS Kepri, 2021

Untuk lebih jelasnya perkembangan Prevalensi HIV di Provinsi Kepri akan dijabarkan dalam kondisi per Kabupaten Kota pada tabel berikut :

Tabel.4.21.
Perkembangan Prevalensi HIV Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bintan	0.058	0.056	0.5		0.33	0.26
Natuna	0.0001	0.0002	0.0001		0.33	0.26
Lingga	0.0002	0.0002	0.0002		0.33	0.26
Kepulauan Anambas					0.33	0.26
Batam	0.03	0.05	0.05		0.33	0.26
Tanjungpinang	0.055	0.065	0.05		0.33	0.26
Karimun	0.05	0.05	0.05		0.33	0.26

Sumber : BPS Kepri, 2021

Perkembangan Prevalensi HIV merupakan penyebab utama morbiditas serta mortalitas dan berkaitan dengan kematian, tentunya dengan kualitas kesehatan yang buruk akan mengurangi pertumbuhan dari pendapatan, analisa perkembangan Prevalensi HIV di Kepri akan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel. 4.22.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Prevalensi HIV di Provinsi Kepri

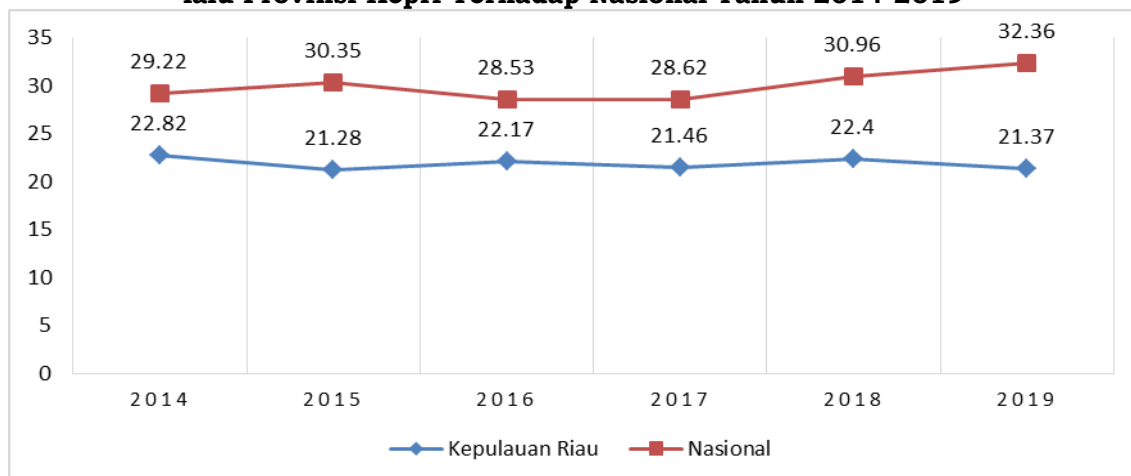
Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Prevalensi HIV	Posisi relatif Persentase Prevalensi HIV di Kepri menunjukkan data yang cukup tinggi dibandingkan nasional, hal ini perlu perhatian serius bagi pemerintah.	Persentase Prevalensi HIV di Provinsi Kepri dari tahun 2015-2020 menunjukkan peningkatan mulai pada angka 0,5 di tahun 2015 dan mencapai angka 0,26 di Tahun 2020. Perkembangan ini rata-rata menunjukkan angka yang sama di setiap kabupaten dan Kota di Kepri.	Persentase penduduk di setiap kelompok umur dengan HIV saat ini yang menerima terapi antiretroviral (ART), yang terdiri dari penggunaan setidaknya tiga antiretroviral (ARV), yang secara maksimal menekan HIV dan menghentikan perkembangan penyakit.	Persentase Prevalensi HIV di Kepri berdasarkan Kabupaten/Kota wilayah perkotaan cukup tinggi di tahun 2015 namun di Tahun 2020 semua kabupaten dan kota merata di angka 0,26	Perkembangan Prevalensi HIV di Kepri menunjukkan tren naik hingga tahun 2020 melebihi angka nasional.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

D. Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Sebulan Yang Lalu

Tingkat kesehatan penduduk juga dapat digambarkan dengan angka keluhan kesehatan. Berdasarkan data terdapat penduduk baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan dalam keluhan kesehatan mulai tahun 2014 hingga 2019 dan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik. 4.20.
Trend Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu Provinsi Kepri Terhadap Nasional Tahun 2014-2019



Sumber : BPS, 2021

Jika ditinjau menurut kabupaten/kota yang dapat dilihat pada Tabel dibawah, maka ternyata tingkat keluhan kesehatan sangat bervariasi. Pada tahun 2020, yang mengalami tingkat keluhan tertinggi adalah Kabupaten Lingga yaitu 27,18 persen. Adapun yang terendah adalah Kabupaten Bintan sebesar 13,26 persen untuk laki-laki dan 17,26 persen untuk perempuan dengan total rata-rata hanya 15,21 persen.

Tabel.4.23.

Perkembangan Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	15.45	16.02	17.62	19.44	24.43	23.6	23.21
Bintan	28.7	23.06	24.51	22.49	21.75	23.9	15.21
Natuna	22.95	22.41	20.67	21.67	27.82	23.08	22.38
Lingga	28.18	23.56	24.72	22.78	34.54	35.42	27.18
Kepulauan Anambas	20.9	22.09	18.18	16.55	19.86	14.55	19.17
Batam	23.64	21.89	23.98	18.58	20.21	19.75	16.00
Tanjungpinang	19.9	20.64	14.82	41.04	27.76	22.27	24.06

Sumber : BPS Kepri, 2021.

Dari perkembangan diatas dapat dianalisa berdasarkan keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan Efektivitasnya pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.24.

Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu di Provinsi Kepri

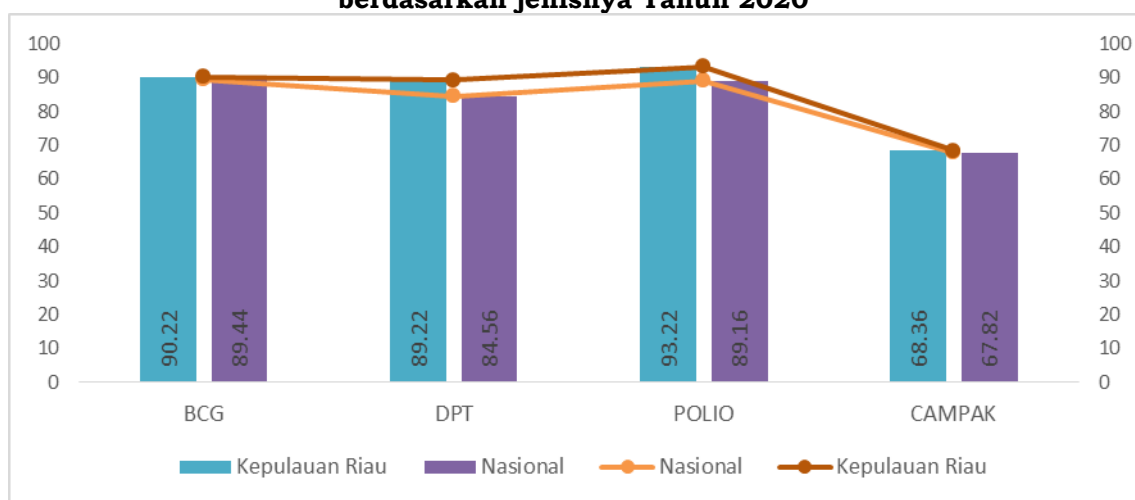
Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu	Posisi relatif Persentase Keluhan kesehatan di Kepri menunjukkan data dibawah nasional yakni 21,37 persen sementara nasional berada diangka 32,36 persen.	Pada tahun 2020, yang mengalami tingkat keluhan tertinggi adalah Kabupaten Lingga yaitu 27,18 persen. Adapun yang terendah adalah Kabupaten Bintan sebesar 13,26 persen untuk laki-laki dan 17,26 persen untuk perempuan dengan total rata-rata hanya 15,21 persen. Pada masa pandemi tahun 2019-2020 persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan malah mengalami penurunan, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan covid 19 dengan keluhan kesehatan di kepri.	Persentase penduduk di Kepri yang mengalami keluhan kesehatan cukup bervariasi dilihat dari kabupaten kota wilayah perdesaan, khususnya kabupaten yang ada di Kepri menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.	Persentase Penduduk di Kepri yang mengalami keluhan kesehatan tertinggi pada Kabupaten Lingga, disusul Kota Tanjungpinang, selanjutnya kabupaten karimun dan Natuna.	Perkembangan Keluhan kesehatan di Kepri menunjukkan tren menurun hingga tahun 2019 dari 22,4 ditahun 2018 menjadi 21,37 ditahun 2019 dan tetap pada posisi dibawah nasional.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

E. Persentase Balita yang di Imunisasi

Untuk mencegah berbagai penyakit menular, pemerintah memberikan beberapa antigen untuk balita dan anak-anak. Adapun antigen yang dianggap penting adalah BCG, DPT, Polio, dan Campak untuk mencegah penyakit yang biasanya menyerang anak-anak yang diduga dapat menyebabkan kematian pada bayi. Dari Grafik dibawah ini diketahui bahwa balita di Provinsi Kepulauan Riau yang pernah diberikan imunisasi campak masih di bawah 80 persen.

Grafik. 4.21.
Trend Persentase balita yang di Imunisasi Provinsi Kepri Terhadap Nasional berdasarkan jenisnya Tahun 2020



Sumber : BPS, 2021

Pentingnya imunisasi merupakan untuk daya tahan tubuh dan merupakan program rutin dan wajib bagi pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakatnya. Perkembangan persentase balita yang di imunisasi pada tiap Kabupaten/Kota yang ada di Kepri dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.25.
Perkembangan Persentase balita yang di Imunisasi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2014-2020

Kabupaten Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	95.81	98.16	93.68	120.5	79.53	115.7	112.5
Bintan	92.77	96.43	95.51	106.1	97.42	115.8	114.5
Natuna	69.47	81.85	76.06	64.1	59.29	79.5	102
Lingga	97.49	129.38	74.73	76.1	86.06	121.6	114
Kepulauan Anambas	86.48	88.17	81.55	124.4	98.32	139.2	150.5
Batam	86.19	86.37	90.3	93.5	91.7	89.6	79.2
Tanjung Pinang	88.93	88.17	94.99	121.7	100.53	125.5	127.4
Kepulauan Riau	87.59	93.46	90.14	97	90.25	96.9	89.6

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, 2021.

Dari perkembangan diatas dapat dianalisa berdasarkan keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan efektivitasnya pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.26.

Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Persentase balita yang di Imunisasi di Provinsi Kepri

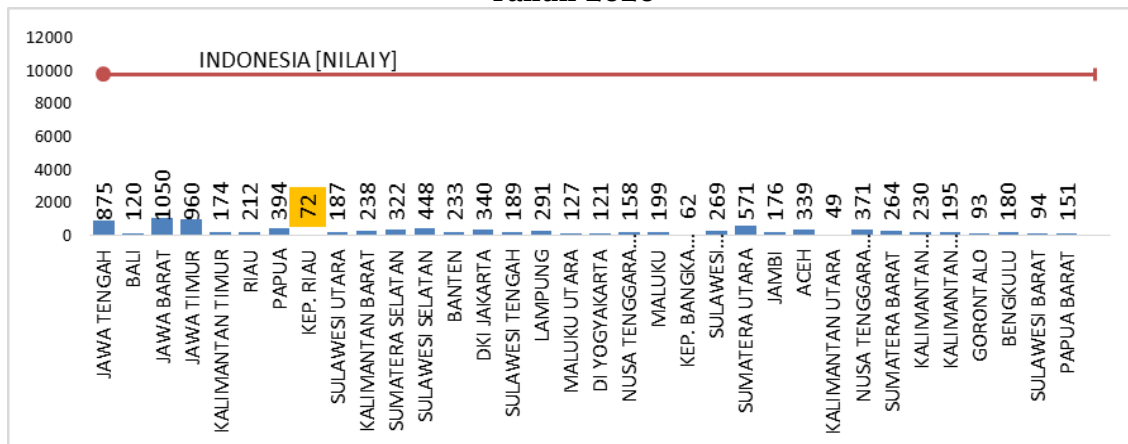
Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase balita yang di Imunisasi	Posisi relatif Persentase balita yang di Imunisasi di Kepri menunjukkan angka yang variatif dan masih berada pada patisipasi lebih tinggi dari pada nasional dalam melakukan imunisasi balita.	Pada tahun 2020, yang mengalami tingkat Persentase balita yang di Imunisasi paling tinggi pada jenis imunisasi polio dan disusul dengan jenis imunisasi BCG. Peningkatan terus terjadi jika rata-rata keseluruhan mulai tahun 2014-2019 namun terjadi penurunan di tahun 2020 pada masa pandemi.	Persentase balita yang di Imunisasi Untuk mencegah berbagai penyakit menular, pemerintah memberikan beberapa antigen untuk balita dan anak-anak. Adapun antigen yang dianggap penting adalah BCG, DPT, Polio, dan Campak untuk mencegah penyakit yang biasanya menyerang anak-anak yang diduga dapat menyebabkan kematian pada bayi.	Persentase balita yang di Imunisasi di Kepri tertinggi pada Kabupaten Kepulauan Anambas, disusul Kota Tanjungpinang, selanjutnya kabupaten Bintan dan Karimun.	Perkembangan Persentase balita yang di Imunisasi rata-rata diangka 100 persen di tiap kabupaten Kota, hanya Kota Batam masih di bawah 100 persen.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

F. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Ketidakmerataan ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan kondisi geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan pemanfaatan kesehatan pada masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia. Berdasarkan grafik fasilitas kesehatan pada tiap provinsi di Indonesia sebagaimana tergambar sebagai berikut :

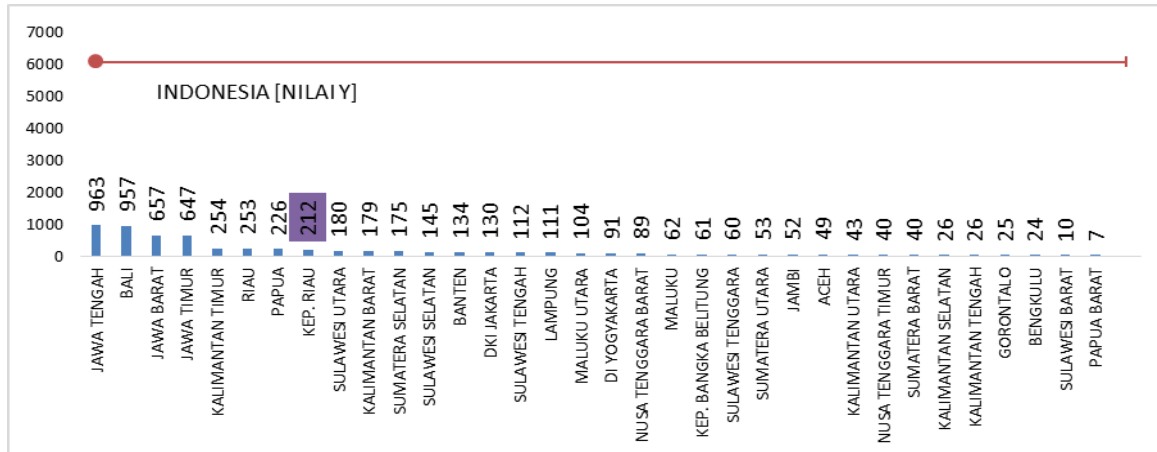
Grafik. 4.22.
Posisi Relatif Puskesmas Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia
Tahun 2020



Sumber : BPS, 2021

Selain fasilitas puskesmas yang merupakan infrastruktur dasar layanan kesehatan yang seharusnya terdapat di tiap desa dan kelurahan berikut akan digambarkan juga posisi relatif perkembangan rumah sakit yang ada di semua provinsi di Indonesia.

Grafik. 4.23.
Posisi Relatif Rumah Sakit Provinsi Kepri Terhadap Provinsi Lain di Indonesia
Tahun 2020



Sumber : BPS, 2021

Selain dari data BPS diatas, dalam kajian ini juga mengumpulkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri mengenai perkembangan Puskesmas dan rumah Sakit di tiap Kabupaten/Kota dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.27.
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepri Tahun 2015-2020

Kabupaten Kota	Puskesmas					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	10	11	11	13	13	13
Bintan	15	15	15	15	15	15
Natuna	13	13	13	15	14	13
Lingga	8	8	8	12	11	12
Kepulauan Anambas	7	7	7	7	7	8
Batam	17	17	19	19	20	23
Tanjungpinang	7	7	7	7	7	7
Kepulauan Riau	77	78	80	88	87	91
Kabupaten Kota	Rumah Sakit					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	2	2	3	2	2	2
Bintan	2	2	2	2	2	2
Natuna	1	1	2	1	2	2
Lingga	2	2	2	2	2	2
Kepulauan Anambas	2	2	2	2	3	3
Batam	15	16	16	11	12	12
Tanjungpinang	3	3	3	3	3	3
Kepulauan Riau	27	28	30	23	26	26

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, 2021

Tabel. 4.28.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas,
Perkembangan Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit di Provinsi
Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Perkembangan Fasilitas Kesehatan puskesmas dan Rumah Sakit	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Kepri baik puskesmas maupun rumah sakit berada pada urutan ke 8 dari 34 Provinsi yang ada	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kepri berdasarkan perkembangan antar waktu dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan baik puskesmas maupun rumah sakit.	Ketersediaan fasilitas kesehatan berdasarkan geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan pemanfaatan kesehatan pada masyarakat di beberapa wilayah di Kepri.	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri paling tinggi terdapat di wilayah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang.	Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri terlihat masih lemahnya pada perkembangan lambatnya pertumbuhan rumah sakit di tiap kabupaten Kota.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

Selain fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, hal yang mempengaruhi dimensi kesehatan ini adalah perkembangan tenaga kesehatan. Untuk itu, dijabarkan perkembangan tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Kepri pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.29.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan 2015-2020

Rasio Dokter Umum Terhadap 100.000 Penduduk						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	42.32	37.67	35.78	41.58	647	768
Karimun	30.63	27.48	26.16	24.2	72	77
Bintan	67.89	66.08	45.6	45.47	77	92
Natuna	41.59	32.61	40.5	39.41	36	53
Lingga	31.86	22.74	21.7	23.49	22	35
Kepulauan Anambas	36.5	99.6	52.1	115	19	34
Batam	36.5	31.7	31.2	36.84	293	317
Tanjung Pinang	61.24	56.87	62.4	73.62	128	160
Rasio Dokter Spesialis Terhadap 100.000 Penduduk						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	18.99	16.07	21.1	25.32	457	432
Karimun	15.09	16.24	17.1	17.34	45	35
Bintan	9.19	8.95	9.3	18.84	19	23
Natuna	10.73	10.87	15.2	16.01	8	8
Lingga	5.97	3.95	4.9	8.81	8	5
Kepulauan Anambas	4.41	4.74	13.6	17.71	4	7
Batam	20.94	16.1	22.5	28.2	292	252
Tanjung Pinang	29.03	27.85	30.7	32.39	81	102
Rasio Perawat Terhadap 100.000 Penduduk						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	193	188.34	178.65	201.64	3604	3991
Karimun	188.64	184.04	189	178	443	476
Bintan	215.68	205.8	221	212	377	407
Natuna	470.92	474.24	450	421	225	238
Lingga	245.9	216.49	271	267	293	289
Kepulauan Anambas	500.82	540.71	530	876	222	239
Batam	139.78	143.8	117	145	1398	1625
Tanjung Pinang	273.76	245.66	272	290	646	717
Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	89.72	90.64	97.45	100.42	1775	1993
Karimun	212.91	106.59	105	103	290	303
Bintan	144.26	135.59	159	144	250	277
Natuna	245.52	259.54	259	251	138	174
Lingga	323.26	176.95	203	198	195	211
Anambas	304.46	332.01	328	593	124	146
Batam	58.96	58.07	62	63	572	649
Tanjung Pinang	79.93	85.11	100	89	206	233

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, 2021

Jika melihat dari capaian sasaran pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan masih berada pada angka yang cukup rendah yakni 49,43%, selanjutnya Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang juga masih pada persentase yang rendah yakni 51,72% (RPJMD Kepri 2021-2026).

Dari perkembangan fasilitas kesehatan di atas termasuk tenaga medis yang ada dapat dianalisa berdasarkan keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan Efektivitasnya pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.30.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Perkembangan Tenaga Medis di Provinsi Kepri

Perspekif					
Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Perkembangan Tenaga Medis	Perkembangan Tenaga medis di Kepri mengalami peningkatan di tahun 2019-2020 namun posisi relatifnya sedikit untuk wilayah kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas	Perkembangan Tenaga Medis di Kepri berdasarkan perkembangan antar waktu dari tahun 2015-2020 terus mengalami peningkatan namun masih pada posisi rasio yang tinggi untuk wilayah perkotaan dengan jumlah masyarakat yang banyak.	Ketersediaan tenaga kesehatan dari kondisi geografis yang sangat bervariasi, menimbulkan potensi ketidakadiln sebaran tenaga kesehatan pada masyarakat di beberapa wilayah terpencil di Kepri.	Perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri paling tinggi terdapat di wilayah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang namun masih berada pada rasio yang jauh dibandingkan jumlah penduduk .	Perkembangan Tenaga Medis di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri terlihat masih lemahnya pada perkembangan tenaga medis spesialis.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021

4.2.2. Prioritas Intervensi Dimensi Kesehatan.

Berdasarkan sub bahasan permasalahan dimensi kesehatan, makap prioritas intervensi dimensi kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31.
Prioritas Intervensi Dimensi Kesehatan

No	Indikator	Keterangan
1	Persentase Penderita TBC per 100.000 penduduk	Kondisi relatif persentase insiden kasus TBC Kepri masih dibawah rata-rata angka nasional, namun melebihi angka nasional di tahun 2020.
2	Jumlah Prevalensi HIV	Trend Jumlah Prevalensi HIV di Provinsi Kepri naik dari tahun ke tahun, namun data Jumlah Prevalensi HIV semua kab/kota sama.
3	Fasilitas Kesehatan	Jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan
4	Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan

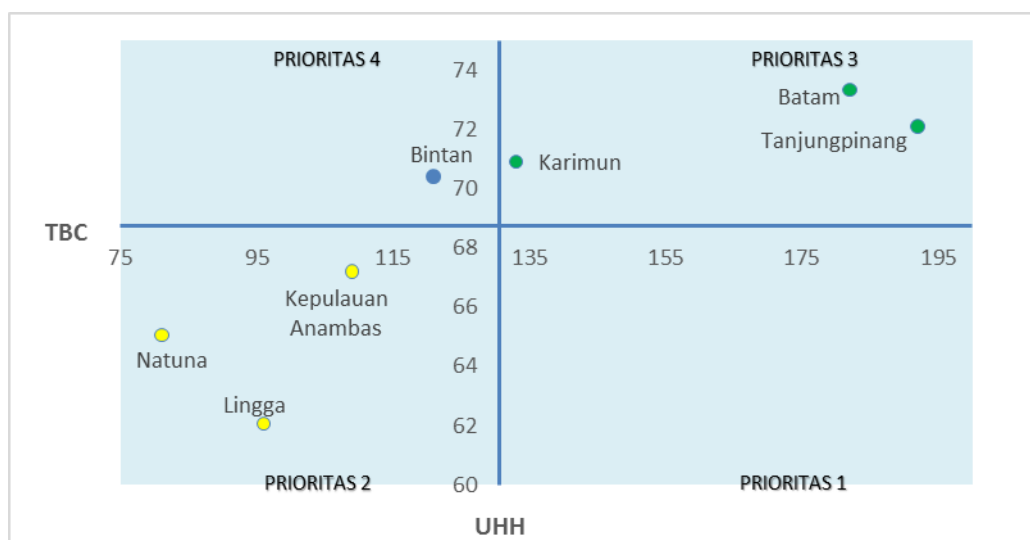
Sumber : Olahan Penelitian, 2021

4.2.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Kesehatan

A. Prioritas Wilayah Untuk Menurunkan Angka Kematian

Indikator peratama yang disandingkan pada dimensi kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dan Persentase Penderita TBC per 100.000 penduduk pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin tinggi angka UHH menunjukkan kondisi yang baik sebaliknya semakin besar persentase insiden kasus semua jenis TBC menunjukkan kondisi yang tidak baik. Analisa kuadrannya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.24.
Pemetaan Menurunkan Angka Kematian



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk menurunkan angka kematian di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.32.
Prioritas Wilayah untuk Menurunkan Angka Kematian

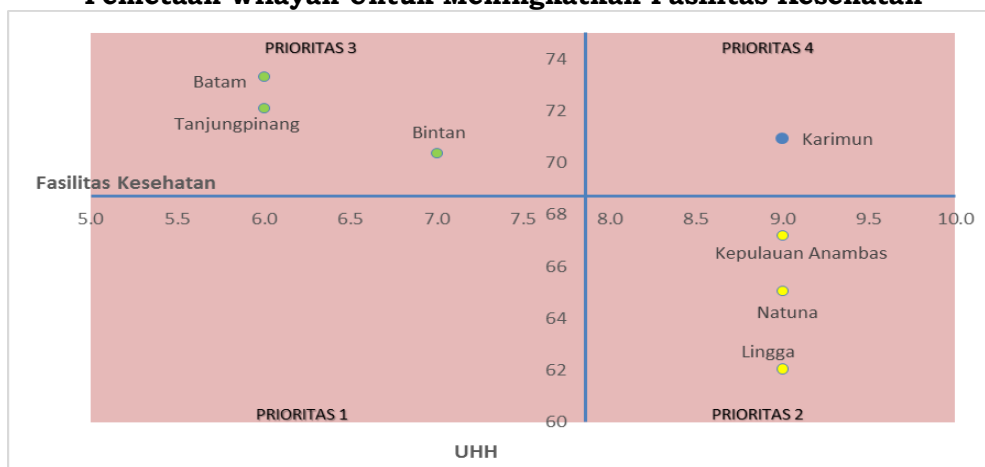
Prioritas 1	:	-
Prioritas 2	:	Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas
Prioritas 3	:	Kabupaten Karimun, Kota Batam dan Tanjungpinang
Prioritas 4	:	Kabupaten Bintan

Sumber : Olahan tahun 2021

B. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan

Indikator berikut yang disandingkan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dan fasilitas kesehatan pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin tinggi angka UHH menunjukkan kondisi yang baik dan angka jumlah fasilitas kesehatan semakin tinggi semakin baik. Pemberian skor jumlah fasilitas kesehatan berdasarkan jumlah penduduk per jumlah fasilitas kesehatan, semakin kecil jumlah penduduk per jumlah fasilitas kesehatan maka skornya semakin besar dan sebaliknya. Analisa kuadranya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.25.
Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan meningkatkan fasilitas kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.33.**Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan**

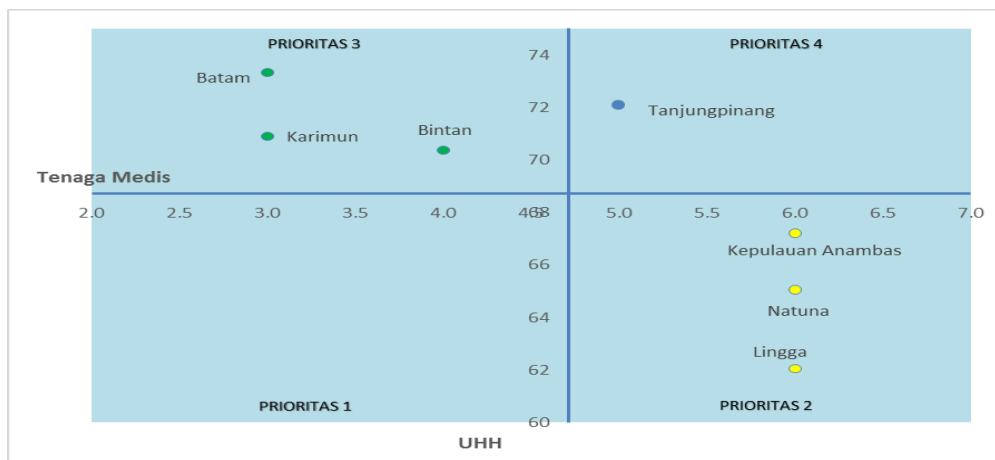
Prioritas 1	:	-
Prioritas 2	:	Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas
Prioritas 3	:	Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Tanjungpinang
Prioritas 4	:	Kabupaten Karimun

Sumber : Olahan tahun 2021.

C. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Jumlah Tenaga Kesehatan

Indikator yang disandingkan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dan tenaga medis pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin tinggi angka UHH menunjukkan kondisi yang baik dan semakin tinggi skor jumlah tenaga medis menunjukkan kondisi yang semakin baik, pemberian skor kesehatan berdasarkan jumlah penduduk per jumlah tenaga medis, semakin kecil jumlah penduduk per jumlah tenaga medis maka skornya semakin besar dan sebaliknya. Analisa kuadranya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.26.
Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Jumlah Tenaga Kesehatan



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan tenaga kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.34.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Jumlah Tenaga Kesehatan

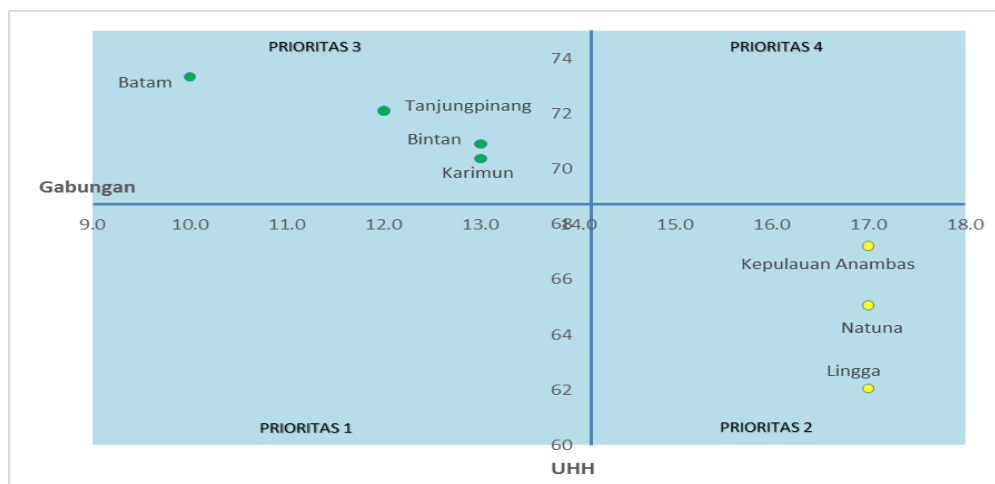
Prioritas 1	: -
Prioritas 2	: Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas
Prioritas 3	: Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Karimun
Prioritas 4	: Kota Tanjungpinang

Sumber : Olahan tahun 2021.

D. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan

Indikator yang disandingkan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indikator Gabungan (Penderita TBC, Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan) pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran, sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.27.
Pemetaan Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) dan Usia Harapan Hidup (UHH) dan Indikator Gabungan (Penderita TBC, Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan) di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.35.
Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Layanan Kesehatan

Prioritas 1	: -
Prioritas 2	: Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas
Prioritas 3	: Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Karimun
Prioritas 4	: -

Sumber : Olahan tahun 2021

4.3. Dimensi Ketenagakerjaan

4.3.1. Masalah Utama Dimensi Ketenagakerjaan

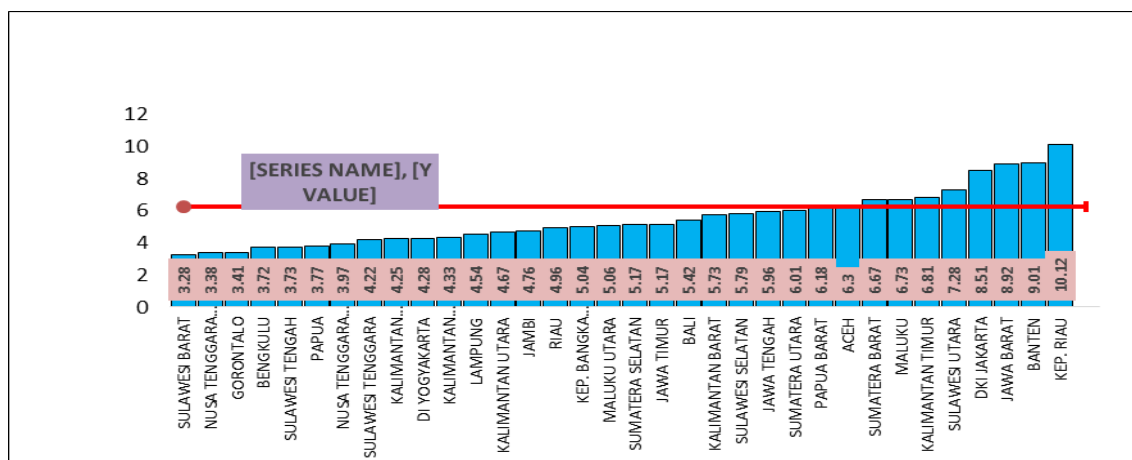
A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan yang tidak dapat dipisahkan. Pengangguran dapat mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk miskin dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Badan Pusat Statistik secara rutin melakukan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang digunakan sebagai data dasar dan sumber informasi untuk menilai sejauh mana perubahan terjadi di dalam pasar kerja. Salah satu indikator yang penting untuk dilihat dan dinilai dalam bidang ketenagakerjaan adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang kerap diartikan sebagai tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja (penawaran) tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia (permintaan) sehingga tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia.

Akses terhadap pekerjaan yang layak masih menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan pemenuhan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja khususnya pengangguran di Kepulauan Riau.

Pentingnya akses terhadap pekerjaan yang layak Kepulauan Riau dapat dilihat dari capaian indikator utama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 (Februari) sebesar 10,12 %, yang lebih besar sebanyak 3,86 poin dari rata-rata nasional sebesar 6,26%. Akibat nilai TPT yang tinggi ini telah menyebabkan Provinsi Kepulauan Riau berada di urutan tertinggi nomor satu secara nasional sebagaimana grafik berikut.

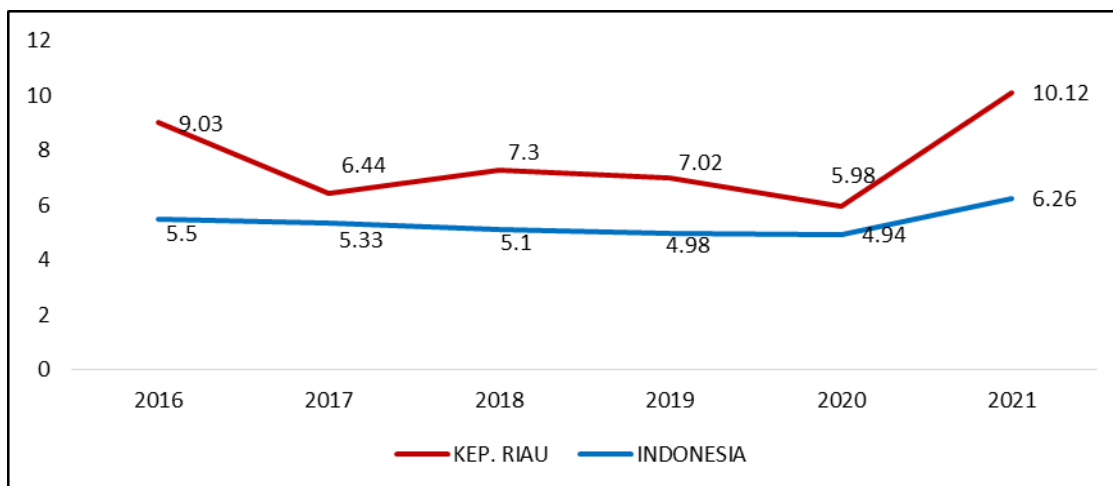
Grafik 4.28.
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepri terhadap
Provinsi Lain dan Nasional (Februari 2021)



Sumber : BPS, Olahan Tahun 2021.

Perkembangan TPT Kepulauan Riau pada tahun 2016-2021 mulanya pada tren membaik namun secara umum selalu berada di atas level nasional. TPT turun dari sebesar 9.03 % pada tahun 2016 menjadi sebesar 6.44% pada tahun 2017, 7.3% pada tahun 2018, 7.02% pada tahun 2019 dan 5.98% pada tahun 2020 hingga seterusnya naik kembali menjadi 10.12% pada tahun 2021. Laju penurunan TPT Kepri tertinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar 2,59 persen poin sedangkan laju peningkatan TPT terjadi pada tahun 2021 sebesar 3.86 persen poin.

Grafik 4.29.
Tren Pengangguran Terbuka Kepri Dan Nasional (2016-2021)

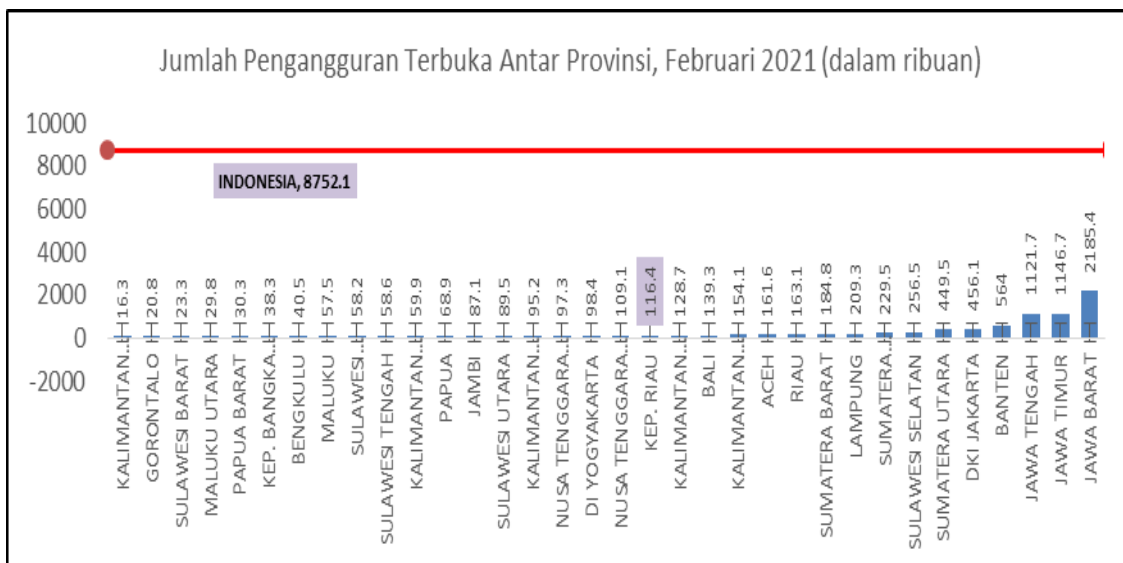


Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa rata-rata penurunan TPT selama kurun waktu tahun 2016–2021 sebesar minus 1.09 persen namun

lajunya semakin meningkat khususnya pada 1 tahun terakhir, dengan laju peningkatan sebesar 4.14 persen. Walaupun TPT Kepulauan Riau meningkat dan tertinggi secara nasional, namun secara absolut jumlah penganggurannya menduduki peringkat ke-enam belas setelah Bali dan Kalimantan Timur. Perbandingan jumlah pengangguran terbuka antar provinsi, sebagaimana grafik berikut.

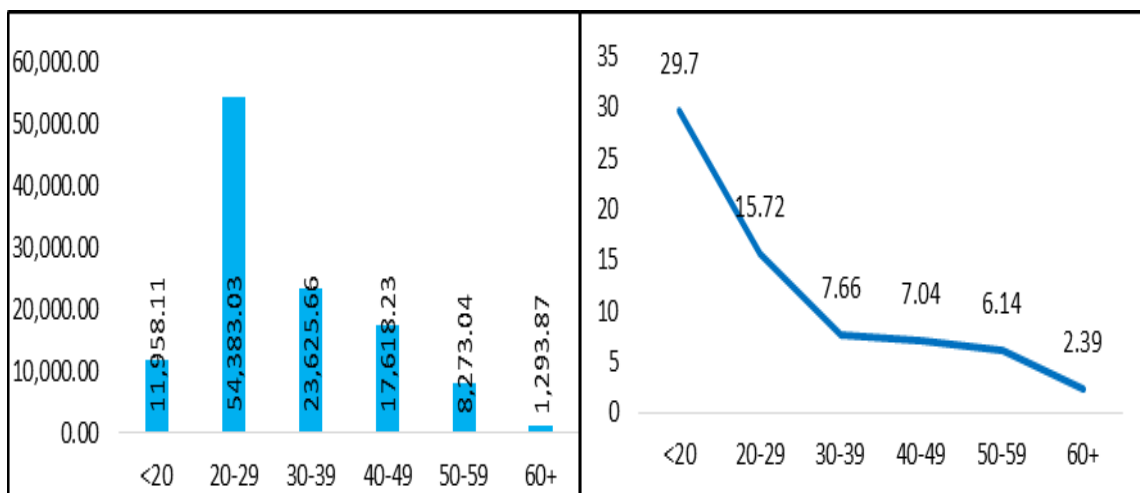
Grafik 4.30.
Jumlah Pengangguran Terbuka Antar Provinsi Februari 2021 (dalam ribuan)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Jumlah penganggur yang telah meningkat cukup tinggi tersebut apabila dilihat sebarannya dari kelompok umur yang ada maka paling banyak berada pada kelompok umur 20-29 tahun. Namun apabila dilihat dari persentase, maka tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau berada pada kelompok usia dibawah 20 tahun sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.

Grafik 4.31.
Jumlah Orang (dalam ribuan) dan Persentase Pengangguran Terbuka Menurut
Kelompok Umur di Kepulauan Riau, Agustus 2020



BPS, olahan tahun 2021.

Dilihat berdasarkan sebaran wilayah dimana dari data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan terlihat bahwa peningkatan pengangguran terbuka paling tinggi terjadi di wilayah perkotaan yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Tabel 4.36.
Perkembangan TPT Kabupaten/Kota (2017-2020)

	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
1	Natuna	4.07	4.05	3.82	4.10
2	Karimun	5.7	2.91	5.83	8.36
3	Kepulauan Anambas	5.18	2.89	3.21	3.44
4	Bintan	8.08	6.39	8.68	8.86
5	Lingga	3.23	3.96	4.35	4.41
6	Tanjungpinang	7.11	6.00	6.31	9.30
7	Batam	7.82	10.07	8.31	11.79

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dari perkembangan data tingkat pengangguran terbuka diatas ada dapat dianalisa keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan efektivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.37.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas,
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri

Perspekif					
Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Tingkat Pengangguran Terbuka	Perkembangan TPT Provinsi Kepri mencatatkan posisi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi lain bahkan melampaui rata-rata nasional.	Perkembangan TPT dalam kurun 2016-2021 pada mulanya ditandai dengan momentum positif sepanjang 2016-2019 dengan tren yang membaik. Sejak Pandemi COVID, TPT Kepri memburuk pada 2020 dan Februari 2021 mencapai puncaknya dengan melampaui tingkat nasional dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.	Peningkatan TPT sebagai dampak dari pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Kepri.	Perkembangan TPT Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri paling tinggi terdapat di wilayah perkotaan seperti Batam, Tanjungpinang, Karimun dan Bintan.	Perkembangan TPT di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri memperlihatkan kerentanan wilayah perkotaan lebih tinggi dibanding wilayah pedesaan terhadap gangguan ekonomi.

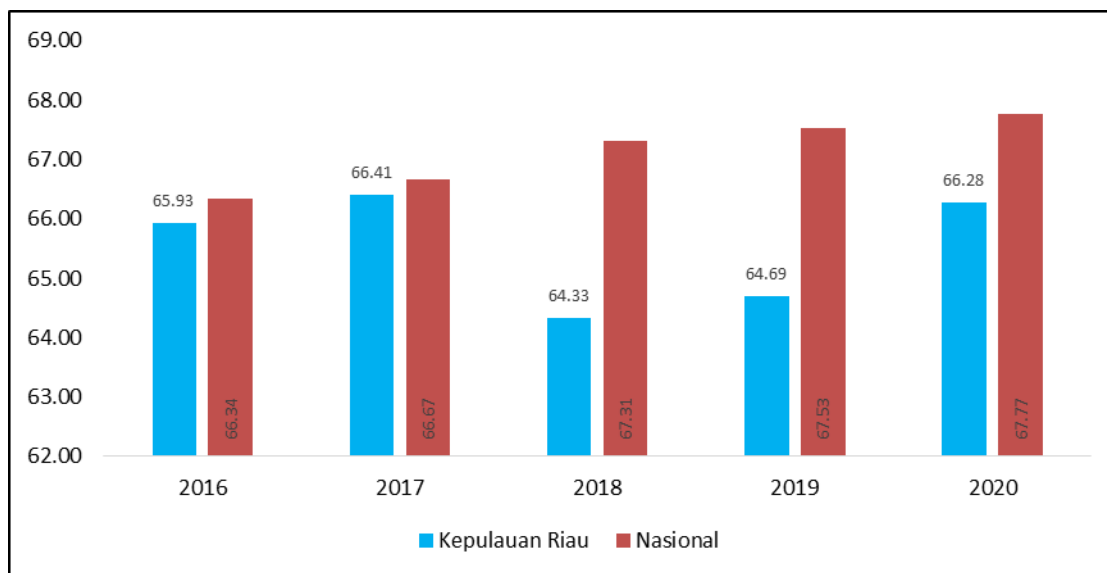
Sumber : olahan tahun 2021.

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Di lain sisi, perubahan pada dimensi ketenagakerjaan dapat berdampak terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat pada proporsi Angkatan kerja terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) atau yang disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menurut laporan BPS, perkembangan jumlah Angkatan Kerja (AK) di Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir telah mengalami pertumbuhan rata-rata 4,91 persen atau lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan 2010-2020 yang hanya sebesar 2,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, pertumbuhan AK lebih banyak berasal dari meningkatnya aktivitas penduduk setempat dibandingkan masuknya pekerja dari luar wilayah. Gambaran perkembangan TPAK Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada

grafik berikut, dimana menunjukkan adanya tren kenaikan selama kurun 2016-2020.

Grafik 4.32.
Tren TPAK Kepri dan Nasional periode 2016-2020 (Agustus)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Apabila dilihat dari sebarannya di tiap kabupaten/kota, perkembangan TPAK menunjukkan indikasi perubahan tertinggi terjadi pada daerah terluar dari provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Natuna, sedangkan wilayah TPAK yang paling rendah terjadi di Karimun. Indikasi TPAK yang cenderung tetap di tiap kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada grafik berikut menunjukkan bahwa secara umum peluang untuk berpartisipasi pada aktivitas ekonomi tidak terlalu berpengaruh secara signifikan pada TPAK.

Tabel 4.38.
**Perkembangan TPAK Provinsi Kepulauan Riau
di Kabupaten/Kota (2017-2020)**

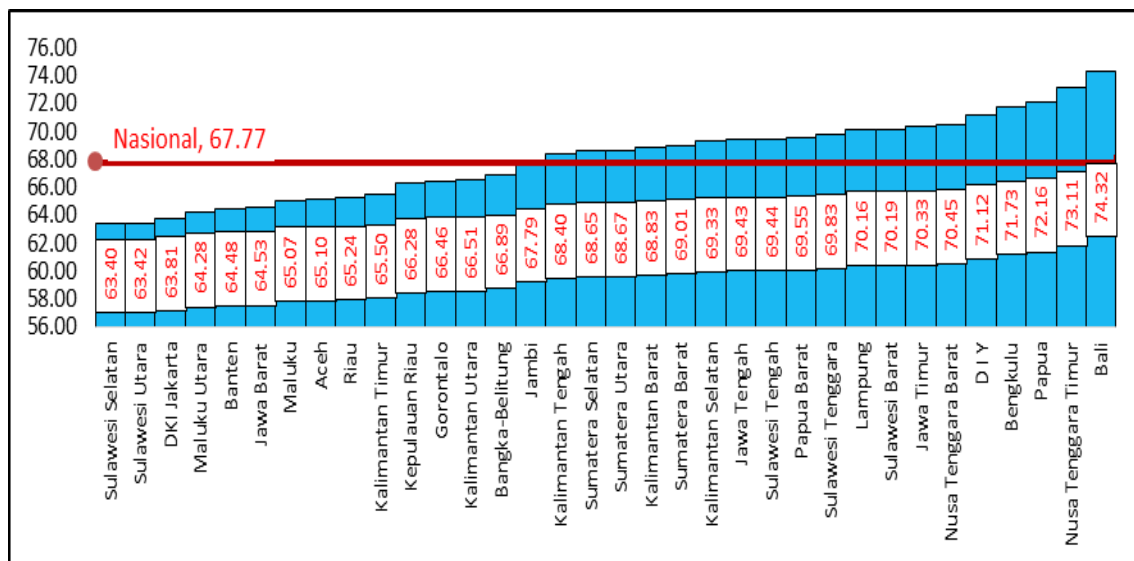
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Karimun	63.23	63.31	58.09	59.76
Bintan	62.19	62.34	61.98	61.28
Natuna	71.55	67.48	67.59	69.39
Lingga	63.87	66.37	65.34	64.56
Kepulauan Anambas	67.33	69.28	63.63	68.40
Batam	67.65	65.25	66.35	68.33
Tanjungpinang	64.56	62.19	62.90	62.56

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Sedangkan dilihat dari proporsi nasional, posisi relatif TPAK Kepulauan Riau pada level 66.28% masih di bawah level nasional 67.77%, dimana apabila dibandingkan secara relatif dengan provinsi-provinsi

lainnnya, maka Kepri berada pada urutan ke-24. Namun dengan peningkatan TPAK di tahun 2020 dari semula 64.69% (2019) menjadi 66.28%, langkah-langkah dan kebijakan dalam mengupayakan penciptaan lapangan kerja di Kepri semakin dirasa penting ditambah meningkatnya pengangguran pasca dampak pandemi COVID-19.

Grafik 4.33.
Posisi Relatif TPAK Kepulauan Riau terhadap Provinsi Lain dan Nasional (Agustus 2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dari perkembangan data tingkat partisipasi angkatan kerja diatas ada dapat dianalisa keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan Efektivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.39.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Posisi Relatif TPAK di Provinsi Kepri

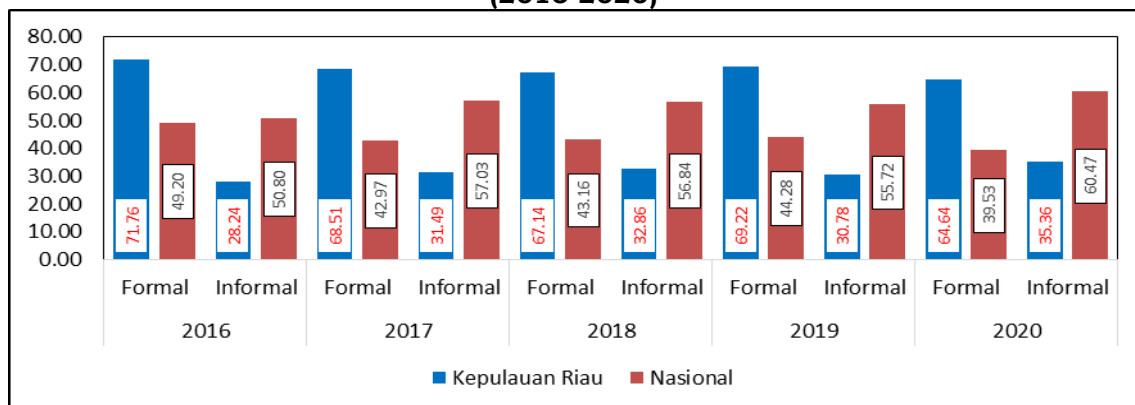
Indikator	Posisi Relatif	Antar Waktu	Perspekif		
			Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Perkembangan TPAK Provinsi Kepri berada pada urutan ke-24 di antara provinsi-provinsi lain dan relatif masih di bawah tingkat TPAK nasional.	Dari fluktuasi yang ada, TPAK Provinsi Kepri dalam kurun 2016-2020 diwarnai oleh tren kenaikan pada tiga tahun terakhir. Periode 2020 yang ditandai dengan pandemi COVID-19, kenaikan TPAK sebanyak 1.59 poin dari 64.69% menjadi 66.28%.	Kenaikan TPAK mencerminkan bertambahnya proporsi angkatan kerja untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.	Pertumbuhan TPAK Kabupaten Kota di Kepri paling tinggi terdapat di wilayah terluar seperti Anambas dan Natuna.	Perkembangan TPAK di Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kepri memperlihatkan gambaran ketersediaan angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi.

Sumber : olahan tahun 2021.

C. Komposisi Pekerja Formal dan Informal

Hal yang tidak kalah pentingnya di dalam upaya penanggulangan kemiskinan dari segi ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan komposisi sektor formal dan informal dari indikator pasar kerja Kepulauan Riau. Dengan terjadinya dampak pandemic COVID-19 yang telah memperlambat pertumbuhan ekonomi, dengan sendirinya berdampak terhadap pembentukan pasar kerja formal dan informal dimana fenomenanya sejalan dengan apa yang terjadi secara nasional yaitu terjadi peningkatan pada komposisi informal dan penurunan pada komposisi formal kendatipun secara absolut, peta komposisi sektor pekerjaan formal masih mendominasi.

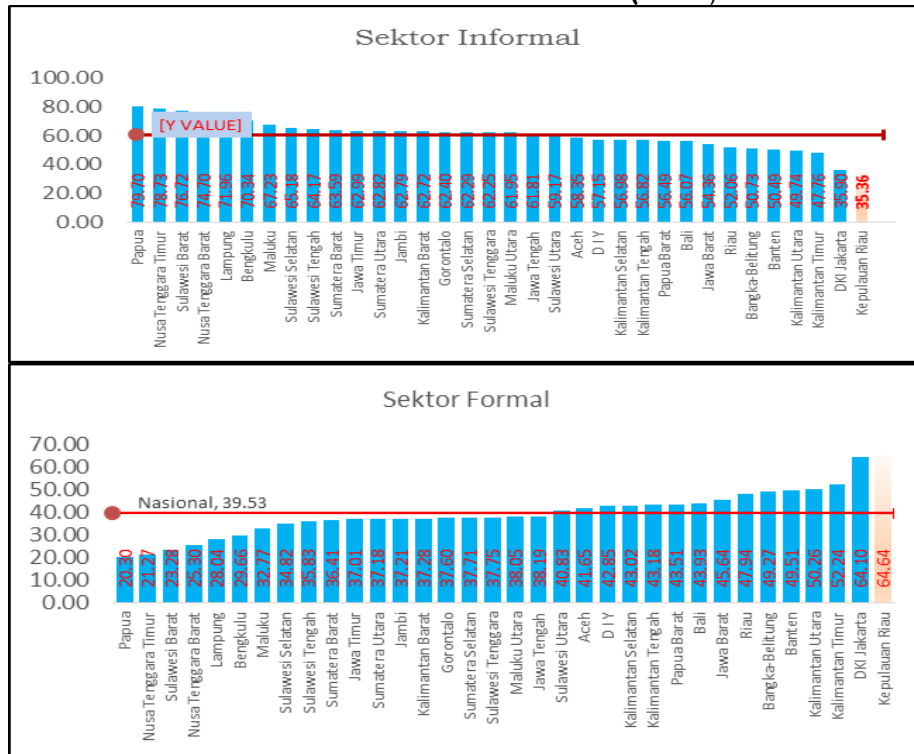
Grafik 4.34.
Perkembangan Komposisi Pekerja Formal-Informal, Kepri dan Nasional
(2016-2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Gambaran sektor formal dan informal antar daerah Provinsi dapat pula menjelaskan tentang perkembangan dan posisi relatif Kepulauan Riau dibandingkan dengan kondisi daerah provinsi lainnya dan nasional. Hal ini ditunjukkan melalui grafik berikut dimana untuk kategori sektor informal Kepulauan Riau menempati posisi terakhir di antara daerah provinsi lainnya. Sebaliknya untuk kedudukan pekerja sektor formal Kepulauan Riau berada di urutan teratas di antara daerah provinsi lainnya di Indonesia.

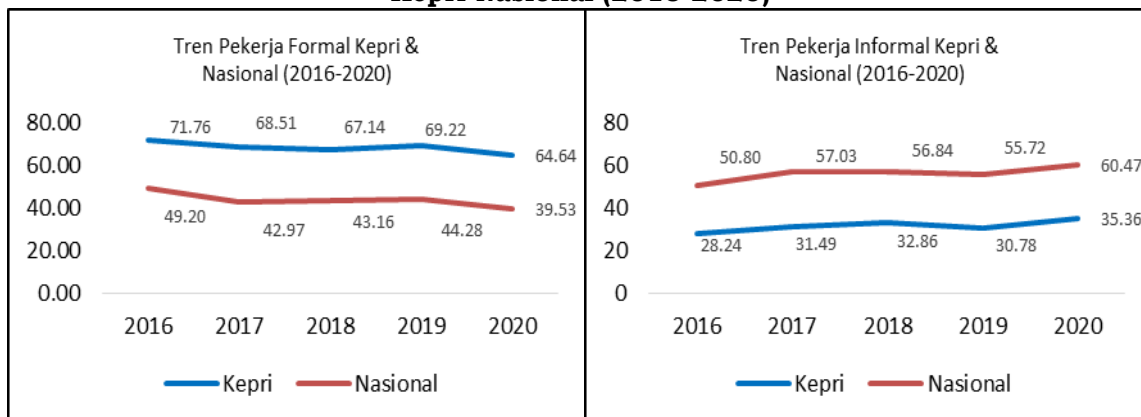
Grafik 4.35.
Perkembangan Pekerja Sektor Informal dan Formal Kepulauan Riau,
Relatif Provinsi dan Nasional (2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Capaian tertinggi dari sektor informal selama lima tahun terakhir ini merupakan dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sehingga menyebabkan menurunnya persentase pekerjaan yang tersedia. Hal ini seterusnya mendorong Angkatan kerja untuk menciptakan lapangan kerja sendiri yang mendorong pembentukan sektor pekerja informal menjadi bertambah pada tahun 2020. Grafik berikut menunjukkan bagaimana tren fluktuasi dalam sektor formal dan informal pada kurun 5 tahun terakhir pada tahun 2020 menunjukkan perilaku yang kontras satu sama lain, dengan sektor formal turun dan sebaliknya sektor informal naik.

Grafik 4.36.
Tren Fluktuasi Sektor Pekerja Formal dan Informal,
Kepri-Nasional (2016-2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Untuk mengetahui gambaran dari komposisi sektor pekerja formal dan informal di setiap kabupaten/kota relatif dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini. Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi pekerja sektor formal dan informal berkaitan dengan karakteristik daerah tersebut.

Tabel 4.40.
Perkembangan Persentase Pekerja Formal-Informal
Kabupaten/Kota, Relatif Provinsi dan Nasional (Agustus 2020)

Kabupaten/Kota	Formal	Informal
Karimun	53.47	46.53
Bintan	57.41	42.59
Natuna	43.88	56.12
Lingga	47.39	52.61
Kepulauan Anambas	45.39	54.61
Batam	70.52	29.48
Tanjungpinang	60.15	39.45
Nasional	39.53	60.47
Kepulauan Riau	64.59	35.41

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.¹

Konfigurasi sektor pekerjaan formal dan informal juga dapat dipengaruhi oleh gambaran perubahan kemiskinan. Artinya, perubahan pada komposisi penduduk miskin akan menyebabkan pula perubahan pada pekerjaan sektor formal dan informal. Hal ini dapat dilihat pada status bekerja penduduk miskin usia 15 tahun kabupaten/kota di Kepulauan Riau dalam kurun 2016-2020 sebagaimana yang ditunjukkan di dalam tabel berikut.

¹ Publikasi *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota (2016-2020)*.

Tabel 4.41.
Status Bekerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun
di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau (2016-2020)

Kabupaten/Kota/ Provinsi	Status bekerja														
	Formal					Informal					Tidak bekerja				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	31.63	28.11	31.76	33.16	30.02	19.49	23.00	18.42	18.41	30.02	48.88	48.89	49.82	48.42	55.18
Bintan	28.85	31.67	21.61	33.61	31.82	29.51	23.52	26.09	12.92	24.17	41.65	44.81	52.30	53.46	44.02
Natuna	17.51	12.39	7.97	8.60	12.85	57.18	34.28	49.10	51.94	30.69	25.31	53.33	42.93	39.46	56.46
Lingga	12.05	16.76	23.81	30.63	21.93	45.78	38.05	32.79	21.23	34.06	42.17	45.19	43.39	48.15	44.01
Anambas	17.31	9.30	11.06	11.34	19.33	31.68	42.96	35.66	46.43	32.45	51.01	47.74	53.28	42.23	48.21
Batam	35.29	35.00	23.03	39.47	20.17	26.66	17.23	23.19	20.56	26.99	38.05	47.77	53.78	39.98	52.84
Tanjungpinang	39.18	26.25	24.57	39.22	31.51	16.28	23.72	21.43	17.62	20.19	44.54	50.03	54.00	43.16	48.30
Kepulauan Riau	31.12	28.84	23.55	35.76	27.34	27.30	23.20	24.62	20.59	22.07	41.58	47.96	51.83	43.65	50.59

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Menurut laporan BPS, gambaran struktur formal dan informal Kepulauan Riau sebagaimana grafik di atas menunjukkan ketimpangan yang meningkat di antara wilayah penduduk perdesaan dan perkotaan. Misalkan, pada tahun 2020 dilaporkan persentase pekerja informal di perkotaan sebesar hanya 32,25 persen, sementara di perdesaan mencapai 61,92 persen. Pertumbuhan persentase pekerja informal di perdesaan yang mencapai 9,57 persen dari tahun 2019 juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pekerja informal perkotaan yang hanya 5,09 persen.

Meskipun menurunnya jumlah aktivitas ekonomi lebih banyak ditemukan di perkotaan, namun karakteristik penduduk yang lebih banyak bekerja pada sektor pertanian menyebabkan proporsi pekerja informal di perdesaan menjadi lebih besar. Gambaran seperti ini dapat dilihat pula pada informasi status bekerja penduduk miskin kabupaten/kota di Kepulauan Riau di atas, dimana untuk wilayah perkotaan seperti Kota Batam dan Tanjungpinang terjadi penurunan pada sektor formal dan sebaliknya peningkatan pada sektor informal, sedangkan untuk daerah-daerah terluar seperti Natuna dan Anambas berlaku keadaan sebaliknya yaitu fenomena pertambahan sektor formal dan penurunan sektor informal. Karimun, Bintan dan Lingga termasuk daerah yang memiliki karakteristik perkotaan dan pedesaan terlihat mengalami tren serupa seperti Batam dan Tanjungpinang.

Secara umum, penurunan persentase tingkat tidak bekerja di kalangan penduduk miskin terjadi di Kabupaten Lingga dan Bintan sedangkan daerah-daerah lainnya mengalami kenaikan pada persentase tingkat tidak bekerja dari kalangan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau secara umum meskipun terdapat tren fluktuatif namun terlihat pada kurun 2016-2020, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang berstatus tidak bekerja hampir secara keseluruhan mengalami tren kenaikan termasuk pada tahun 2020 ketika berlaku pandemi COVID-19. Meningkatnya indikator ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat dari kalangan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja ini bukan saja mencakup mereka yang memang berada dalam kelompok Angkatan Kerja (pengangguran) namun juga termasuk kalangan yang seharusnya berada dalam komponen Bukan Angkatan Kerja. Sebagaimana

dirilis oleh BPS, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

Dari perkembangan data perkembangan komposisi pekerja formal-informal diatas ada dapat dianalisa keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan Efektivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.42.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi
Komposisi Pekerja Formal-Informal di Provinsi Kepri

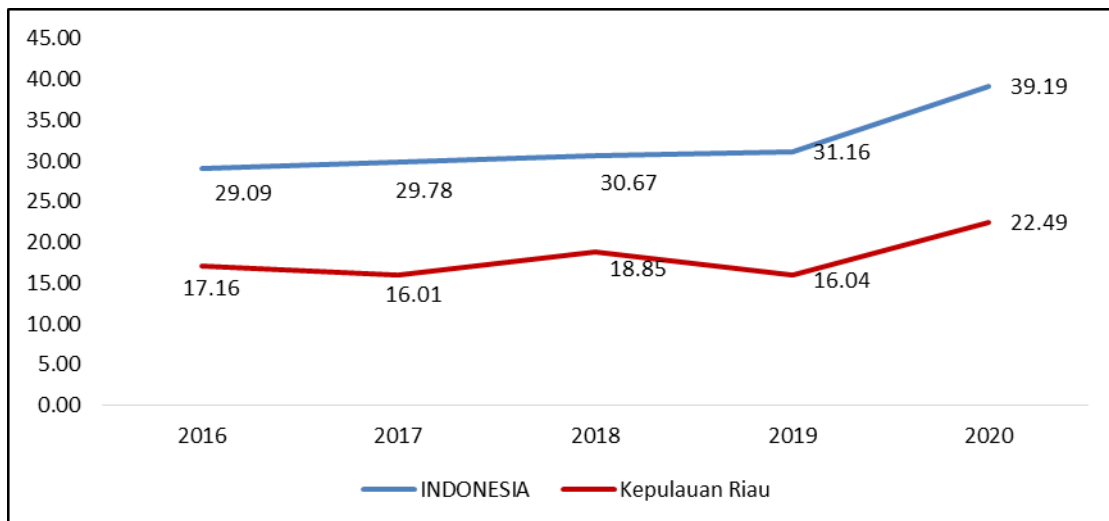
Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Perkembangan Komposisi Pekerja Formal - Informal	Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, perkembangan komposisi pekerja formal-informal menunjukkan Kepri pada tingkat persentase tertinggi pada tingkat komposisi pekerja formal, sebaliknya pada tingkat persentase terendah pada tingkat komposisi pekerja informal.	Perkembangan komposisi pekerja formal-informal Kepri pada kurun 2016-2020 menunjukkan pola yang menurun pada klsuter formal, sebaliknya meningkat pada kluster informal. Periode 2020 dimana terjadi pandemi COVID-19, komposisi pekerja informal mengalami peningkatan, sebaliknya komposisi formal menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2019.	Komposisi pekerja formal-informal menunjukkan potensi penyediaan dan pengisian lapangan kerja.	Perubahan komposisi pekerja sektor formal dan informal memperlihatkan fenomena yang kontras, dimana untuk daerah perkotaan seperti Tanjungpinang dan Batam terjadi peningkatan sektor informal dan penurunan sektor formal, sedangkan hal sebaliknya terjadi di daerah-daerah terluar seperti Natuna dan Anambas.	Perubahan komposisi pekerja sektor formal dan informal Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau menunjukkan dinamika struktur pasar kerja akibat pengaruh gangguan ekonomi dan pola transisi yang ditimbulkan.

Sumber : olahan tahun 2021.

D. Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam

Perubahan pada aspek ketenagakerjaan akibat perlambatan ekonomi pasca pandemic COVID-19 turut diperlihatkan pada penurunan jumlah jam kerja yang pada saat normal lebih dari separuh penduduk Kepulauan Riau bekerja dengan durasi lebih dari 48 jam per minggu. Sedangkan pada Agustus 2020, mayoritas dari penduduk Kepri (38.06%) bekerja di antara 40 hingga 48 jam per minggu. Pandemi COVID-19 yang mengharuskan pembatasan fisik telah menyebabkan penurunan jam kerja yang seterusnya berdampak pada produktivitas masyarakat sehari-hari. Gambaran ini dapat dilihat pada grafik berikut.

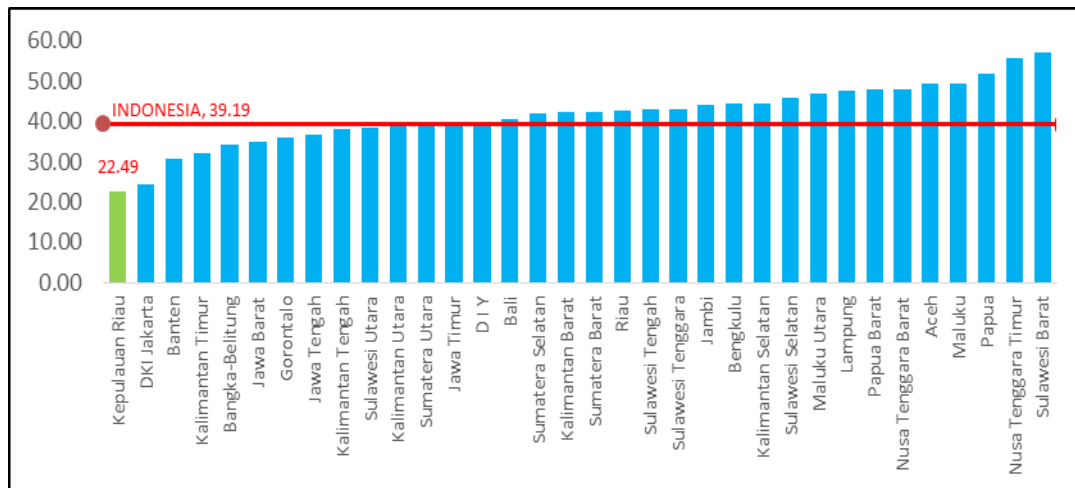
Grafik 4.37.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam, Agustus 2020



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Gambaran persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam relatif antar provinsi di Indonesia dapat pula memperlihatkan keterbandingan Kepulauan Riau dengan provinsi lainnya, sebagaimana diperlihatkan di dalam grafik berikut.

Grafik 4.38.
Perkembangan Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam, Relatif
Antar Provinsi, 2020



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Posisi relatif Kepulauan Riau digambarkan oleh grafik di atas merupakan daerah yang mengalami penurunan terendah dalam hal persentase penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam kerja. Hal ini menandakan Kepulauan Riau mengalami kondisi yang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya walaupun secara umum terjadi kenaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (lihat tabel berikut).

Tabel 4.43.
Perkembangan Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang
Dari 35 Jam Kerja, Relatif Antar Provinsi

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
Aceh	36.16	39.37	40.55	44.50	49.52
Sumatera Utara	33.45	31.57	33.51	33.09	39.37
Sumatera Barat	34.97	36.45	34.99	37.43	42.26
Riau	37.92	36.33	37.70	34.99	42.80
Jambi	38.44	40.95	37.64	39.12	44.13
Sumatera Selatan	35.23	36.05	38.52	37.92	42.08
Bengkulu	32.28	37.14	37.71	39.41	44.35
Lampung	34.46	38.78	38.26	42.29	47.59
Bangka-Belitung	25.45	27.57	27.49	33.35	34.14
Kepulauan Riau	17.16	16.01	18.85	16.04	22.49
DKI Jakarta	12.24	11.76	13.33	12.12	24.24
Jawa Barat	21.11	23.18	22.19	24.10	34.88
Jawa Tengah	27.49	27.83	29.63	29.26	36.65
D I Y	29.71	27.66	30.47	33.02	39.55

Jawa Timur	30.87	30.06	31.67	32.23	39.50
Banten	19.97	18.16	19.71	18.90	30.85
Bali	22.99	24.60	25.06	26.68	40.51
Nusa Tenggara Barat	36.39	39.40	47.79	41.98	48.16
Nusa Tenggara Timur	46.55	44.79	48.55	46.44	55.88
Kalimantan Barat	32.97	38.62	37.21	40.29	42.20
Kalimantan Tengah	33.40	32.61	32.97	31.74	38.19
Kalimantan Selatan	33.10	36.69	36.59	38.42	44.43
Kalimantan Timur	25.27	23.98	23.81	25.89	32.04
Kalimantan Utara	17.05	31.10	33.25	33.64	38.92
Sulawesi Utara	27.92	28.71	28.62	25.67	38.50
Sulawesi Tengah	35.36	38.57	40.41	39.41	43.04
Sulawesi Selatan	37.75	38.65	38.06	38.98	45.83
Sulawesi Tenggara	36.45	38.89	39.68	40.77	43.05
Gorontalo	28.35	33.30	30.47	31.20	35.89
Sulawesi Barat	44.84	51.52	51.00	51.43	57.00
Maluku	38.41	33.20	33.15	36.55	49.55
Maluku Utara	31.93	35.16	33.75	34.96	46.80
Papua Barat	38.36	38.62	32.15	31.74	48.02
Papua	39.78	42.64	42.94	45.22	51.73

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dari perkembangan data penduduk yang bekerja di atas 35 jam diatas dapat dianalisa keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan Efektivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.44.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Penduduk Yang Bekerja Kurang Dari 35 Jam di Provinsi Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam	Perkembangan Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Kepri menunjukkan persentase penurunan paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.	Dalam perkembangan antar waktu pada kurun 2016-2020, perubahan pada Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam di Kepri relatif rendah. Namun, indikator ini mengalami kenaikan cukup tajam pada tahun 2020 akibat berlakunya pandemic COVID-19 yang disruptif	Perubahan pada Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam mencerminkan potensi terdampaknya produktivitas masyarakat akibat gangguan ekonomi.	n.a	Perkembangan Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam menunjukkan komposisi jam kerja sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi.

Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

E. Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha

Kenaikan pengangguran terbuka di Kepulauan Riau secara bersamaan dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja telah menunjukkan tantangan yang semakin besar dalam mengupayakan penciptaan lapangan kerja terutama sejak pandemi COVID-19 yang telah mendisrupsi banyak sektor dalam perekonomian. Keterbatasan industri dalam menyerap peningkatan pasokan tenaga kerja dalam bentuk TPAK perlu mempertimbangkan opsi alternatif dalam menumbuhkan perekonomian, salah satunya melalui kebijakan penyaluran kredit usaha. Dengan menggalakkan penyaluran kredit usaha, ekonomi masih bisa tumbuh terutama pada kalangan sektor masyarakat berpendapatan rendah yang banyak bergerak di sektor UMKM atau informal. Hal ini dengan sendirinya akan menimbulkan dampak positif bagi upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Data berikut ini mencerminkan sejauh mana perkembangan penyaluran kredit usaha di Kepulauan Riau.

Tabel 4.45
Perkembangan Persentase Penyaluran Kredit Usaha
Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau (2015-2020)

No	Kabupaten/Kota/Prov	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karimun	3.34	1.89	13.86	13.58	17.26	11,48
2	Bintan	10.28	18.78	31.83	23.33	18.48	25,72
3	Natuna	17.92	19.72	31.63	30.7	21.44	21,64
4	Lingga	11.27	15.42	15.57	24.98	16	15,54
5	Kepulauan Anambas	14.86	16.95	13.18	16.8	11.02	10,80
6	Batam	1.49	0.77	16.93	23.25	19.32	21,88
7	Tanjungpinang	4.51	8.89	31.59	15.97	17.86	25,33
8	Kepulauan Riau	3.96	4.59	19.56	21.81	18.68	66,28

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Berdasarkan data di atas, ada tren peningkatan yang signifikan dari persentase rumah tangga yang memperoleh kredit usaha khususnya pada tahun 2020 dimana persentase mencapai 66,28 %, jauh melebihi persentase dari tahun-tahun sebelumnya dalam kurun 2015-2020. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang disertai dengan masalah pengangguran, penyaluran kredit usaha dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian termasuk bagi penduduk miskin yang membutuhkan bantuan permodalan untuk memulai usaha khususnya di sektor UMKM.

Tabel 4.46.

**Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas,
Relevansi Perkembangan Persentase Penyaluran Kredit Usaha 2015-2020**

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Perkembangan Persentase Penyaluran Kredit Usaha	n.a	Perkembangan persentase penyaluran kredit usaha di Kepulauan Riau dalam kurun 2015-2020 secara umum cenderung meningkat dengan persentase tertinggi pada tahun 2020.	Perkembangan persentase penyaluran kredit usaha di Kepulauan Riau berdampak terhadap upaya memperbaiki kesejahteraan penduduk miskin melalui sektor UMKM.	Perkembangan persentase penyaluran kredit usaha Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau paling tinggi di Kab. Bintan, menyusul Tanjungpinang, Batam, Natuna, Lingga, Karimun, dan Anambas.	Perkembangan persentase penyaluran kredit usaha Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau dalam kurun 2015-2020 memperlihatkan tidak meratanya peranan intermediasi lembaga keuangan antar daerah.

Sumber : olahan tahun 2021.

4.3.2. Prioritas Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan

Berdasarkan sub bahasan permasalahan dimensi ketenagakerjaan, maka prioritas intervensi dimensi ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.47.

Prioritas Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan

No	Indikator	Keterangan
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kepri di bawah Nasional
2	Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha	Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha masih rendah
3	Status Bekerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau	Status Bekerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau relatif masih tinggi

Sumber : Olahan Penelitian, 2021.

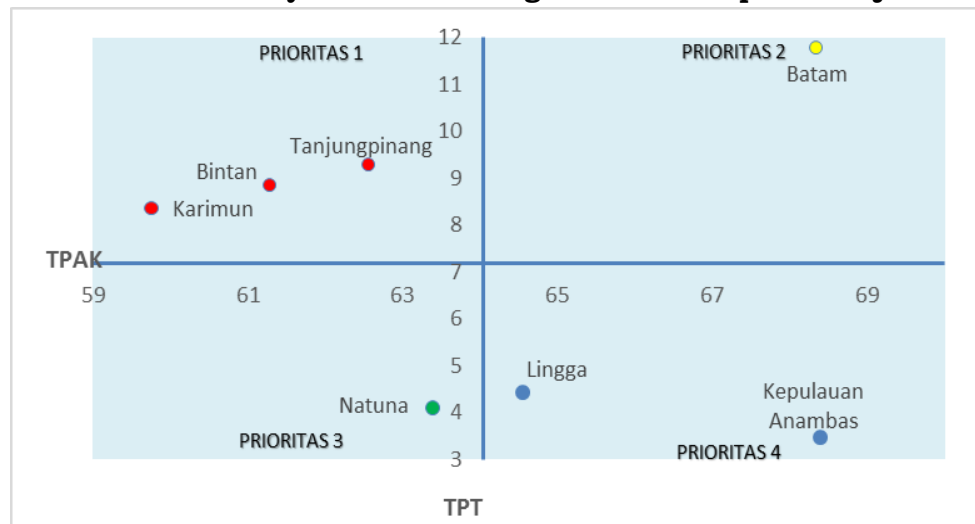
4.3.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Ketenagakerjaan

A. Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja

Indikator pertama yang disandingkan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, semakin

kecil TPT menunjukkan kondisi yang baik. Sedangkan TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, semakin tinggi angka TPAK menunjukkan kondisi yang baik. Analisa kuadranya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.39.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang TPAK di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
 Prioritas 2 : Kab/kota yang TPAK di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
 Prioritas 3 : Kab/kota yang TPAK di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
 Prioritas 4 : Kab/kota yang TPAK di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.48.
Pemetaan Wilayah Intervensi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja

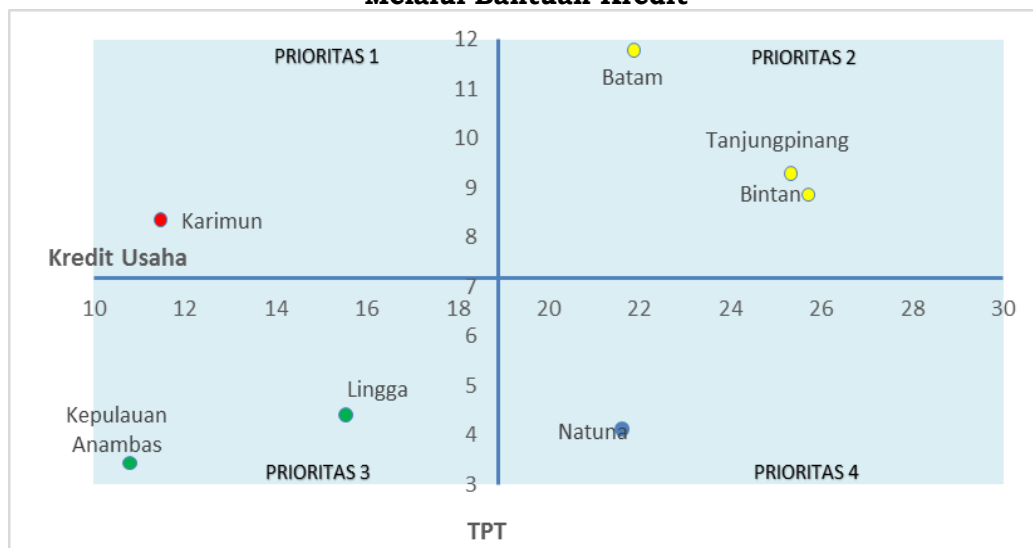
Prioritas 1	: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang
Prioritas 2	: Kota Batam
Prioritas 3	: Kabupaten Natuna
Prioritas 4	: Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas

Sumber : Olahan tahun 2021.

B. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Melalui Bantuan Kredit.

Indikator yang disandingkan adalah tingkat pengangguran terbuka dan persentase rumah tangga yang pernah menerima kredit usaha pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin kecil TPT menunjukkan kondisi yang baik sedangkan semakin besar Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha semakin baik dalam pengentasan kemiskinan. Analisa kuadranya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.40.
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Melalui Bantuan Kredit



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui bantuan kredit di

Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.49.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Melalui Bantuan Kredit.

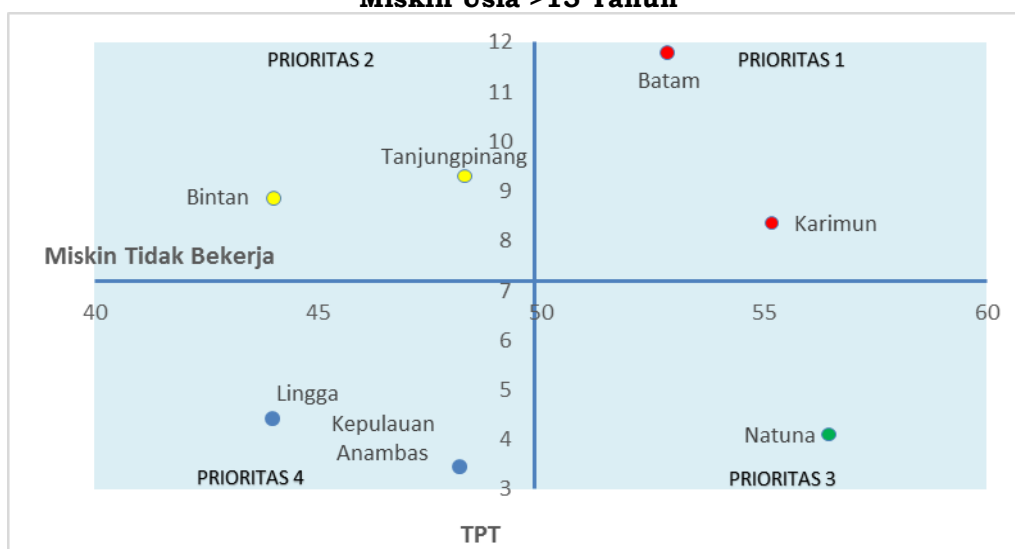
Prioritas 1	: Kabupaten Karimun
Prioritas 2	: Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
Prioritas 3	: Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga
Prioritas 4	: Kabupaten Natuna

Sumber : Olahan tahun 2021.

C. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun.

Indikator yang disandingkan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin kecil TPT dan Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja makin menunjukkan kondisi yang baik. Analisa kuadranya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.41.
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun



Sumber : Olahan tahun 2021.

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.50.
Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun

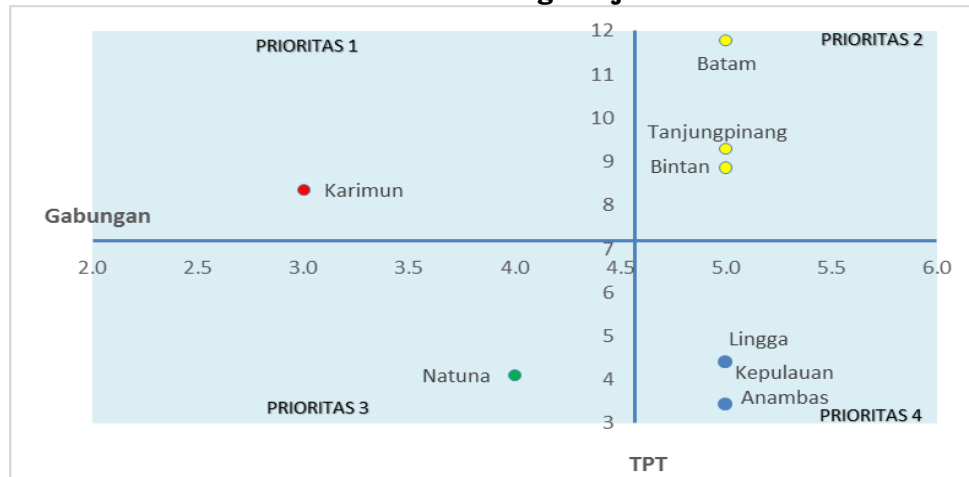
Prioritas 1	: Kota Batam dan Kabupaten Karimun
Prioritas 2	: Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang
Prioritas 3	: Kabupaten Natuna
Prioritas 4	: Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga

Sumber : Olahan tahun 2021

D. Indikator Gabungan.

Indikator yang disandingkan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indikator Gabungan (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase rumah tangga yang pernah menerima kredit usaha dan penduduk miskin usia >15 tahun yang tidak bekerja) pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran, sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.42.
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan
Dimensi Ketenagakerjaan



Sumber : Olahan tahun 2021.

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indikator Gabungan (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), persentase rumah tangga yang pernah menerima kredit usaha dan penduduk miskin usia >15 tahun yang tidak bekerja) di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.51.
Prioritas Wilayah Pemetaan Tingkat Pengangguran Terbuka dan
Indikator Gabungan

Prioritas 1	: Kabupaten Karimun
Prioritas 2	: Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
Prioritas 3	: Kabupaten Natuna
Prioritas 4	: Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga

Sumber : Olahan tahun 2021

4.4. Dimensi Infrastruktur Dasar

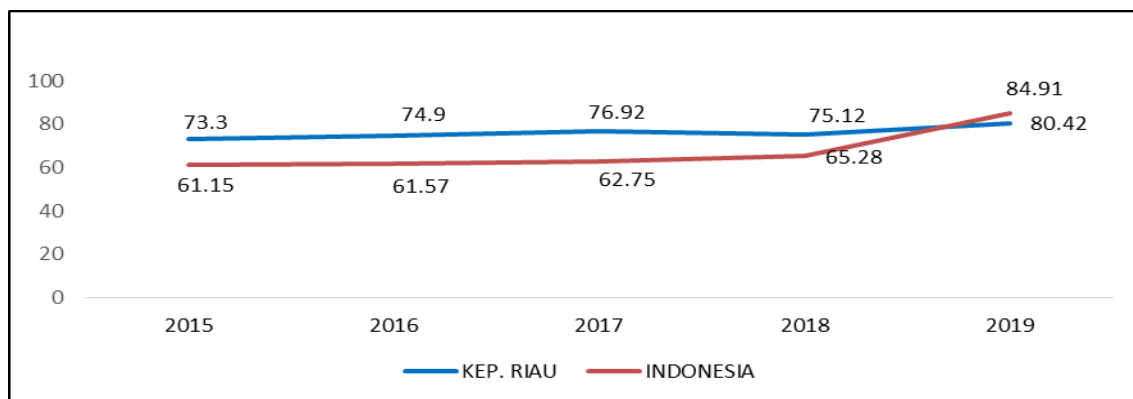
4.4.1. Permasalahan Dimensi Infrastruktur Dasar

A. Persentase Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak

Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar (air minum layak, sanitasi layak dan elektrifikasi) merupakan bagian dari upaya penting dari kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu secara serius mengupayakan upaya pemenuhan akses untuk semua lapisan masyarakat terutama dalam mengurangi beban kelompok masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan melalui peningkatan akses layanan infrastruktur dasar tersebut dapat mendorong masyarakat semakin sejahtera.

Dari sudut pandang literatur, sanitasi merupakan kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan air minum yang bersih serta pengolahan dan pembuangan kotoran manusia dan air limbah. Oleh karena itu, gambaran keberadaan infrastruktur dasar yang dapat dinikmati oleh penduduk di Kepulauan Riau terutama dari kalangan penduduk miskin dapat mencerminkan sejauh mana penanggulangan kemiskinan telah memberi dampak terhadap perubahan kesejahteraan di bidang infrastruktur dasar. Berikut ini ditunjukkan gambaran tentang bagaimana 40% penduduk kalangan bawah di Kepulauan Riau berkaitan dengan akses mereka terhadap layanan sumber air minum layak dalam kurun 2015-2019.

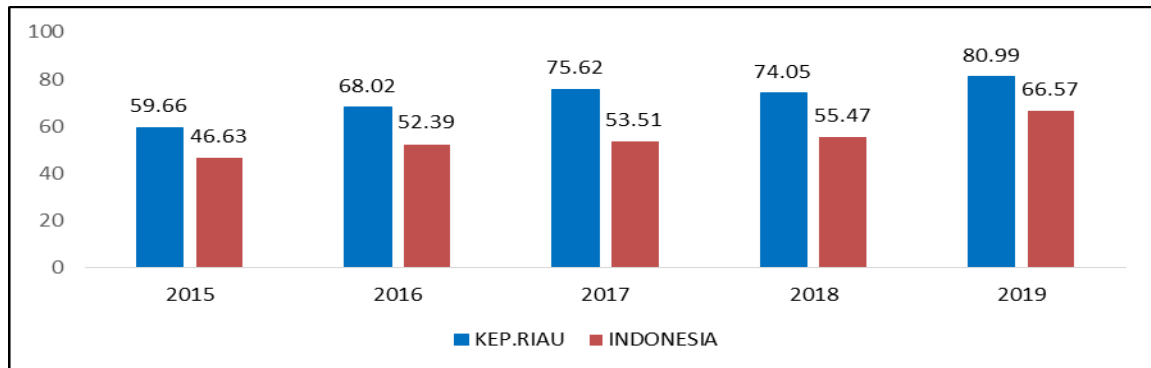
Grafik 4.43.
Persentase Akses 40% RT Kalangan Bawah Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak (2015-2019)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dari grafik di atas dapat diketahui terjadi peningkatan dalam akses terhadap Layanan Sumber Layak Air Minum dalam kurun 2015-2019 dari kelompok masyarakat kalangan bawah. Hal yang sama juga terjadi pada akses 40% Rumah Tangga Terbawah terhadap layanan sanitasi layak di Kepulauan Riau. Besaran 40% kelompok masyarakat merujuk pada ukuran Bank Dunia yang membagi kelompok masyarakat menjadi tiga bagian, yaitu 40% kelompok masyarakat bawah atau berpendapatan rendah (di dalamnya terdapat penduduk miskin), 40% kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan 20% kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

Grafik 4.44.
Persentase Akses 40% Bawah RT Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak (2015-2019)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Sanitasi yang layak merupakan isu yang penting dalam penanggulangan kemiskinan mengingat terpenuhinya akses tersebut akan berdampak pada terciptanya pola hidup yang sehat dan terhindar dari penyakit. Dari pemenuhan tersebut artinya 40% Rumah Tangga Terbawah dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan layak.

Dari data di atas, terlihat bahwa kondisi capaian akses 40% Rumah Tangga Bawah terhadap sanitasi layak dalam kurun 2015-2019 relatif baik jika dibandingkan dengan capaian nasional. Untuk melihat gambaran yang lebih utuh, grafik berikut memaparkan sebaran infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota khususnya air layak dan penggunaan jamban baik untuk sendiri maupun bersama.

Tabel 4.52.
Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	59.01	86.21	63.06	48.38	69.55
Bintan	44.55	82.21	38.16	52.25	59.86
Natuna	67.26	69.32	55.13	63.59	70.76
Lingga	54.13	90.16	61.47	67.8	48.02
Anambas	9.62	64.18	0	49.12	11.73
Batam	98	87.87	79.11	83.17	91.43
Tanjungpinang	62.88	91.26	70.56	80.24	80.31
KEPRI	76.47	87.22	68.28	73.31	77.83

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dalam hal akses terhadap penggunaan air layak oleh kalangan rumah tangga miskin secara umum kondisi membaik tergambar di daerah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang dengan peningkatan persentase yang signifikan dalam periode 2016-2020. Daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian adalah daerah terluar atau yang kurang cepat dalam mendorong perubahan infrastruktur seperti Anambas yang persentasenya menurun menjadi 11,73% RT miskin pada tahun 2020 dari semula 49,12% RT miskin yang bisa menikmati air layak di tahun sebelumnya. Begitu juga Lingga yang menurun menjadi 49.02% pada tahun 2020 dari tingkat sebelumnya sebesar 67.8 % pada tahun 2019. Daerah lainnya seperti Bintan, Natuna dan Karimun walaupun meningkat dari persentase satu tahun sebelumnya tetap perlu ditingkatkan aksesnya mengingat dampak dari penambahan RT miskin akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sedangkan dari segi penggunaan jamban sendiri atau bersama, secara umum terdapat kemajuan namun perlu komitmen nyata untuk menuntaskan sisa persentase RT Miskin yang belum mendapatkan akses tersebut.

Tabel 4.53.
Persentase RT Miskin Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	86.94	91.96	94.73	97.83	85.01
Bintan	65.71	97.32	96.34	94.05	95.06
Natuna	53.88	77.44	82.88	69.02	70
Lingga	78.24	83.99	75.88	73.18	77.3
Anambas	83.87	100	100	97.55	100
Batam	95.81	96.2	100	100	99.99
Tanjungpinang	99.92	92.73	95.93	100	100
KEPRI	89.52	93.48	95.71	95.39	94.59

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Berdasarkan laporan Susenas Maret 2020, BPS melansir keterangan tentang sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga miskin dimana paling banyak menggunakan air yang berasal dari air isi ulang, yaitu sebesar 41,40 persen. Selanjutnya, sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah sumur tak terlindung, sumur terlindung dan leding, yaitu masing-masing sebesar 6,89 persen, 24,37 persen dan 12,80 persen. Singkat kata, kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum pada rumah tangga miskin sudah cukup baik.

Selain itu, apabila dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas buang air besar, tampak bahwa persentase rumah tangga dengan menggunakan jamban sendiri sebesar 88,92 persen dan yang menggunakan jamban bersama sebesar 4,41 persen. Yang perlu menjadi catatan adalah masih ada rumah tangga miskin yang tidak memiliki jamban, yaitu sebesar 6,67 persen.

Dari perkembangan data sumber air minum dan sanitasi layak diatas dapat dianalisa keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan Efektivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.54.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Akses Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak di Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Air Minum dan Sanitasi Layak	Perkembangan persentase akses penduduk miskin terhadap air minum dan sanitasi layak di Kepulauan Riau relatif lebih baik dibandingkan dengan capaian secara nasional.	Perkembangan persentase akses penduduk miskin terhadap air minum dan sanitasi layak di Kepulauan Riau 2015-2020 secara umum cenderung meningkat. Namun secara khusus pada periode 2020 dimana terjadi pandemi COVID-19, indikator persentase akses penduduk miskin terhadap air layak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase akses penduduk miskin terhadap penggunaan jamban sendiri/bersama yang turun.	Perkembangan persentase akses penduduk miskin terhadap air minum dan sanitasi layak di Kepulauan Riau berdampak terhadap kesejahteraan penduduk miskin.	Perkembangan persentase akses penduduk miskin terhadap air minum dan sanitasi layak di Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau secara umum dalam kurun 2016-2020 membaik namun secara relatif memburuk di Anambas dan Lingga khususnya berkaitan dengan akses terhadap air yang layak, sedangkan untuk penggunaan jamban relatif baik di seluruh kabupaten/kota	Pemenuhan capaian akses terhadap air dan sanitasi layak di kabupaten/kota di Kepri memperlihatkan masih tidak seragamnya kapasitas dan kapabilitas penanganan antar daerah kabupaten/kota.

Sumber : olahan tahun 2021.

B. Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak

Untuk melihat gambaran yang lebih utuh, tabel berikut memaparkan sebaran infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota khususnya air layak dan penggunaan jamban baik untuk sendiri maupun bersama.

Tabel 4.55.
Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	59.01	86.21	63.06	48.38	69.55
Bintan	44.55	82.21	38.16	52.25	59.86
Natuna	67.26	69.32	55.13	63.59	70.76
Lingga	54.13	90.16	61.47	67.8	48.02
Anambas	9.62	64.18	0	49.12	11.73
Batam	98	87.87	79.11	83.17	91.43
Tanjungpinang	62.88	91.26	70.56	80.24	80.31
KEPRI	76.47	87.22	68.28	73.31	77.83

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dalam hal akses terhadap penggunaan air layak oleh kalangan rumah tangga miskin secara umum kondisi membaik tergambar di daerah perkotaan seperti Batam dan Tanjungpinang dengan peningkatan persentase yang signifikan dalam periode 2016-2020. Daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian adalah daerah terluar atau yang kurang cepat dalam mendorong perubahan infrastruktur seperti Anambas yang persentasenya menurun menjadi 11,73% RT miskin pada tahun 2020 dari semula 49,12% RT miskin yang bisa menikmati air layak di tahun sebelumnya. Begitu juga Lingga yang menurun menjadi 49.02% pada tahun 2020 dari tingkat sebelumnya sebesar 67.8 % pada tahun 2019. Daerah lainnya seperti Bintan, Natuna dan Karimun walaupun meningkat dari persentase satu tahun sebelumnya tetap perlu ditingkatkan aksesnya mengingat dampak dari penambahan RT miskin akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020. Sedangkan dari segi penggunaan jamban sendiri atau bersama, secara umum terdapat kemajuan namun perlu komitmen nyata untuk menuntaskan sisa persentase RT Miskin yang belum mendapatkan akses tersebut.

Tabel 4.56.
Persentase RT Miskin Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	86.94	91.96	94.73	97.83	85.01
Bintan	65.71	97.32	96.34	94.05	95.06
Natuna	53.88	77.44	82.88	69.02	70
Lingga	78.24	83.99	75.88	73.18	77.3
Anambas	83.87	100	100	97.55	100
Batam	95.81	96.2	100	100	99.99
Tanjungpinang	99.92	92.73	95.93	100	100
KEPRI	89.52	93.48	95.71	95.39	94.59

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

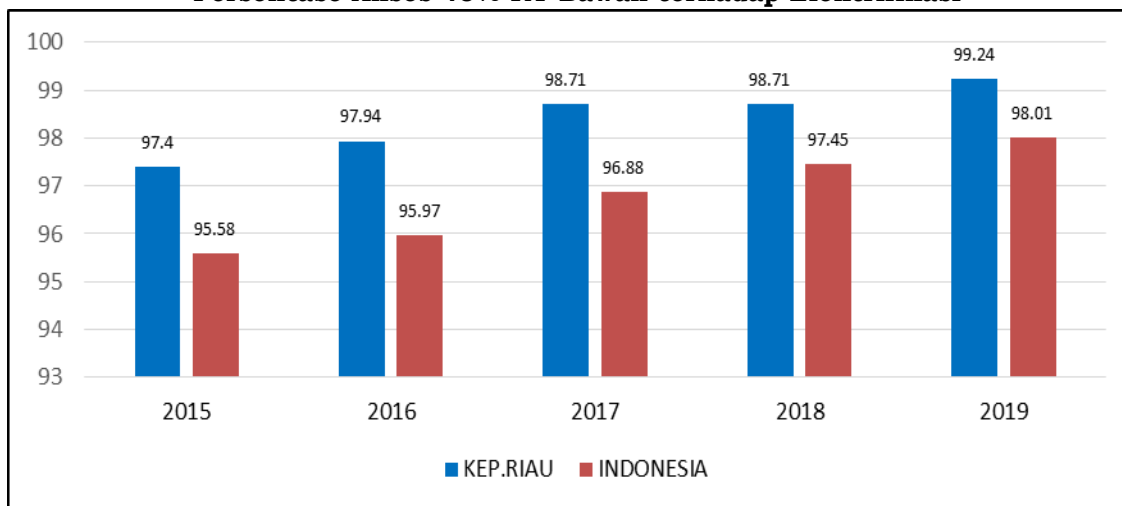
Berdasarkan laporan Susenas Maret 2020, BPS melansir keterangan tentang sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga miskin dimana paling banyak menggunakan air yang berasal dari air isi ulang, yaitu sebesar 41,40 persen. Selanjutnya, sumber air minum yang paling banyak digunakan adalah sumur tak terlindung, sumur terlindung dan leding, yaitu masing-masing sebesar 6,89 persen, 24,37 persen dan 12,80 persen. Singkat kata, kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum pada rumah tangga miskin sudah cukup baik.

Selain itu, apabila dilihat dari distribusi rumah tangga miskin menurut ketersediaan dan penggunaan fasilitas buang air besar, tampak bahwa persentase rumah tangga dengan menggunakan jamban sendiri sebesar 88,92 persen dan yang menggunakan jamban bersama sebesar 4,41 persen. Yang perlu menjadi catatan adalah masih ada rumah tangga miskin yang tidak memiliki jamban, yaitu sebesar 6,67 persen.

C. Persentase Akses 40% RT Bawah terhadap Elektrifikasi

Selain itu, perkembangan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Riau yang berada dalam potensi kelompok miskin juga semakin baik dalam akses terhadap penerangan listrik (elektrifikasi).

Grafik 4.45.
Persentase Akses 40% RT Bawah terhadap Elektrifikasi



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dari gambaran data di atas, peningkatan akses listrik terhadap 40% Rumah Tangga Terbawah menunjukkan dimensi infrastruktur dasar dalam penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Riau mendapatkan perhatian yang cukup baik. Dari perkembangan data elektrifikasi diatas dapat dianalisa keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan Efektivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.57.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Elektrifikasi di Provinsi Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Akses Elektrifikasi	n.a	Persentase Akses Elektrifikasi rumah tangga miskin secara umum memperlihatkan kondisi yang membaik dalam kurun 2015-2019.	Perkembangan persentase akses penduduk miskin terhadap elektrifikasi di Kepulauan Riau berdampak terhadap kesejahteraan penduduk miskin.	n.a	n.a

Sumber : olahan tahun 2021.

D. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sebagai daerah provinsi kepulauan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat terlepas dari perkembangan kondisi infrastruktur. Dengan tersedianya infrastruktur yang paling tinggi relevansinya dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau dan sebagian besarnya dipenuhi oleh lautan dimana luas laut keseluruhan mencapai 96%

dari jumlah luas wilayah Kepulauan Riau itu sendiri. Oleh karena itu, tersedianya infrastruktur yang baik menyebabkan konektivitas antar dan di daerah itu sendiri akan terselenggara dengan baik sehingga dapat mendorong mobilitas faktor produksi termasuk sumber daya manusia dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas bagi ekonomi. Di antara infrastruktur yang relevan dan sangat efektif dalam meningkatkan konektivitas tersebut adalah yaitu jalan dan jembatan.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Namun demikian, kondisi jalan baik pada tahun 2020 menurun menjadi 60,25% yang mana target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun tersebut sebesar 73,24%. Pada tahun 2016 ruas jalan berstatus provinsi mengalami perubahan yang semula (SK Gubernur No. 530 Tahun 2010) sepanjang 679,49 km berubah menjadi 896,45 km (SK Gubernur No. 1.863 Tahun 2016). Secara rinci hal tersebut dapat terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.58
Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)	Jalan Berkondisi Baik (km)	Panjang Jalan (km)
1	Tanjungpinang	47.15	70.23	49.15	70.23	50.10	70.23	51.56	70.23	49,38	70.23
2	Bintan	128.61	139.10	128.61	139.10	129.93	139.10	130.71	139.10	121,20	139.10
3	Batam	88.96	112.35	91.96	112.35	104.82	112.35	110.63	112.35	65,95	112.35
4	Karimun	104.34	143.72	105.35	143.72	109.03	143.72	112.31	143.72	84,94	143.72
5	Lingga	126.95	236.72	128.47	236.72	128.62	236.72	138.35	236.72	124,45	236.72
6	Natuna	72.97	143.33	75.18	143.33	82.26	143.33	87.86	143.33	63,52	143.33
7	Kepulauan Anambas	24.58	51.00	24.58	51.00	25.51	51.00	28.76	51.00	30,67	51.00
Total		593.54	896.45	603.31	896.45	630.27	896.45	660.17	896.45	540,11	896.45

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Berdasarkan Tabel 2.50 di atas, kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 29.66 km melalui program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah memperbaiki ruas jalan provinsi menjadi berkondisi baik sepanjang 66.38 km. Namun di tahun 2020 ruas jalan Provinsi yang berkondisi baik kembali mengalami penurunan. Oleh karena itu kondisi jalan rusak yang masih harus diperbaiki masih membutuhkan jumlah anggaran perbaikan yang masih sangat besar.

Tabel 4.59
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Baik
Dari Tahun 2015 - 2020

Indikator Kinerja	Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Persentase jalan berkondisi baik (%)	Kepulauan Riau	71.37%	66.21%	67.30%	70.31%	73.64%	74.51%
	Tanjungpinang	82.49%	67.14%	69.98%	71.34%	73.42%	74.09%
	Bintan	77.24%	92.46%	92.46%	93.41%	93.97%	94.30%
	Batam	90.30%	79.18%	81.85%	93.30%	98.47%	103.68%
	Karimun	92.61%	72.60%	73.30%	75.86%	78.15%	78.49%
	Lingga	53.54%	53.63%	54.27%	54.33%	58.44%	58.55%
	Natuna	67.65%	50.91%	52.45%	57.39%	61.30%	61.43%
	Kep. Anambas	55.22%	48.20%	48.20%	50.02%	56.39%	56.39%

Sumber: Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Pada Tabel di atas, Jalan yang berkondisi baik pada Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2015 sebesar 71,37%. Pada tahun 2016, 2017, 2018 persentase jalan yang berada dalam kondisi baik menurun jika dibandingkan tahun 2015. Akan tetapi jumlah ini meningkat pada tahun 2019 dan 2020. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki persentase jalan berkondisi baik paling rendah jika dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 56,39% pada tahun 2020. Kota Batam memiliki realisasi persentase kondisi jalan baik paling tinggi diantara Kabupaten/Kota yang lain.

Tabel 4.60
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas,
Relevansi Persentase Jalan Berkondisi Baik tahun 2015-2020

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Jalan Berkondisi Baik	n.a	Perkembangan persentase jalan berkondisi baik di Kepulauan Riau secara persentase mengalami penurunan sejak 2016-2020 meskipun terdapat kenaikan dari segi jumlah pada tahun 2019 & 2020.	Perkembangan persentase jalan berkondisi baik di Kepulauan Riau berdampak terhadap mobilitas dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi.	Perkembangan persentase jalan berkondisi baik di Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mengalami kenaikan menonjol terutama Kota Batam, menyusul Kota Tanjungpinang dengan kenaikan yang relatif rendah. Sedangkan daerah kabupaten/kota lainnya cenderung stagnan.	Perkembangan persentase jalan berkondisi baik di Kepulauan Riau menunjukkan tingginya urgensi kebijakan infrastruktur dalam pembangunan di daerah.

Sumber : olahan tahun 2021.

Sementara itu, tingkat konektivitas antar wilayah strategis Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sepanjang 32.343 km, pada Kabupaten Karimun sepanjang 10.973 km. Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) cukup dekat yakni pada Kota Tanjung Pinang sepanjang 0,85 km, Kabupaten Bintan sepanjang 1,7 km, Kota Batam sepanjang 5,08 km, Kabupaten Lingga sepanjang 2,15 km, Kabupaten Natuna sepanjang 6,99 km dan Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang 4,6 km. Lebih lengkap data indikator kinerja konektivitas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.61
Rasio Konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau

Indikator Kinerja	Provinsi/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	Kepulauan Riau	3,29	4,65	6,97	16,20	25,96	32,34
	Tanjungpinang	0	0	0	0.00	0.25	0.85
	Bintan	0	0	0	0.80	1.70	1.7
	Batam	1,0	1,5	1,5	2.98	5.08	5.08
	Karimun	0,9	0,9	1,5	3.46	6.20	10.973
	Lingga	0	0	0	0.80	1.15	2.15
	Natuna	1,39	1,80	2,62	6.81	6.99	6.99
	Kep. Anambas	0	0,45	1,35	1.35	4.60	4.6

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan panjang jembatan provinsi.

Evaluasi terhadap persentase jembatan berkondisi baik tahun 2020 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,12 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87.34%. Adapun jembatan berkondisi baik pada setiap kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4.62
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Jembatan Berkondisi Baik tahun 2015-2020

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Jembatan Berkondisi Baik	n.a	Perkembangan persentase jembatan berkondisi baik di Kepulauan Riau mengalami kenaikan yang relatif rendah dalam kurun 2015-2017, namun kenaikan cukup signifikan sejak periode 2018.	Perkembangan persentase jembatan berkondisi baik di Kepulauan Riau terhadap mobilitas dan produktivitas masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi.	Perkembangan persentase jembatan berkondisi baik di Kabupaten/Kota Kepulauan Riau tertinggi di Kabupaten Karimun, disusul kemudian Natuna, Batam, Anambas, Lingga, Bintan dan terendah di Tanjungpinang.	Perkembangan persentase jembatan berkondisi baik di Kepulauan Riau menunjukkan tingginya urgensi kebijakan infrastruktur dalam mendukung konektivitas antar daerah.

Sumber : olahan tahun 2021.

Tabel 4.63
Jembatan Berkondisi Baik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			2020		
		Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)
1	Tanjungpinang	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.897,61	98.56%
2	Bintan	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%
3	Batam	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%
4	Karimun	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%
5	Lingga	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%
6	Natuna	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%
7	Kepulauan Anambas	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%
Total		4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.621,12	87.34%

Sumber : RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

4.4.2. Prioritas Intervensi Dimensi Infrastruktur.

Berdasarkan sub bahasan permasalahan dimensi infrastruktur, maka prioritas intervensi dimensi pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.64.
Prioritas Intervensi Dimensi Infrastruktur

No	Indikator	Keterangan
1	Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak	Capaian akses terhadap air dan sanitasi layak di kabupaten/ kota di Kepri memperlihatkan masih tidak seragamnya kapasitas dan kapabilitas penanganan antar daerah kabupaten/ kota
2	Persentase Jalan Berkondisi Baik	Panjang jalan dan persentase jalan berkondisi baik masih relative rendah di Provinsi Kepulauan Riau
3	Jembatan Berkondisi Baik	Panjang jembatan dan persentase jembatan berkondisi baik masih relative rendah di Provinsi Kepulauan Riau

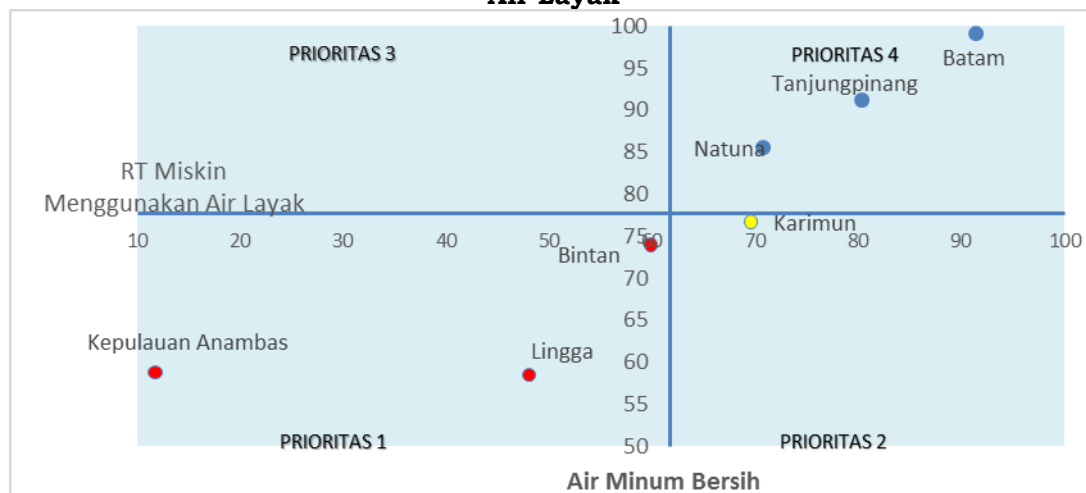
Sumber : Olahan Penelitian, 2021

4.4.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Infrstruktur Dasar

A. Prioritas Wilayah Untuk Meningkatkan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak

Indikator berikut yang disandingkan adalah persentase air minum bersih dan persentase rumah tangga miskin menggunakan air layak pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin besar persentase air minum bersih dan persentase RT miskin menggunakan air layak menunjukkan kondisi yang baik. Analisa kuadranya sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 4.46
Pemetaan Wilayah Untuk Meningkatkan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di bawah rata-rata dan persentase air minum bersih di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di atas rata-rata dan persentase air minum bersih di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di bawah rata-rata dan persentase air minum bersih di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di atas rata-rata dan persentase air minum bersih di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas wilayah intervensi untuk meningkatkan meningkatkan rumah tangga miskin menggunakan air layak di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.65
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rumah Tangga Miskin Menggunakan Air Layak

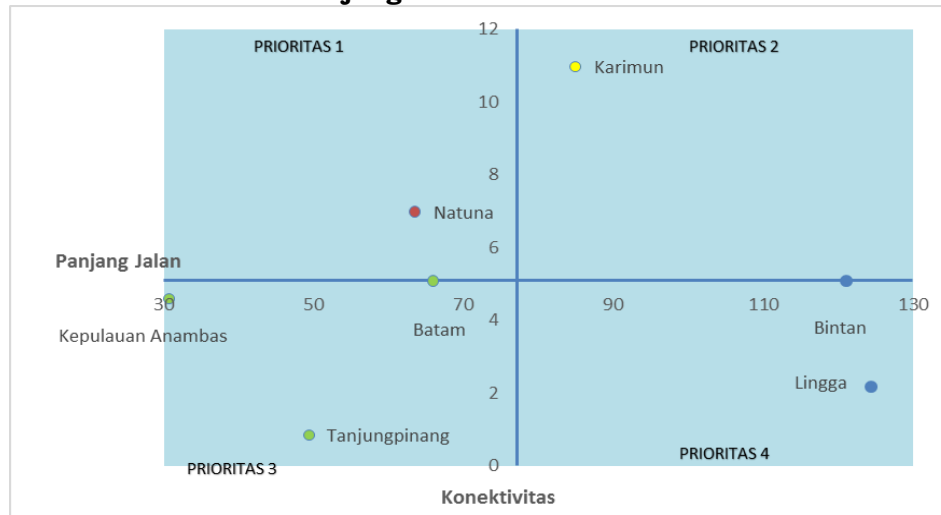
Prioritas 1	: Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, dan Bintan
Prioritas 2	: Kabupaten Karimun
Prioritas 3	: -
Prioritas 4	: Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang dan Batam

Sumber : Olahan tahun 2021

B. Prioritas Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik

Indikator yang disandingkan adalah rasio konektivitas antar wilayah strategis dan persentase jalan berkondisi baik pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. , sebagaimana pada grafik berikut. Semakin kecil tingkat konektivitas antar wilayah strategis menunjukkan kondisi yang baik, karena tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) cukup dekat, sedangkan semakin panjang jalan kondisi baik menunjukkan kondisi yang juga baik. Analisa kuadranya sebagai berikut :

Grafik 4.47.
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas rasio konektivitas dan persentase jalan berkondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.66.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik

Prioritas 1	: Kabupaten Natuna
Prioritas 2	: Kabupaten Karimun
Prioritas 3	: Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Kepulauan Anambas
Prioritas 4	: Kabupaten Lingga dan Bintan

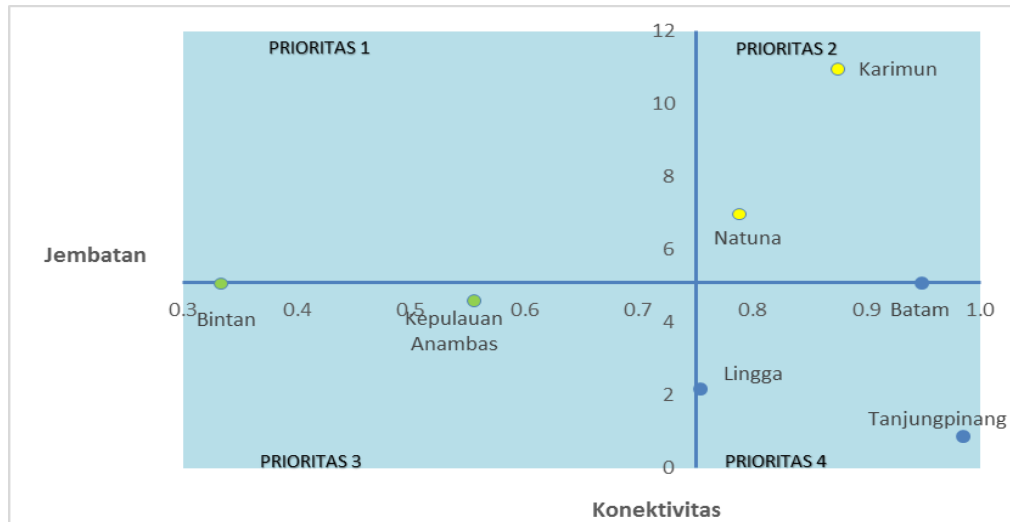
Sumber : Olahan tahun 2021

C. Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Jembatan Berkondisi Baik

Indikator yang disandingkan adalah rasio konektivitas dan jembatan berkondisi baik pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin kecil tingkat konektivitas antar wilayah strategis menunjukkan kondisi yang baik, karena tingkat konektivitas antar wilayah

strategis (km) cukup dekat, sedangkan semakin panjang jembatan kondisi baik menunjukkan kondisi yang juga baik. Analisa kuadranya sebagai berikut:

Grafik 4.48
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Jembatan Berkondisi Baik



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas rasio konektivitas dan jembatan berkondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.67.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Panjang Jalan Kondisi Baik

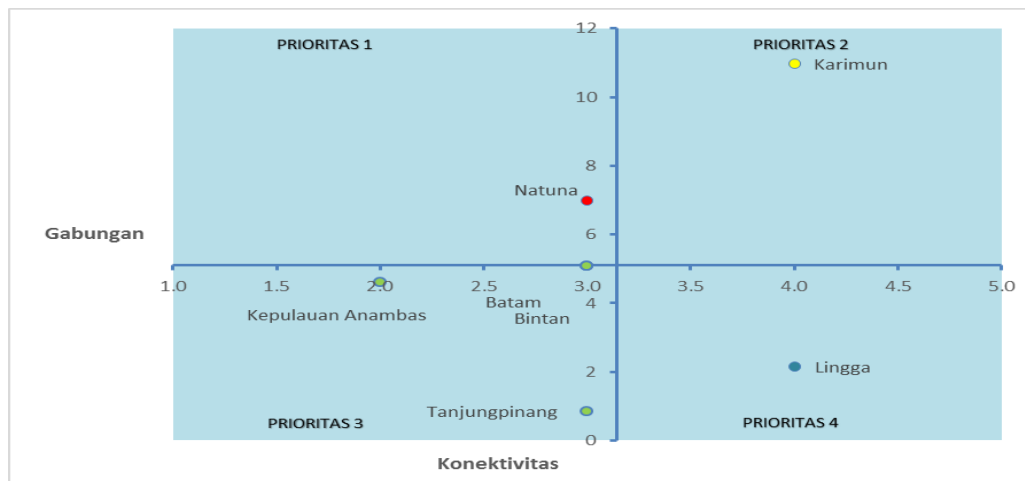
Prioritas 1	:	
Prioritas 2	:	Kabupaten Karimun dan Natuna
Prioritas 3	:	Kabupaten Bintan dan Kepulauan Anambas
Prioritas 4	:	Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan Batam

Sumber : Olahan tahun 2021

D. Prioritas Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Konektivitas

Indikator yang disandingkan adalah rasio konektivitas dan Indikator Gabungan (persentase jalan yang berkategori baik dan jembatan yang beekondisi baik) pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin kecil tingkat konektivitas antar wilayah strategis menunjukkan kondisi yang baik, karena tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) cukup dekat, sedangkan semakin panjang indikator gabungan dalam kondisi baik menunjukkan kondisi yang juga baik. Analisa kuadranya sebagai berikut:

Grafik 4.49
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Konektivitas



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang panjang indikator dalam kondisi baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang panjang indikator dalam kondisi baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota panjang indikator dalam kondisi baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang panjang indikator dalam kondisi baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa prioritas rasio konektivitas dan indikator gabungan infrastruktur dasar di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.68.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Konektivitas

Prioritas 1	: Kabupaten Natuna
Prioritas 2	: Kabupaten Karimun
Prioritas 3	: Kota Tanjungpinang, Batam dan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Bintan
Prioritas 4	: Kabupaten Lingga

Sumber : Olahan tahun 2021

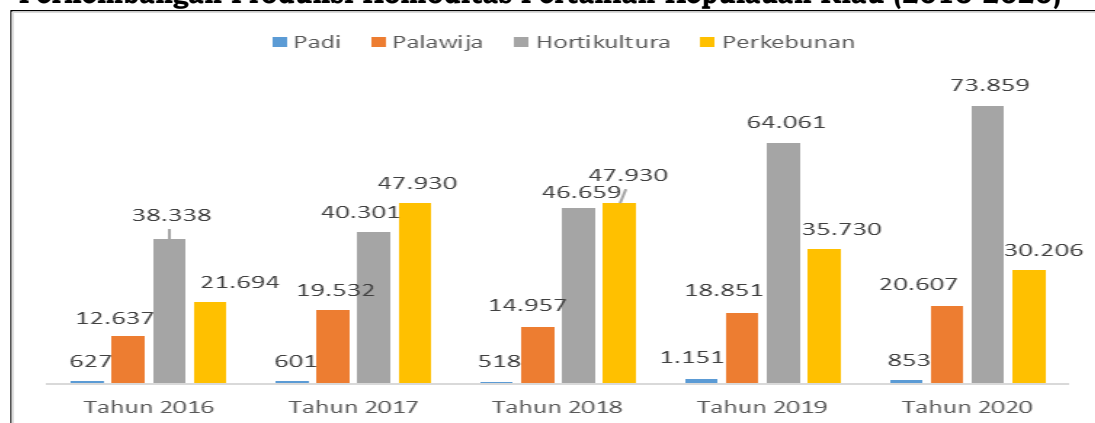
4.5. Dimensi Ketahanan Pangan

4.5.1. Permasalahan Dimensi Ketahanan Pangan

C. Konsumsi Kalori dan Pengeluaran Per Kapita Rmthah Tangga Miskin

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan karena kemiskinan dapat menyebabkan keterbatasan untuk mengkonsumsi pangan. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana tingkat ketersediaan komoditas pangan bagi penduduk miskin. Faktor ketahanan pangan di Kepulauan Riau perlu dilihat dari perspektif karakteristik daerah yang secara agrikultur dan geografis merupakan daerah kepulauan yang baik struktur maupun topografi lahannya tidak sesuai dengan pertanian komoditas pangan utama seperti padi. Kalaupun terdapat daerah yang merintis pengembangan produksi padi melalui metode persawahan, hal tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap ketersediaan pangan utama seperti padi yang menjadi sumber pasokan beras. Grafik berikut menjelaskan perkembangan produksi komoditas pertanian dimana volume produksi didominasi oleh subsektor perkebunan dan hortikultura.

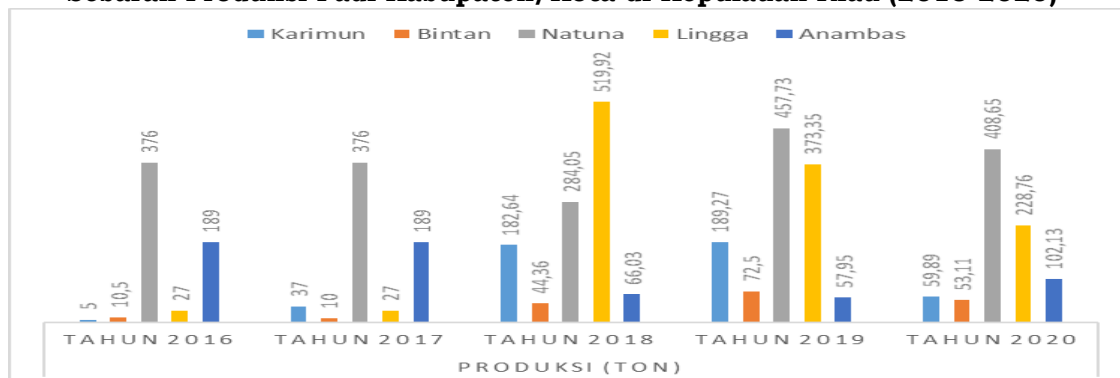
Grafik 4.50.
Perkembangan Produksi Komoditas Pertanian Kepulauan Riau (2016-2020)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Apabila dilihat dari persebarannya, maka produk pertanian terutama padi tersebar di seluruh kabupaten dengan kontributor terbesar di Kabupaten Natuna, disusul oleh Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Karimun. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah produksi padi dari setiap kabupaten sangat fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun setiap tahunnya.

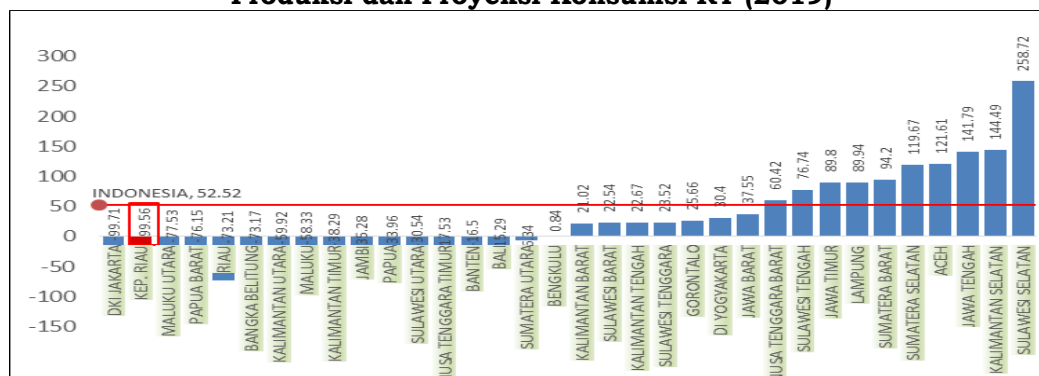
Grafik 4.51.
Sebaran Produksi Padi Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau (2016-2020)



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dampak dari produksi padi yang minim telah menyebabkan hambatan untuk mencukupi kebutuhan pasokan beras di Kepulauan Riau. Oleh karena itu, penyediaan pangan pokok seperti beras merupakan tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kepulauan Riau mengingat fakta bahwa Kepulauan Riau salah satu dari daerah provinsi yang mengalami defisit beras di atas 50%. Hal ini ditunjukkan pada grafik berikut dimana Kepri mencatatkan defisit beras sebanyak 99,56% atau terbesar kedua setelah DKI Jakarta.

Grafik 4.52.
Ketersediaan Beras (Surplus/Defisit), Relatif Antar Provinsi Berdasarkan Produksi dan Proyeksi Konsumsi RT (2019)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021².

² Publikasi BPS *Distribusi Perdagangan Komoditas Beras 2020*.

Posisi defisit pasokan beras yang dialami Kepulauan Riau berdasarkan data di atas dihitung melalui proyeksi jumlah penduduk berdasarkan hasil Survey Penduduk Antar Sensus (2015) dan rata-rata konsumsi rumah tangga yang mampu dipenuhi oleh produksi beras domestik. Kepulauan Riau merupakan salah satu dari sekian provinsi yang mengalami defisit sehingga harus mendatangkan pasokan beras dari luar provinsi. Sebagai bahan pangan pokok, andil beras terhadap pasokan kebutuhan kalori masih sangat tinggi bagi masyarakat Kepulauan Riau, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

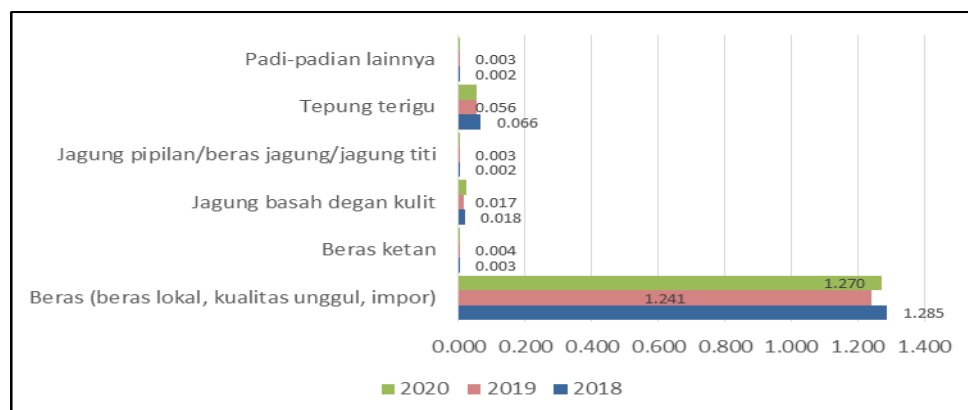
Tabel 4.69.
Rata- Rata Konsumsi Kalori Perkapita (Kilo Kalori/Kapita/Hari)

Provinsi/Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
Kepulauan Riau	2091.17	2157.61	2180	2115.22
Karimun	1969.85	1876.84	1920	2014.36
Bintan	1912.85	2015.84	2162	2036.85
Natuna	2028.46	2267.12	2271	2160.61
Lingga	2182.23	2011.11	2091	2203.74
Kepulauan Anambas	2161.28	2194.09	2066	2188.18
Batam	2127.97	2242.02	2228	2149.13
Tanjungpinang	2114.85	2086.54	2214	2002.45

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Menurut laporan BPS, konsumsi beras dalam pasokan kebutuhan kalori di Kepulauan Riau terbilang tinggi, rata-rata di atas 93% setidaknya dalam kurun 3 tahun terakhir. Artinya, ketergantungan konsumsi beras sebagai sumber kalori bagi masyarakat Kepulauan Riau hanya mampu digantikan oleh potensi komoditas lainnya dalam golongan padi-padian sebanyak kurang lebih 7% saja. Hal ini tergambar dalam grafik berikut.

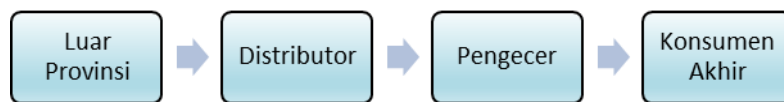
Grafik 4.53.
Rata-Rata Konsumsi Kalori Perkapita Kepulauan Riau Menurut Komoditas Golongan Padi-Padian (2018-2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Faktor lain yang menyebabkan dimensi ketahanan pangan dalam penanggulangan kemiskinan terkait dengan pembentukan harga beras di Kepulauan Riau yang turut menjelaskan tentang pola distribusi perdagangan beras itu sendiri. Beras memberikan andil terbesar pertama dan kedua masing-masing bagi pembentukan garis kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan, maka itu pembentukan harga beras akan sangat berimplikasi terhadap pembentukan garis kemiskinan di Kepulauan Riau. Studi BPS tentang Distribusi Perdagangan Komoditas Beras di Indonesia (2020) mengungkapkan bahwa pola utama distribusi perdagangan beras di Kepulauan Riau berbentuk 3 rantai yang terdiri dari 2 pedagang perantara yaitu Distributor dan Pengecer hingga kepada konsumen akhir. Pola distribusi utama ini juga berpotensi menjadi 4 rantai ketika melalui jalur : luar provinsi, distributor, pengecer dan konsumen akhir.

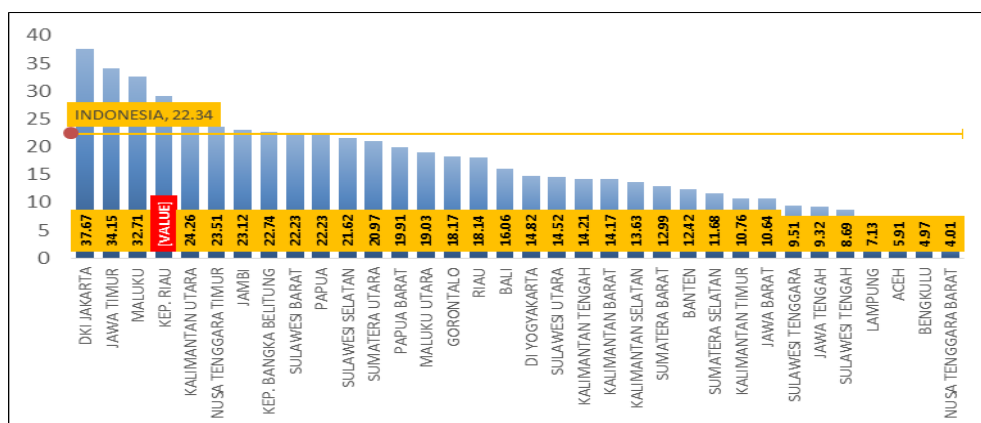
Gambar 4.1
Pola Distribusi Perdagangan Beras di Kepulauan Riau



Sumber : BPS, 2020.

Studi yang sama menjelaskan pula akibat pola distribusi perdagangan beras di atas, pembentukan harga beras di Kepulauan Riau dipengaruhi oleh besaran margin perdagangan dan pengangkutan beras yang mencapai sebesar 29,03 persen. Hal ini mencerminkan bahwa sejak dari tangan produsen, kenaikan harga beras untuk sampai kepada konsumen akhir adalah sebesar 29,03 persen.

Grafik 4.54.
Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)
Komoditas Beras di Indonesia, 2019

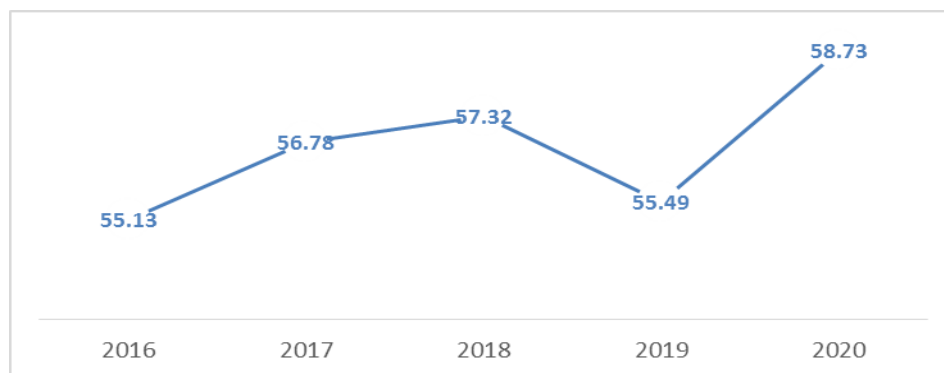


Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Gambaran pembentukan harga beras di Kepulauan Riau terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, margin perdagangan dan pengangkutan beras Kepulauan Riau merupakan yang paling tinggi di antara provinsi lainnya di Sumatera.

Sebagai salah satu determinan penting dalam pembentukan Garis Kemiskinan, implikasi harga beras turut mempengaruhi pola konsumsi perkapita rumah tangga miskin khususnya konsumsi makanan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan fluktuasi pengeluaran per kapita rumah tangga miskin untuk makanan di Kepulauan Riau sebagaimana tergambar dalam grafik berikut.

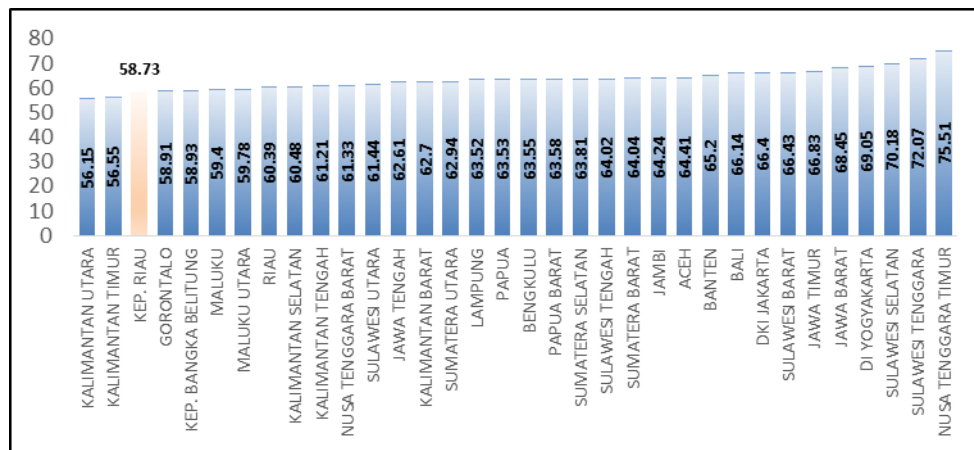
Grafik 4.55.
Fluktuasi Persentase Pengeluaran Perkapita
RT Miskin untuk Makanan di Kepulauan Riau



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Gambaran pengeluaran perkapita rumah tangga miskin untuk makanan cenderung fluktuatif dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2020 sebesar 58,73%. Kenaikan ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan perlambatan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan meningkatnya proporsi pengeluaran perkapita terhadap makanan berarti proporsi pengeluaran perkapita untuk keperluan non makanan akan terganggu.

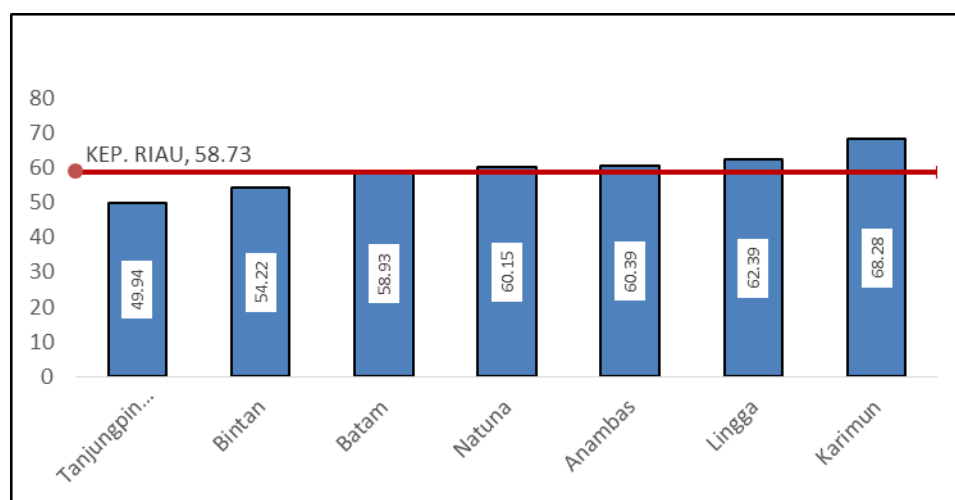
Grafik 4.56.
Persentase Perkapita RT Miskin untuk Makanan
Relatif Antar Provinsi (2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Pengeluaran per kapita rumah tangga miskin untuk memenuhi pasokan makanan perlu mendapat perhatian mengingat bobotnya yang sangat besar untuk Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Persentase perkapita rumah tangga miskin Kepulauan Riau untuk makanan diketahui menempati ranking ketiga terbesar setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur pada tahun 2020. Sedangkan gambaran yang menyeluruh dapat dilihat pada sebaran kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 4.57.
Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin untuk Makanan
di Kepulauan Riau (Tahun 2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa persentase pengeluaran per kapita rumah tangga miskin untuk makanan di Kepulauan Riau pada tahun 2020 paling tinggi berada di Karimun disusul kemudian Lingga, Anambas, Natuna dan Batam yang kesemua daerah tersebut memiliki persentase lebih besar dibandingkan persentase provinsi. Dua daerah yang persentase pengeluaran per kapita rumah tangga miskin di bawah persentase provinsi adalah Batam dan Bintan. Perkembangan fluktuasi persentase pengeluaran per kapita rumah tangga miskin di kabupaten/kota dalam kurun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.70.
Persentase Pengeluaran Perkapita Makanan RT Miskin
Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau (2016-2020)

Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Karimun	54.74	57.44	62.88	61.6	68.28
Bintan	56.98	58.57	56.36	50.67	54.22
Natuna	56.38	58.93	61.17	60.09	60.15
Lingga	58.51	60.66	60.4	62.05	62.39
Anambas	53.65	66.34	59.66	62.27	60.39
Batam	53.81	53.83	55.84	53.02	58.93
Tanjungpinang	56.17	60.43	55.4	55.93	49.94
KEP. RIAU	55.13	56.78	57.32	55.49	58.73

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Tabel 4.71.
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi
Persentase Pengeluaran Perkapita Makanan RT Miskin
di Provinsi Kepri

Indikator	Perspektif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Konsumsi Kalori Per Kapita RT Miskin	Dalam hal Posisi Relatif Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin untuk Makanan terhadap Provinsi Lain, Kepri berada pada peringkat terendah ke-3 dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.	Dalam kurun periode 2016-2020, Posisi Relatif Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin untuk Makanan di Kepri secara umum mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat.	Kecenderungan meningkat Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin untuk Makanan di Kepri menunjukkan potensi gangguan terhadap pengeluaran perkapita RT Miskin terhadap non-makanan.	Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin untuk Makanan Kabupaten/Kota relatif meningkat di karimun, Lingga, Natuna, Batam dan Bintan. Sedangkan untuk Anambas dan Tanjungpinang menurun.	Perubahan terhadap Persentase Pengeluaran Perkapita RT Miskin untuk Makanan menunjukkan kepentingan asupan kalori per kapita namun juga berhubungan dengan kebutuhan pengeluaran per kapita untuk non makanan.

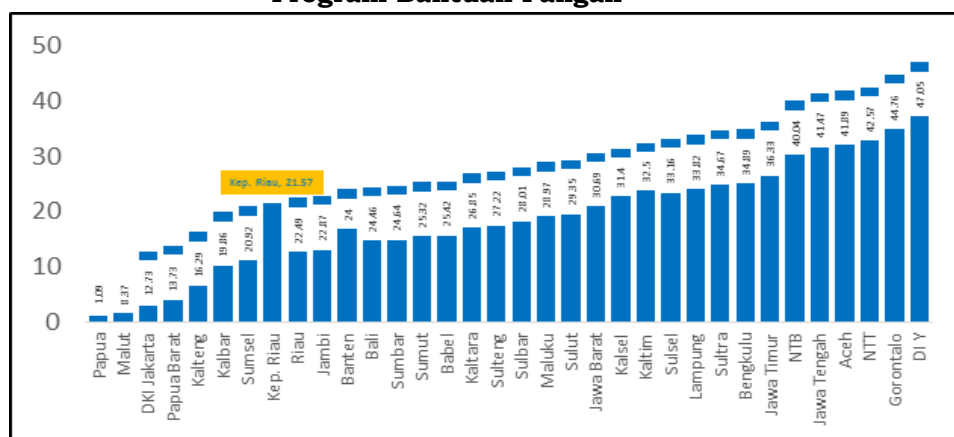
Sumber : olahan tahun 2021.

D. Persentase Rumah Tangga Miskin dalam Akses terhadap Program Bantuan Pemerintah

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tentang bagaimana pangan dapat tersedia dan rumah tangga atau seseorang memiliki kemampuan untuk memperolehnya. Oleh karena terbatasnya kemampuan penduduk atau rumah tangga miskin dalam mengakses kondisi pangan yang ideal, maka pemerintah menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan melalui program bantuan beras miskin (Raskin) atau beras sejahtera (Rastra) dengan tujuan agar dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga berpendapatan rendah atau kalangan penduduk miskin sebagai Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM). Setelah program ini berjalan, pemerintah kemudian memperbaharui opsi penerimaannya melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa sejumlah uang yang dikirimkan kepada KPM setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik untuk dibelanjakan di pedagang bahan pangan yang telah ditunjuk atau *E-warong*. Uang tersebut dipergunakan hanya untuk keperluan pembelian pangan, yaitu beras dan atau telur.

Berdasarkan data realisasi program tersebut pada tahun 2020, maka posisi Provinsi Kepulauan Riau dapat diperlihatkan melalui grafik berikut ini.

Grafik 4.58
Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga Miskin dalam Akses terhadap Program Bantuan Pangan



Sumber : BPS, data olahan 2021.³

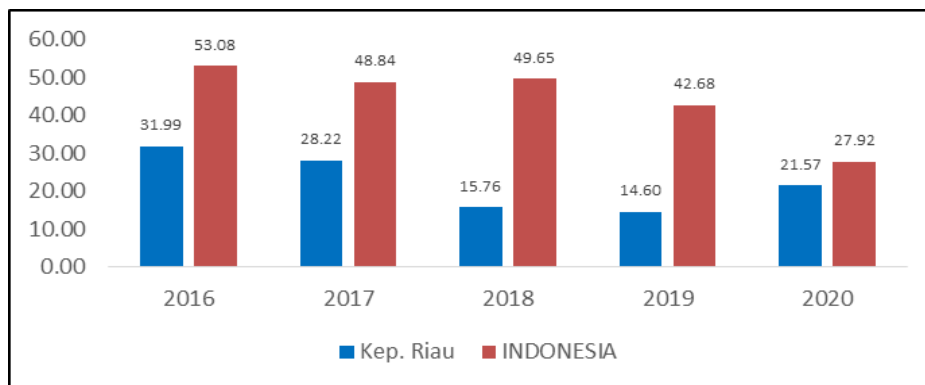
Provinsi Kepri secara relatif berada pada urutan terendah ke-8 setelah Sumatera Selatan, sedangkan provinsi yang paling tinggi serapan program

³ Publikasi Data Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016-2020.

bantuan pangan di kalangan rumah tangga miskinnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 47.05 %. Oleh karena itu, serapan program bantuan pangan di Kepri perlu untuk ditingkatkan

Apabila dilihat perbandingan dengan rata-rata persentase nasional, maka secara tren persentase relatif Kepri dan nasional dapat ditunjukkan melalui grafik berikut ini.

Grafik 4.59
Tren Persentase Rumah Tangga Miskin dalam Akses terhadap Program Bantuan Pangan Kepri dan Nasional (2016-2020)



Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Selama 5 tahun terakhir, posisi Kepri dalam persentase akses Rumah Tangga Miskin terhadap program bantuan pangan masih berada di bawah level rata-rata persentase nasional. Selain itu, persentase Kepri pula cenderung mengalami penurunan dalam kurun lima tahun tersebut. Sedangkan apabila dibandingkan dengan perkembangan di provinsi-provinsi lainnya, maka gambaran tren dari provinsi-provinsi di Indonesia dapat pula ditunjukkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.72
Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di Kepri dan Provinsi Lainnya (2016-2020)

No	Provinsi-Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	62.77	68.32	77.81	67.52	41.89
2	Sumut	52.51	50.5	47.8	38.2	25.32
3	Sumbar	58.47	54.06	38.67	39.89	24.64
4	Riau	52.21	37.92	42.64	35.38	22.49
5	Jambi	54.56	44.96	45.52	37.66	22.87
6	Sumsel	48.07	53.4	50.94	38.75	20.92
7	Bengkulu	47.22	50.59	57.64	42.96	34.89
8	Lampung	77.33	62.34	62.74	53.94	33.82
9	Babel	27.07	26.54	38.7	32.62	25.42
10	Kep. Riau	31.99	28.22	15.76	14.6	21.57
11	DKI Jakarta	30.98	27.63	0.44	14.16	12.73
12	Jawa Barat	80.45	70.9	64.71	37.48	30.69
13	Jawa Tengah	83.8	65.04	71.14	45.19	41.47

14	DI Y	81.07	64.68	66.42	51.39	47.05
15	Jawa Timur	80.66	58.37	63.35	40.07	36.33
16	Banten	61.4	59.69	49.46	45.5	24
17	Bali	40.36	31.2	37.09	25.67	24.46
18	NTB	91.25	65.5	73.84	65.53	40.04
19	NTT	50.85	41.91	52.82	60.9	42.57
20	Kalbar	39.71	36.31	41.39	39.64	19.86
21	Kalteng	22.9	32.34	34.35	15.99	16.29
22	Kalsel	38.76	53.11	54.13	44.5	31.4
23	Kaltim	23.83	26.3	42.58	36.73	32.5
24	Kaltara	19.01	14.19	38.47	28.92	26.85
25	Sulut	75.31	58.38	56.12	44.33	29.35
26	Sulteng	71.6	61.97	67.11	60.55	27.22
27	Sulsel	48.35	50.08	54.89	46.16	33.16
28	Sultra	53.96	45.51	60.72	51.06	34.67
29	Gorontalo	71.48	63.68	64.91	49.53	44.76
30	Sulbar	69.74	62.91	65.84	63.11	28.01
31	Maluku	52.34	58.08	n.a	51.21	28.97
32	Malut	36.15	39.87	43.79	26.89	8.37
33	Papua Barat	38.13	44.49	49	57.25	13.73
34	Papua	30.43	51.41	57.26	47.88	1.09

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Perkembangan persentase akses rumah tangga miskin terhadap program bantuan pangan di Provinsi Kepulauan Riau juga dapat dilihat dalam perspektif antar kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.73
Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Yang
Mengakses Bantuan Pangan di Kabupaten/Kota (2016-2020)

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Karimun	15.87	24.37	31.72	48.38	34.44
2	Bintan	27.95	47.9	9.22	52.25	17.06
3	Natuna	12.94	-	12.47	63.59	19.49
4	Lingga	33.4	46.72	58.51	67.8	25.31
5	Anambas	65.72	67.77	15.96	49.12	1.61
6	Batam	37.82	15.27	0.92	83.17	14.95
7	Tanjungpinang	26.28	47.19	33.83	80.24	37.17

Sumber : BPS, olahan tahun 2021.

Dari perkembangan data persentase akses rumah tangga miskin terhadap program bantuan pangan dapat dianalisa keterkaitannya pada posisi relatif, antar waktu, dan efektivitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.74
Analisa Keterkaitan Kondisi Posisi Relatif, Antar Waktu, Efektivitas, Relevansi Persentase Akses Rumah Tangga Miskin terhadap Program Bantuan Pangan di Provinsi Kepri

Indikator	Perspekif				
	Posisi Relatif	Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterkaitan
Persentase Akses RT Miskin terhadap Program Bantuan Pangan	Dalam hal Posisi Relatif Persentase Akses RT Miskin terhadap Program Bantuan Pangan Provinsi Lain, Kepri berada pada peringkat terendah ke-8 dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.	Dalam kurun periode 2016-2020, Persentase Akses RT Miskin terhadap Program Bantuan Pangan di Kepri secara umum mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada periode 2020 dimana terjadi pandemi COVID-19 persentase akses rumah tangga miskin terhadap bantuan pangan mengalami penurunan yang drastis secara serentak di semua kabupaten/kota.	Kecenderungan menurunnya Persentase Akses RT Miskin terhadap Program Bantuan Pangan di Kepri menunjukkan masih adanya hambatan penduduk miskin dalam memperoleh kecukupan pangan.	Persentase Akses RT Miskin terhadap Program Bantuan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri secara umum mengalami penurunan, hanya saja persentase tiga besar tertinggi pada tahun 2020 berada di Kota Tanjungpinang, Kab. Karimun dan Kab. Lingga.	Perubahan terhadap Persentase Akses RT Miskin terhadap Program Bantuan Pangan menimbulkan respon terhadap pentingnya kebijakan bantuan pangan untuk mendukung taraf hidup dan kesejahteraan penduduk miskindari segi kecukupan pangan.

Sumber : olahan tahun 2021.

4.5.2. Prioritas Intervensi Dimensi Ketahanan Pangan

Berdasarkan sub bahasan permasalahan dimensi pendidikan, makap prioritas intervensi dimensi pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.75.
Prioritas Intervensi Dimensi Katahanan Pangan

No	Indikator	Keterangan
1	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan	Dalam kurun periode 2016-2020, persentase akses RT miskin terhadap program bantuan pangan di Kepri secara umum mengalami fluktuasi yang cenderung menurun.

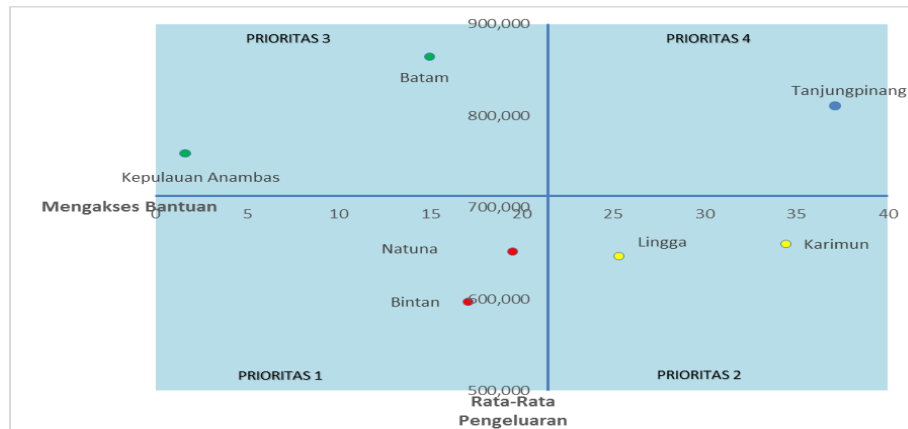
Sumber : Olahan Penelitian, 2021

4.5.3. Prioritas Wilayah Intervensi Dimensi Ketahanan Pangan

Indikator yang disandingkan adalah rata-rata pengeluaran per kapita (rupiah) untuk makanan dan perkembangan persentase rumah tangga miskin yang mengakses bantuan pangan pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam 4 kuadran. Semakin besar persentase rumah tangga

miskin yang mengakses bantuan pangan semakin baik dan semakin meningkat atau besar Rata-rata Pengeluaran Per Kapita untuk makanan juga semakin baik. Analisa kuadrannya sebagai berikut :

Grafik 4.60
Pemetaan Wilayah Prioritas untuk Meningkatkan Rata-Rata Konsumsi



Sumber : Olahan tahun 2021

Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di bawah rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di atas rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di bawah rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di atas rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pengeluaran per kapita (rupiah) untuk makanan dan perkembangan persentase rumah tangga miskin yang mengakses bantuan pangan di Provinsi Kepulauan Riau terbagi dalam 4 wilayah prioritas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.76.
Prioritas Wilayah untuk Meningkatkan Rata-Rata Konsumsi

Prioritas 1	: Kabupaten Bintan dan Natuna
Prioritas 2	: Kabupaten Lingga dan Karimun
Prioritas 3	: Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam
Prioritas 4	: Kota Tanjungpinang

Sumber : Olahan tahun 2021

BAB V

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Strategi penanggulangan kemiskinan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi maupun Kabupaten), dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan.

Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota atau TKPK. Dalam Permendagri ini keanggotaan TKPK terdiri dari : a. kepala dan unsur perangkat daerah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, perwakilan masyarakat, perwakilan dunia usaha; dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan d. sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pembahasan sub bab sebelumnya strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau akan dibagi dalam dua kelompok. Pertama strategi dalam jangka pendek, strategi ini disusun berdasarkan analisis profil kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dan strategi jangka menengah disusun berdasarkan analisis faktor determinan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Secara detail strategi tersebut pada matrik berikut.

Tabel 5.1.
Matrik Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Analisis Profil Kemiskinan

No	Indikator	Deskripsi	Karakteristik	Strategi	Program	Wilayah Intervensi
1	Kondisi Kemiskinan Daerah					
1.1.	Persentase Penduduk Miskin (PO)	<ul style="list-style-type: none"> Dari 7 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Lingga yang berada di atas persentase tingkat kemiskinan nasional. Kecenderungan meningkat dalam kurun 2016-2021 diperburuk dengan dampak pandemi COVID-19 pada awal 2020 hingga 2021. Tingkat perubahan persentase kemiskinan pasca pandemic lebih tinggi dari tren sebelum pandemi. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan (11,25 % > 5,69% ; September 2020) Peningkatan persentase lebih besar di perdesaan dibanding perkotaan (0,82>0,27 poin; September 2020) Paling besar persentase penduduk miskin berstatus tidak bekerja disusul bekerja di sektor informal dan sektor formal (50,59% > 27,34% > 22,07%; Maret 2020) Sebaran persentase penduduk miskin di sektor pertanian lebih dominan dibandingkan dengan sektor non pertanian (36,71 % > 12,71 %; Maret 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meningkatkan akses jaring pengaman sosial dalam bentuk jaminan dan bantuan sosial Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial. Peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja. Pembinaan hubungan industrial. Perlindungan ketenagakerjaan Bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian. Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa Mendorong eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Program Penempatan Tenaga kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Natuna (56.46%) Karimun (55.18%) Batam (52.84%) Tanjungpinang (48.30%) Kep. Anambas (48.21%) Bintan (44.02%) Lingga (44.01%) Sektor pertanian Natuna (24,67%), Lingga (21,67%), Karimun (19,81%), Bintan (19,40%), Kep. Anambas (18,81%) Batam (10,71%) Tanjungpinang (0,01%)
1.2.	Jumlah Penduduk Miskin	Tren kenaikan jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada	Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.	Batam (67,06 rb)

		relatif konstan.	<p>di perdesaan (121,82 rb > 20,79 rb; September 2020)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi di perkotaan (12,96rb) , sebaliknya penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan (2,32 rb) sejak periode Maret 2020 ke September 2020. • Jumlah penduduk miskin terbesar di Kota Batam, disusul Kota Tanjungpinang, Karimun, Lingga, Bintan, Natuna dan Anambas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kompetensi tenaga kerja. • Perluasan kesempatan kerja. • Pembinaan hubungan industrial. • Perlindungan ketenagakerjaan • Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penempatan Tenaga kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro • Program Pengembangan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanjungpinang (19,98 rb) • Karimun (15,99 rb) • Lingga (12,45 rb) • Bintan (10,21 rb) • Natuna (3,47 rb) • Kep. Anambas (2.80 rb)
1.3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	<ul style="list-style-type: none"> • Urutan ke-11 terendah dari 34 provinsi. • Dari 7 kabupaten/kota, dua daerah Lingga dan Tanjungpinang berada di atas provinsi. • Rata-rata perubahan kenaikan masih lebih rendah dibanding nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) lebih tinggi di wilayah perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan (1,89>1,16; September 2020). • Kenaikan P1 lebih besar di perkotaan sebanyak 0,09 poin dibandingkan dengan kenaikan P1 di perdesaan (0,14>0,05; September 2020). 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jaring pengaman sosial dalam bentuk jaminan dan bantuan sosial. • Meningkatkan akses kepemilikan dan perbaikan rumah tinggal. • Perluasan kesempatan kerja. • Bantuan permodalan Usaha Mikro dan Kecil. • Efektivitas penyaluran Dana Desa dalam penanggulangan kemiskinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro • Program Pengembangan UMKM • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingga (2,32%) • Tanjungpinang (1,58%) • Kep. Anambas (0,96%) • Bintan (0,81%) • Batam (0,70%) • Karimun (0,59%) • Natuna (0,40%)
1.4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Urutan ke-18 terendah dari 34 provinsi. • Dari 7 kabupaten/kota, dua daerah Lingga dan Tanjungpinang berada di atas provinsi. • Rata-rata perubahan kenaikan masih lebih rendah dibanding nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) lebih tinggi di wilayah perdesaan dibandingkan dengan di perkotaan (0,51>0,41; September 2020). • Kenaikan P1 lebih besar di perkotaan sebanyak 0,06 poin dibandingkan dengan kenaikan P1 di perdesaan (0,14>0,08; September 2020). 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses jaring pengaman sosial dalam bentuk jaminan dan bantuan sosial. • Meningkatkan akses kepemilikan dan perbaikan rumah tinggal. • Perluasan kesempatan kerja. • Bantuan permodalan Usaha Mikro dan Kecil • Efektivitas penyaluran Dana Desa dalam penanggulangan kemiskinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. • Program Kawasan Permukiman. • Program Penempatan Tenaga kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro • Program Pengembangan UMKM • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingga (0,58%) • Tanjungpinang (0,40%) • Kep. Anambas (0,20%) • Batam (0,20%) • Bintan (0,17%) • Karimun (0,08%) • Natuna (0,05%)

2	Garis Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Garis Kemiskinan Rendah, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 4 kabupaten, yaitu Bintan, Anambas, Karimun dan Natuna; • Garis Kemiskinan Sedang, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan nasional dan di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 2 daerah, yaitu Kabupaten Lingga; • Garis Kemiskinan Tinggi, adalah daerah yang berada di atas garis kemiskinan nasional dan garis kemiskinan provinsi, yaitu Kota Batam dan Tanjungpinang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Garis Kemiskinan Perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Perdesaan (Rp. 619.461 > Rp.597.899; September 2020) • Besaran perubahan kenaikan GK di Perkotaan masih lebih tinggi dibaidngkan dengan perdesaan, sejak periode Maret ke September 2020 (Rp.2718 > Rp.2650). • Kontribusi Makanan lebih besar terhadap non makanan dalam pembentukan Garis Kemiskinan, khususnya di Kepulauan Riau pada periode Maret 2020 sebesar 66,73% dan pada periode September 2020 sebesar 66,52%. • Garis Kemiskinan Makanan Kepri di Perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan, dimana pada Maret dan September 2020 masing-masing pada tingkat 74,33% dan 74,29% di perdesaaan lebih besar daripada di perkotaan pada periode Maret dan September 2020 masing-masing pada tingkat 65,92% dan 65,89%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi rantai pasokan dan stabilitas harga komoditas bahan pokok; • Meningkatkan akses kepemilikan dan perbaikan rumah tinggal. • Akses jaring pengaman sosial dalam bentuk jaminan dan bantuan sosial. • Pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi. • Perluasan kesempatan kerja. • Bantuan permodalan Usaha Mikro dan Kecil. • Efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. • Mendorong eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa. • Pembinaan hubungan industrial. • Mengintensifkan penanganan Kawasan kumuh dan minim sanitasi serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air bersih. • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir. • Meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Stabiliisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. • Program Kawasan Permukiman. • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. • Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. • Program Penempatan Tenaga kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro • Program Pengembangan UMKM • Program Peningkatan Sarana, Prasarana Utilitas Umum; • Program Penyelenggaraan Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Batam (Rp.707.856) •Tanjungpinang (Rp.691.738) • Lingga (Rp.472.384) •Bintan (Rp.417.654) •Kep. Anambas (Rp. 416.877) • Karimun (Rp. 411.052) •Natuna (Rp. 408.164)
---	-------------------------	---	--	---	--	--

Sumber : Olahan Tahun 2021

Tabel 5.2
Matrik Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Analisis Determinan Kemiskinan

No	Dimensi	Deskripsi	Strategi	Program	Wilayah Intervensi
1. Pendidikan					
1.1	Harapan Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi relatif Harapan lama sekolah di Provinsi Kepri hanya menempati urutan ke 23 dari 34 Provinsi yang ada. Trend antar waktu perkembangan Harapan Lama Sekolah di provinsi Kepri mengalami rata-rata masih berada jauh di bawah rata-rata nasional dan beberapa provinsi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata. Mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi. Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemberian Bantuan Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan 	1. Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas 2. Kabupaten Natuna 3. Kabupaten Karimun dan Bintan 4. Kota Tanjungpinang dan Batam
1.2	Jumlah Sekolah SMA/SMK/Sederajat	Posisi relatif Jumlah sekolah di Provinsi Kepri hanya menempati urutan ke 31 dari 34 Provinsi yang ada.	<ul style="list-style-type: none"> Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan Memfasilitasi perizinan pendirian Sekolah SMA/SMK/Sederajat 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 	1. 2. Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas 3. Kabupaten Bintan, Karimun, Kota Batam dan Tanjungpinang 4.
2. Kesehatan					
2.1	Persentase Penderita TBC per 100.000 penduduk	Kondisi relatif persentase insiden kasus TBC Kepri masih dibawah rata-rata angka nasional, namun melebihi angka nasional di tahun 2020.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan Kesehatan. Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. Penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	1. 2. Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas 3. Kabupaten Karimun, Kota Batam, Tanjungpinang dan 4. Kabupaten Bintan
2.2	Jumlah Prevalensi HIV	Trend Jumlah Prevalensi HIV di Provinsi Kepri naik dari tahun ke tahun, namun	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata 	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 	Tidak dapat ditentukan wilayah prioritas, karena data seluruh

		data Jumlah Prevalensi HIV data semua kab/kota sama.	bagi seluruh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	kab/kota sama
			<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan terhadap penderita HIV 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kegiatan edukasi/ penyuluhan terhadap bahaya HIV/AIDS 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	
2.3	Fasilitas Kesehatan	Jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	1. Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas 3. Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Tanjungpinang 4. Kabupaten Karimun
			<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi layanan kesehatan melalui layanan berbasis IT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	
2.4	Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan	Jumlah dan pemerataan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	1. Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas 3. Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Batam 4. Kota Tanjungpinang
			<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 	

3. Ketenagakerjaan					
3.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kepri di bawah Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengembangan Kurikulum Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang Kota Batam Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas
			<ul style="list-style-type: none"> Perluasan kesempatan kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengembangan Kurikulum 	
			<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan hubungan industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Tenaga Kerja 	
			<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Hubungan Industrial 	
			<ul style="list-style-type: none"> School industrial linkage 	<ul style="list-style-type: none"> Program Penempatan Tenaga Kerja 	
			<ul style="list-style-type: none"> Afirmasi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 	
			<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Balai Latihan Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 	
3.2	Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha	Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Menengah, Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Karimun Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga Kabupaten Natuna
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas permodalan bagi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Menengah, Usaha Mikro (Umkm) Program Pengembangan Umkm Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha 	

			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan daya saing UMKM. 	Mikro (UMKM) <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Menengah, Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan Umkm Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 	
3.3	Status Bekerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau	Status Bekerja Penduduk Miskin Usia >15 Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau relatif masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja. Pembinaan hubungan industrial. Perlindungan ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Penempatan Tenaga Kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pengembangan Kurikulum 	<ol style="list-style-type: none"> Kota Batam dan Kabupaten Karimun Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang Kabupaten Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga
4. Infrastruktur Dasar					
4.1	Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak	Capaian akses terhadap air dan sanitasi layak di kabupaten/ kota di Kepri memperlihatkan masih tidak seragamnya kapasitas dan kapabilitas penanganan antar daerah kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Air Baku serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sanitasi dan Air Minum. Meningkatkan Akses terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh. Percepatan Pembangunan Sarana 	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Peningkatan Sarana, Prasaran dan Utilitas Umum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Sarana, Prasaran dan 	<ol style="list-style-type: none"> Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, dan Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang dan Batam

			Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Utilitas Umum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Persampahan	
			• Peningkatan Kinerja PDAM	• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
4.2.	Persentase Jalan Berkondisi Baik	Panjang jalan dan persentase jalan berkondisi baik masih relative rendah di Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur • Menjaga dan meningkatkan kualitas pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Jalan 	1. Kabupaten Natuna 2. Kabupaten Karimun 3. Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang dan Batam 4. Kabupaten Bintan dan Lingga
4.3.	Jembatan Berkondisi Baik	Panjang jembatan dan persentase jembatan berkondisi baik masih relative rendah di Provinsi Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur • Menjaga dan meningkatkan kualitas pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Jalan 	1. Kabupaten Karimun dan Natuna 2. Kabupaten Karimun dan Natuna 3. Kabupaten Bintan dan Kepulauan Anambas 4. Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan Batam
5. Dimensi Ketahanan Pangan					
5.1.	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan	Dalam kurun periode 2016-2020, persentase akses RT miskin terhadap program bantuan pangan di Kepri secara umum mengalami fluktuasi yang cenderung menurun.	Meningkatkan akses terhadap program bantuan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Rehabilitasi Sosial 	1. Kabupaten Bintan dan Natuna 2. Kabupaten Lingga dan Karimun 3. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam 4. Kota Tanjungpinang

Sumber : Olahan Tahun 2021

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan temuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait profil kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :
 - a. Persentase Penduduk Miskin (P0) hanya di Kabupaten Lingga yang berada di atas persentase tingkat kemiskinan nasional, pada saat pandemi covid 19 persentase penduduk miskin (P0) Provinsi Kepulauan Riau cenderung meningkat dari tren sebelum pandemi.
 - b. Tren kenaikan jumlah penduduk miskin relatif konstan dengan kenaikan tahun 2020 di dorong oleh faktor pandemi.
 - c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) lebih rendah dibanding nasional, namun pada saat pandemi covid 19 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau meningkat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2020). Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi covid 19 menyebabkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan.
 - d. Indeks Keparahan Kemiskinan lebih rendah dibanding nasional, namun pada saat pandemi covid 19 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau meningkat lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2020). Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi covid 19 berdampak pada semakin tingginya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
 - e. Garis kemiskinan kabupaten Bintan, Kepulauan Anambas, Karimun dan Natuna berada di bawah garis kemiskinan nasional, garis kemiskinan Kabupaten Lingga berada di atas garis kemiskinan nasional dan di bawah garis kemiskinan provinsi, serta Kota Batam dan Tanjungpinang garis kemiskinannya berada di atas garis kemiskinan nasional dan garis kemiskinan provinsi.
2. Berdasarkan temuan penelitian terkait profil kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, beberapa strategi utama yang perlu dilakukan antara lain : meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), meningkatkan akses jaring pengaman sosial. peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja serta efisiensi rantai pasokan dan stabilitas harga komoditas bahan pokok.

3. Berdasarkan temuan penelitian terkait determinan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dari lima indikator pada dimensi pendidikan, prioritas intervensi, pertama pada indikator harapan lama sekolah, wilayah prioritas : pertama, Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas, kedua, Kabupaten Natuna, ketiga, Kabupaten Karimun dan Bintan serta keempat, Kota Tanjungpinang dan Batam. Prioritas intervensi kedua pada indikator jumlah sekolah SMA/SMK/Sederajat, dengan wilayah prioritas : kedua, Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas dan ketiga, Kabupaten Bintan, Karimun, Kota Batam dan Tanjungpinang.
- b. Dari lima indikator pada dimensi kesehatan, prioritas intervensi pada empat indikator. Pertama pada indikator persentase penderita TBC per 100.000 penduduk dengan wilayah prioritas : kedua, Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas, ketiga, Kabupaten Karimun, Kota Batam, Tanjungpinang dan keempat, Kabupaten Bintan. Prioritas intervensi kedua pada indikator Jumlah Prevalensi HIV. Prioritas intervensi ketiga pada indikator fasilitas kesehatan, dengan wilayah prioritas : kedua, Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas, ketiga, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Tanjungpinang, keempat, Kabupaten Karimun. Prioritas intervensi keempat adalah indikator jumlah tenaga kesehatan, dengan wilayah prioritas : kedua, Kabupaten Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas, ketiga, Kabupaten Bintan, Karimun dan Kota Batam, keempat, Kota Tanjungpinang.
- c. Pada dimensi ketenagakerjaan dari lima indikator ada tiga prioritas intervensi. Pertama pada indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dengan wilayah prioritas : pertama, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, kedua, Kota Batam, ketiga, Kabupaten Natuna dan keempat, Kabupaten Lingga

dan Kepulauan Anambas. Prioritas intervensi kedua, indikator persentase rumah tangga yang pernah menerima kredit usaha, dengan wilayah prioritas : pertama, Kabupaten Karimun, kedua, Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, ketiga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga dan keempat, Kabupaten Natuna. Prioritas intervensi ketiga pada indikator status bekerja penduduk miskin usia >15 tahun di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau, dengan wilayah prioritas : pertama, Kota Batam dan Kabupaten Karimun , kedua, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, ketiga, Kabupaten Natuna dan keempat Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga.

- d. Pada dimensi infrastruktur dasar, prioritas intervensi dilakukan pada tiga indikator. Pertama pada indikator Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak dengan wilayah prioritas : pertama, Kabupaten Lingga, Kepulauan Anambas, dan Bintan, kedua, Kabupaten Karimun dan keempat, Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang dan Batam. Prioritas intervensi kedua jalan berkondisi baik, dengan wilayah prioritas : pertama, Kabupaten Natuna, kedua, Kabupaten Karimun, ketiga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang dan Batam, Keempat, Kabupaten Bintan dan Lingga. Prioritas intervensi ketiga pada indikator jembatan berkondisi baik dengan wilayah prioritas : kedua, Kabupaten Karimun dan Natuna, ketiga, Kabupaten Bintan dan Kepulauan Anambas dan keempat, Kabupaten Lingga, Kota Tanjungpinang dan Batam.
 - e. Prioritas intervensi dimensi katahanan pangan, prioritas intervensi dilakukan pada indikator perkembangan persentase rumah tangga miskin yang mengakses bantuan pangan, dengan wilayah prioritas : pertama, Kabupaten Bintan dan Natuna, kedua, Kabupaten Lingga dan Karimun, ketiga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kota Batam dan keempat Kota Tanjungpinang.
4. Beberapa strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan determinan kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau antara lain :
 - a. Pada dimensi pendidikan, strategi penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan layanan pendidikan yang inklusif,

terjangkau, dan merata serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

- b. Strategi penanggulangan kemiskinan pada dimensi kesehatan melalui meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat dan pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun.
- c. Pada dimensi ketenagakerjaan, strategi penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kompetensi dan perlindungan ketenagakerjaan, penguatan balai latihan kerja serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas permodalan UMKM.
- d. Strategi penanggulangan kemiskinan pada dimensi infrastruktur dasar melalui peningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air minum serta akselerasi pembangunan infrastruktur penghubung antar pulau.
- e. Strategi penanggulangan kemiskinan pada dimensi ketahanan pangan melalui peningkatan persentase rumah tangga miskin yang mengakses bantuan pangan.

6.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil kajian tersebut, maka tim pengkaji merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus memperkuat pelaksanaan dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan yang menysasar langsung kepada masyarakat miskin diantaranya melalui program jaringan pengaman sosial, bantuan permodalan UMKM, penguatan kapasitas ekonomi keluarga dan program-program padat karya.
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus memperkuat program-program yang berdampak pada ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok melalui peningkatan produksi domestik dan efisiensi jalur distribusi pangan.

3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat menggalakan produksi dan konsumsi produk-produk pangan pilihan yang berbasis pada potensi lokal seperti komoditas sagu.
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus memperkuat pengembangan kapasitas usaha kecil dan mikro dikalangan masyarakat miskin melalui ketersediaan akses teknologi informasi.
5. Berdasarkan determinan kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan hal-hal berikut :
 - a. Pada dimensi pendidikan yang perlu dilakukan pengembangan layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata serta akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk tingkat SMA/SMK/ sederajat.
 - b. Pada dimensi kesehatan yang harus dilakukan peningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat dan pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun.
 - c. Pada dimensi ketenagakerjaan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kompetensi dan perlindungan ketenagakerjaan, penguatan balai latihan kerja serta meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapasitas permodalan UMKM.
 - d. Untuk dimensi infrastruktur dasar penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air minum serta akselerasi pembangunan infrastruktur penghubung untuk meningkatkan rasio konektivitas.
 - e. Penanggulangan kemiskinan pada dimensi ketahanan pangan melalui peningkatan persentase rumah tangga miskin yang mengakses bantuan pangan.
6. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan.
7. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat kolaborasi dan sinergisitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota/Desa, elemen masyarakat, swasta dan perguruan tinggi dalam penanggulangan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Afda, Z. N, 2016, *Analisis Determinan Kemiskinan di Jawa Tengah*, Jurnal Publikasi, 2018.
- Arsyad, L, 1999, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta, STIE YKPN.
- Depkes RI, (2009), *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025*, Jakarta, Depkes RI.
- Ginandjar, Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*: Jakarta, CIDES.
- Gupta, I., & Mitra, A, 2004, *Economic Growth, Health and Poverty: An Exploratory Study for India*. *Development Policy Review*, 22(2), 193–206. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2004.00245.x>.
- Ihsan, F, 2011, *Perkembangan Peserta Didik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kuncoro, 2003, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Mubyarto, 1998, *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Aditya Media: Yogyakarta.
- Myrdal, G, 2000, *Obyektivitas Penelitian Sosial*. Jakarta, LP3ES.
- Nafziger, E. Wayne. 1997. *The Economics of Developing Countries*, International Edition, edisi ke 3, Prentice-Hall International, Inc.
- Nurihsan, Juntika, 2007, *Perkembangan Peserta Didik*, Bandung, Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Octaviani, D, 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke*, Media Ekonomi.
- Puspita, D. W, 2015, *Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*, *Journal of Economics and Policy*, 8(1) 100-107. Retrieved on June 27th 2018.
- Ramdani, M, 2015, *Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012*, *Economics Development Analysis Journal*.
- Rodrigues, L. C., & Smith, P. G, 1990, *Tuberculosis in Developing Countries and Methods for Its Control*, *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 84(5), 739–744. [https://doi.org/10.1016/0035-9203\(90\)90172-B](https://doi.org/10.1016/0035-9203(90)90172-B).
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 2014, Alfabeta, Bandung.

- Sukirno, S, 2004, *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, C, 2005, *Memahami kemiskinan secara multidimensional*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 8(03).
- Todaro, M. P, 2006, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keempat Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Vanda Ningrum, 2019 *Kemiskinan dalam Perspektif Global, Nasional dan Lokal*, Kependudukan LIPI.
- WHO, 2019, *Global Tuberculosis Report*, Geneva.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Tambahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41).

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4).

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 631); Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 723).

Lampiran

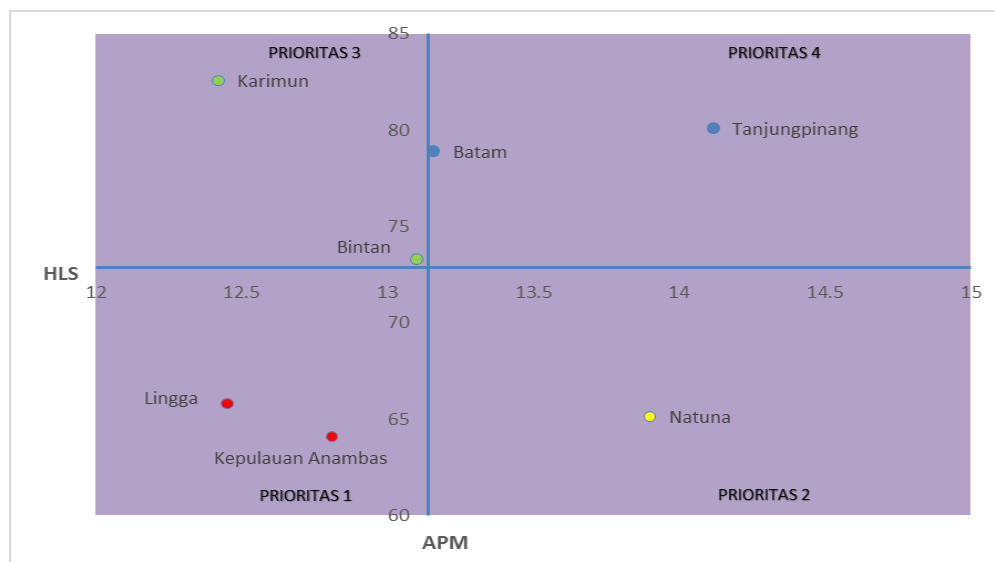
DIMENSI PENDIDIKAN

Daerah	APM) Tingkat SMA/MA/SMK/MA	HLS	SMA N	SMA Swasta
Kepulauan Riau	77.2	12.87	91	56
Karimun	82.59	12.42	15	3
Bintan	73.31	13.1	10	3
Natuna	65.14	13.9	14	1
Lingga	65.81	12.45	14	1
Kepulauan Anambas	64.11	12.81	5	0
Batam	78.88	13.16	26	42
Tanjungpinang	80.1	14.12	7	6

Data Tahun 2020

KUADRAN

Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka Partisipasi Murni (APM)
----------------------------	-------------------------------



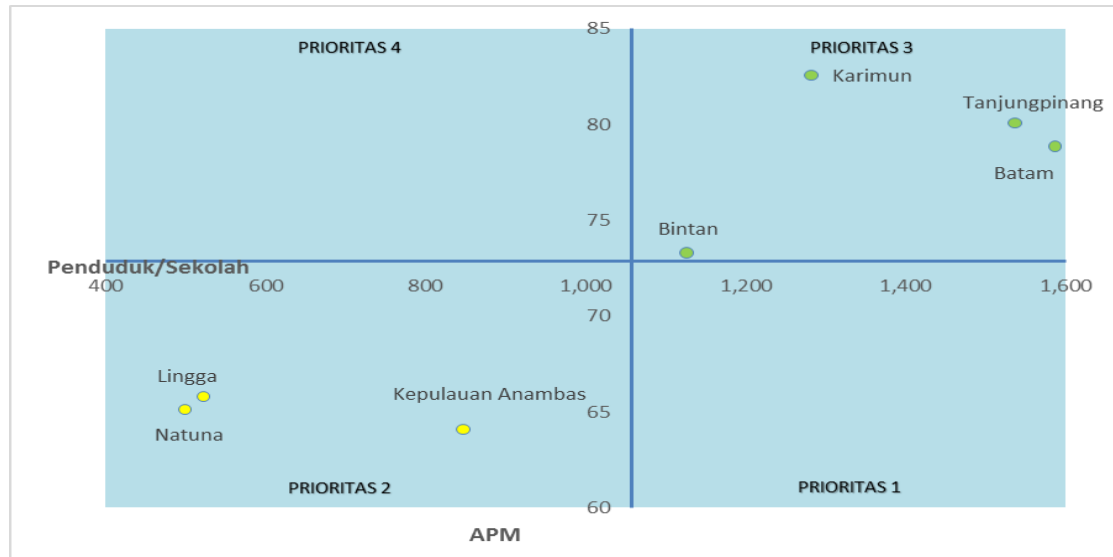
Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang mempunyai angka HLS di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : kab/kota yang mempunyai angka HLS di atas rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : kab/kota yang mempunyai angka HLS di bawah rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : kab/kota yang mempunyai angka HLS di atas rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Harapan Lama Sekolah (HLS) semakin tinggi semakin baik
 Angka Partisipasi Murni (APM) semakin tinggi semakin baik

Penduduk 15-19/Jumlah Sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM)
-------------------------------	-------------------------------



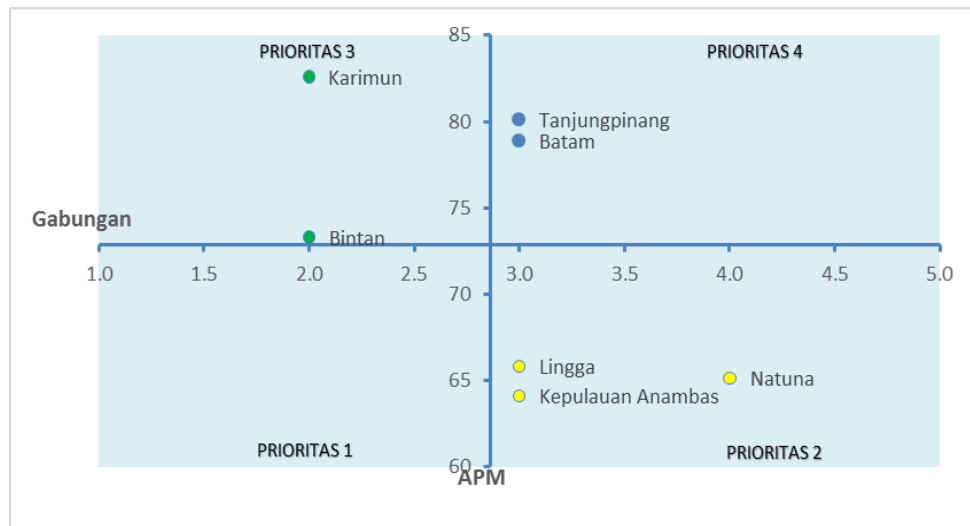
Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di atas rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah di atas rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Jumlah Penduduk 15-19 tahun per Jumlah Sekolah semakin rendah semakin baik
Angka Partisipasi Murni (APM) semakin tinggi semakin baik

Gabungan	Angka Partisipasi Murni (APM)
----------	-------------------------------



Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang kabupaten/kota yang skor indikator gabungan di bawah rata-rata dan APM di bawah rata-rata (kurang) 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang skor indikator gabungan di atas rata-rata dan APM di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang skor indikator gabungan di bawah rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang skor indikator gabungan di atas rata-rata dan APM di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Skor gabungan semakin tinggi semakin baik

Angka Partisipasi Murni (APM) semakin tinggi semakin baik

DIMENSI KESEHATAN

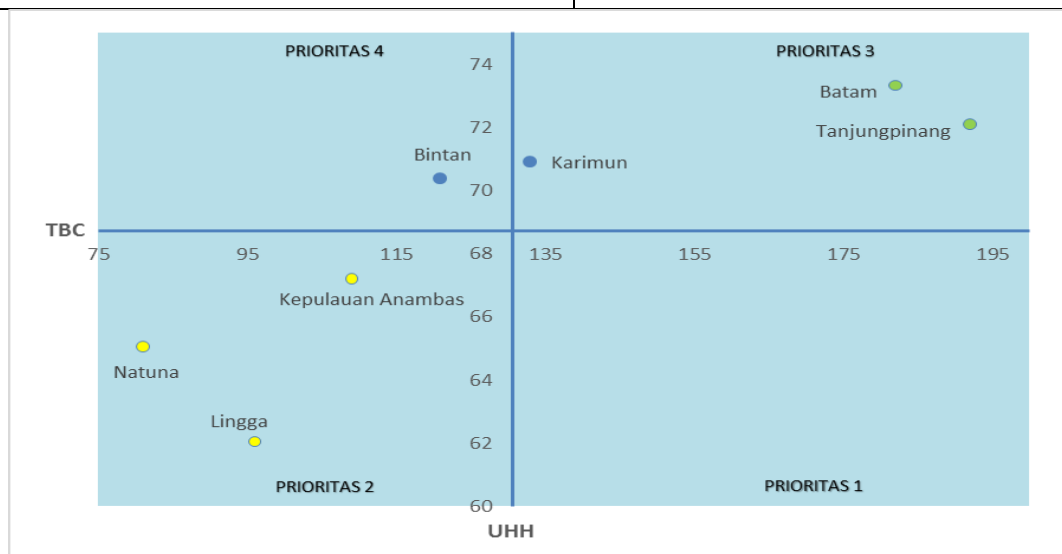
Daerah	UHH	Persentase Penderita TBC	PUSKESMAS	RUMAH SAKIT	POLIKLINIK	PUSTU	APOTIK
Kepulauan Riau	69,96	164	91	26	72	229	89
Karimun	70,91	133	13	2	7	35	18
Bintan	70,38	121	15	2	8	23	7
Natuna	65,06	81	13	2	-	43	4
Lingga	62,06	96	12	2	2	34	3
Kep. Anambas	67,21	109	8	3	3	40	5
Batam	73,33	182	23	12	38	45	38
Tanjungpinang	72,10	192	7	3	14	9	14

Data 2020

Daerah	Perawat	Bidan	T. Farmasi	Ahli Gizi	Dokter
Kepulauan Riau	4518	2311	613	179	1122
Karimun	508	319	56	25	122
Bintan	424	291	42	20	105
Natuna	260	184	46	29	64
Lingga	302	219	38	14	40
Kepulauan Anambas	253	152	18	19	45
Batam	2011	882	323	51	569
Tanjungpinang	760	264	90	21	177

Data 2020

Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC	Umur Harapan Hidup (UHH)
--	--------------------------



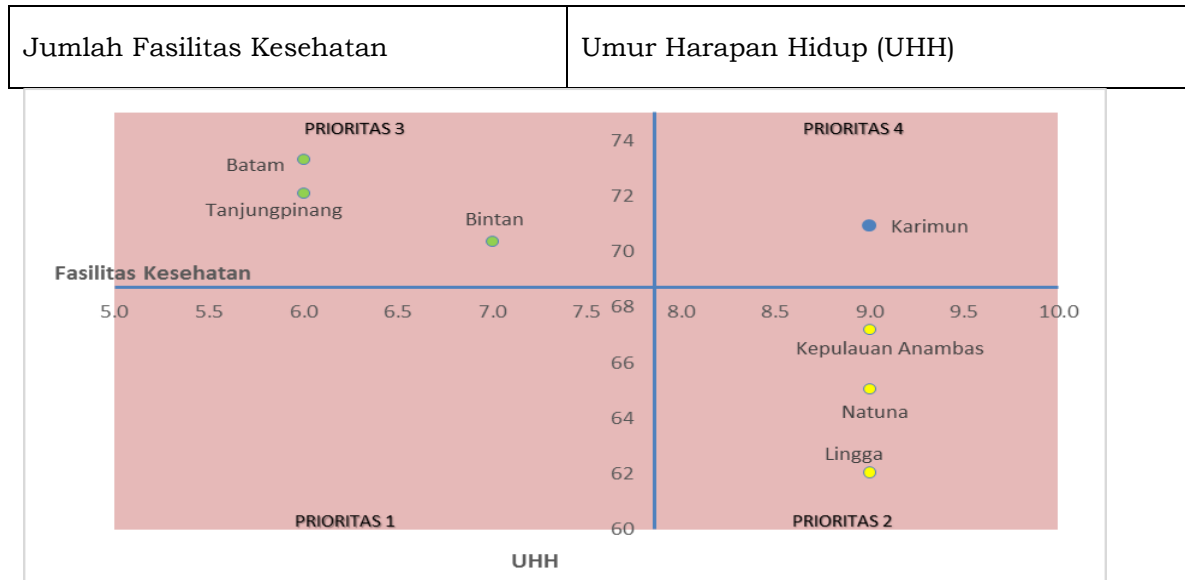
Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Persentase Insiden Kasus Semua Jenis TBC semakin rendah semakin baik

Umur Harapan Hidup (UHH) semakin tinggi semakin baik



Keterangan

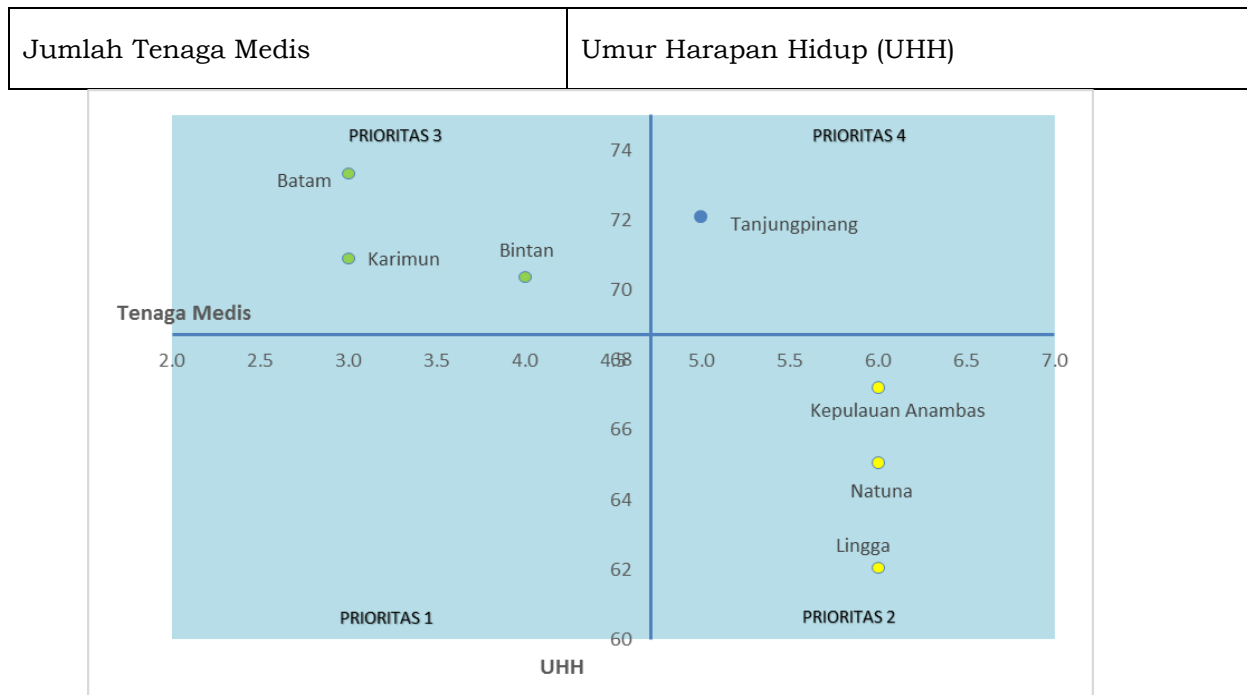
- Prioritas 1 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : kabupaten/kota yang Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Skor Jumlah Fasilitas Kesehatan semakin tinggi semakin baik

Pemberian skor berdasarkan Jumlah Penduduk per Jumlah Fasilitas Kesehatan, makin kecil Jumlah Penduduk per Jumlah Fasilitas Kesehatan maka skornya semakin tinggi dan sebaliknya

Umur Harapan Hidup (UHH) semakin tinggi semakin baik



Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Skor Jumlah Tenaga Medis di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

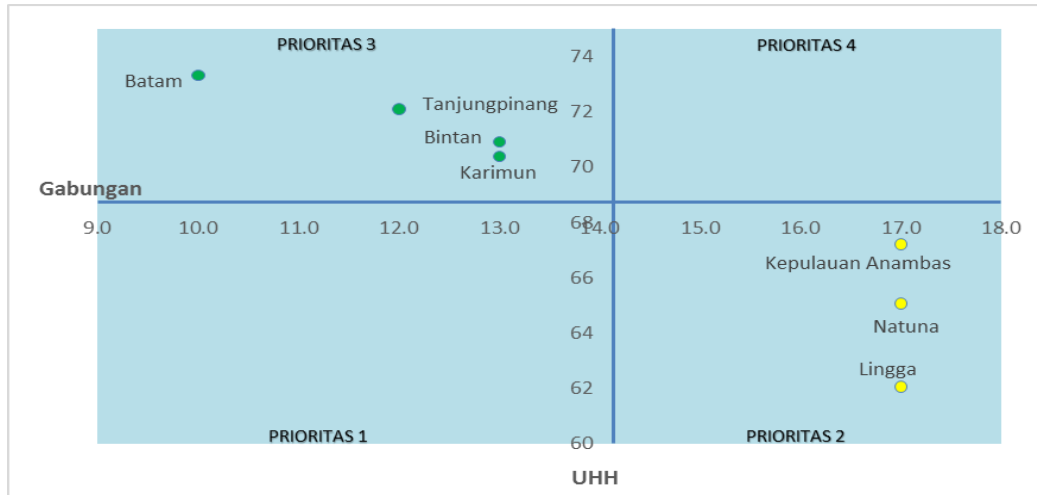
Catatan:

Skor Jumlah Tenaga Medis semakin tinggi semakin baik

Pemberian skor berdasarkan Jumlah Penduduk per Jumlah Tenaga Medis, semakin rendah Jumlah Penduduk per Jumlah Tenaga Medis maka skornya semakin tinggi dan sebaliknya

Umur Harapan Hidup (UHH) semakin tinggi semakin baik

Gabungan	Umur Harapan Hidup (UHH)
----------	--------------------------



Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan UHH di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan UHH di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

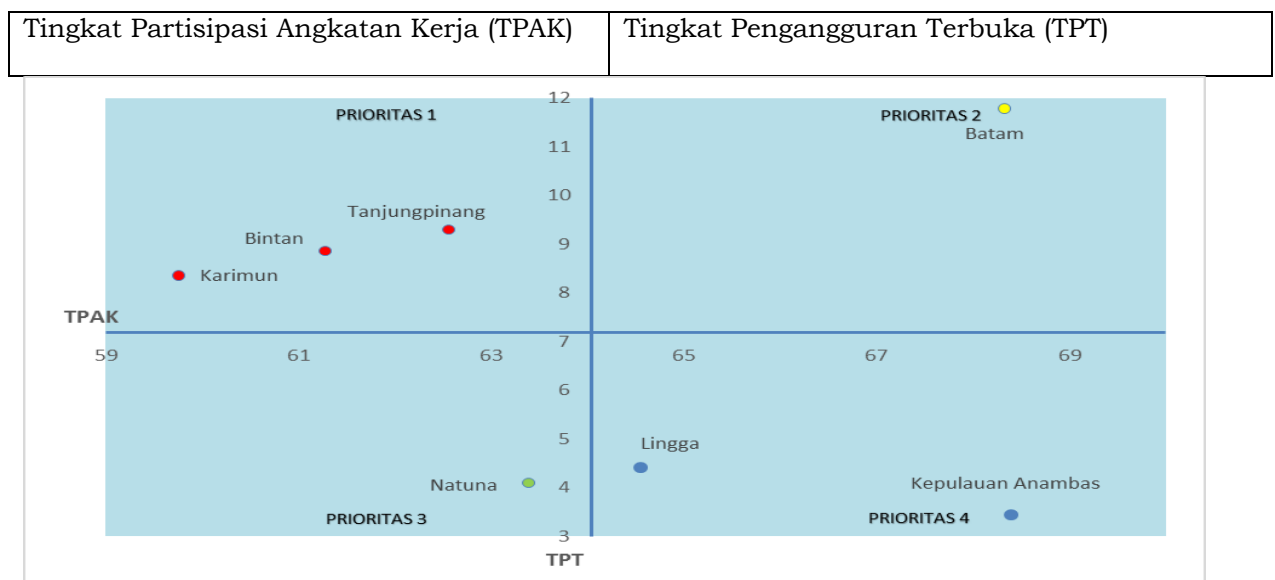
Catatan:

Skor gabungan semakin tinggi semakin baik

Umur Harapan Hidup (UHH) semakin tinggi semakin baik

DIMENSI TENAGA KERJA

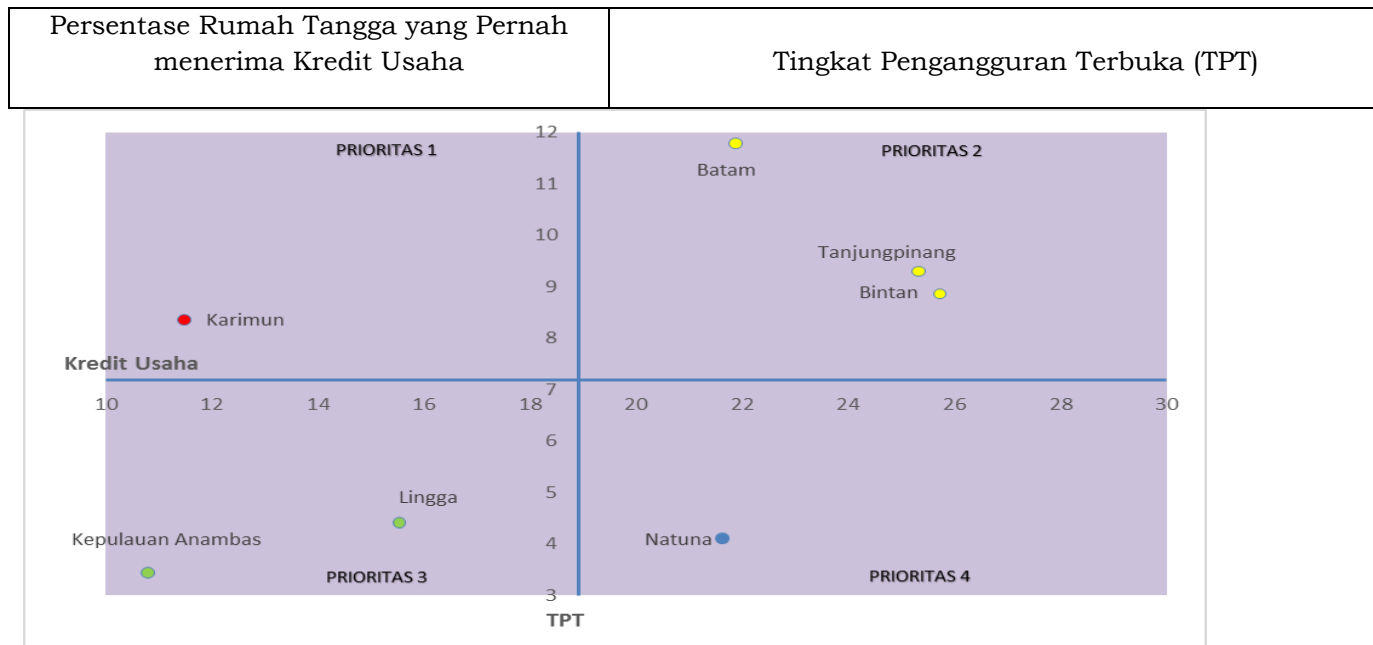
Daerah	TPT AGUSTUS	TPAK	Persentase RT yang menerima kredit usaha	Penduduk Miskin Usia >15 Tahun Tidak Bekerja
Kepulauan Riau	10,34		66,28	50.59
Karimun	8.36	59.76	11,48	55.18
Bintan	8.86	61.28	25,72	44.02
Natuna	4.1	63.39	21,64	56.46
Lingga	4.41	64.56	15,54	44.01
Kepulauan Anambas	3.44	68.4	10,80	48.21
Batam	11.79	68.33	21,88	52.84
Tanjungpinang	9.3	62.56	25,33	48.30

**Keterangan**

- Prioritas 1 : Kab/kota yang TPAK di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang TPAK di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang TPAK di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang TPAK di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) semakin tinggi semakin baik
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin rendah semakin baik



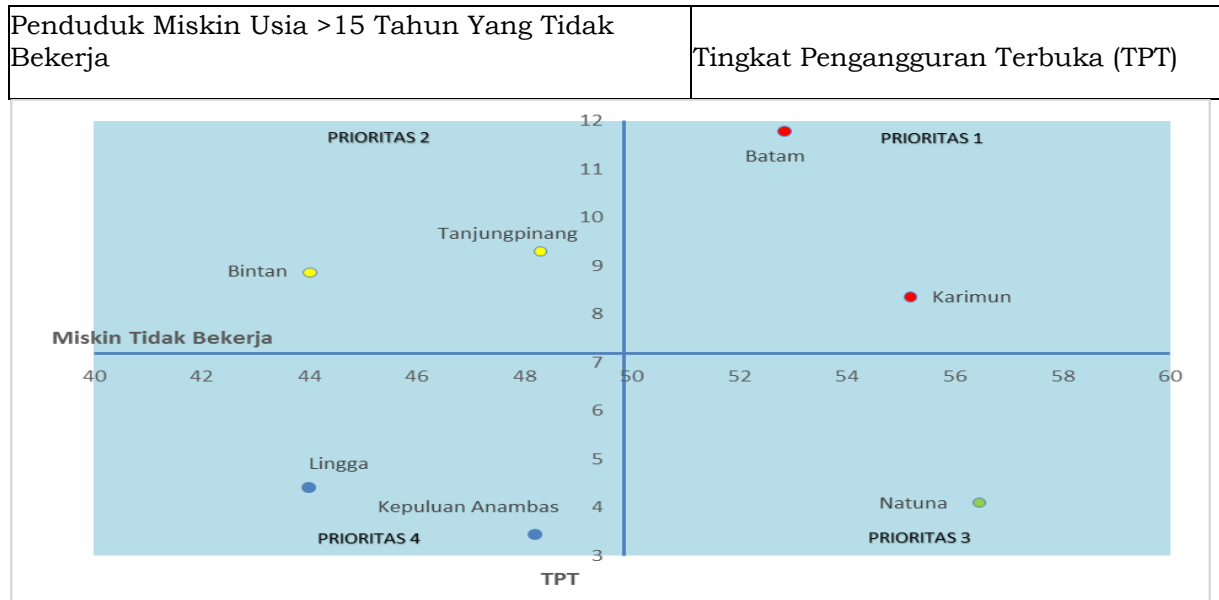
Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Persentase Rumah Tangga yang Pernah menerima Kredit Usaha semakin tinggi semakin baik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin rendah semakin baik



Keterangan

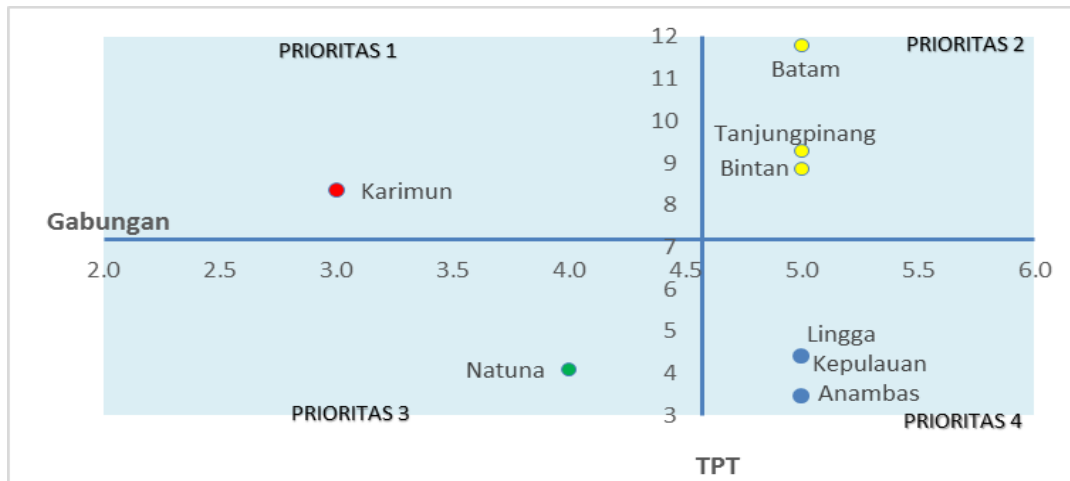
- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Persentase Penduduk Miskin Usia >15 Tahun yang tidak bekerja semakin rendah semakin baik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin rendah semakin baik

Gabungan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
----------	------------------------------------



Keterangan

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan TPT di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Skor Gabungan di bawah rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Skor Gabungan di atas rata-rata dan TPT di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

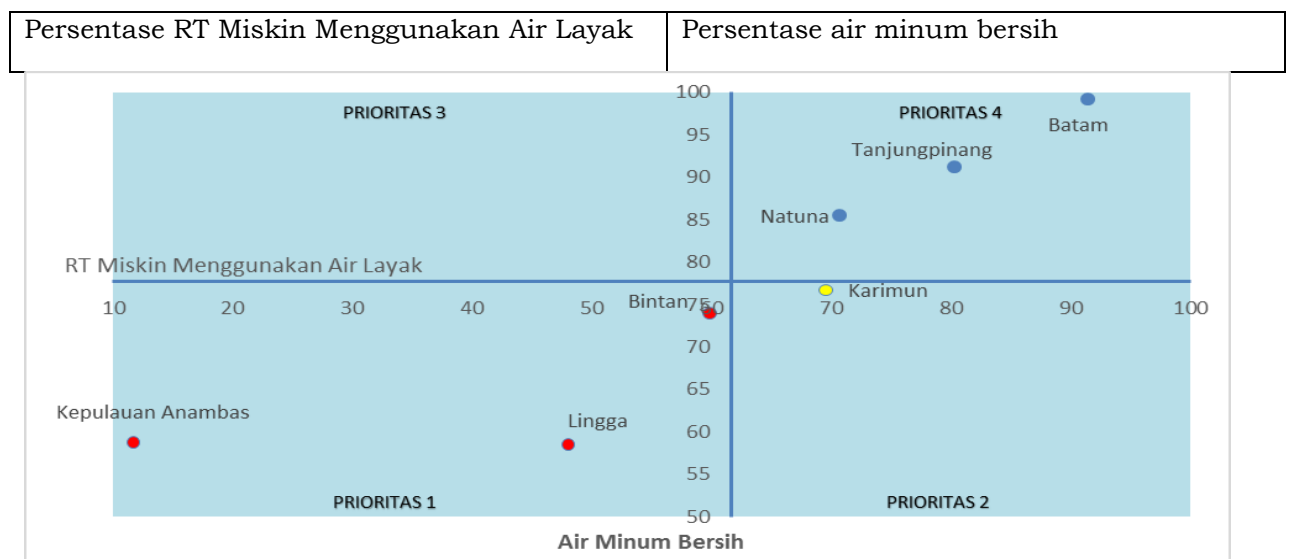
Catatan:

Skor Gabungan semakin tinggi semakin baik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) semakin rendah semakin baik

DIMENSI INFRASTRUKTUR DASAR

Daerah	Persentase air minum bersih	Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis	Panjang Jalan Kondisi Baik	Jembatan Berkondisi Baik
Kepulauan Riau	91,50	77.83			
Karimun	76,69	69.55	10.973	84.94	0.88
Bintan	74,00	59.86	5.08	121.2	0.33
Natuna	85,49	70.76	6.99	63.52	0.79
Lingga	58,53	48.02	2.15	124.45	0.75
Kepulauan Anambas	58,76	11.73	4.6	30.67	0.56
Batam	99,10	91.43	5.08	65.95	0.95
Tanjungpinang	91,13	80.31	0.85	49.38	0.99

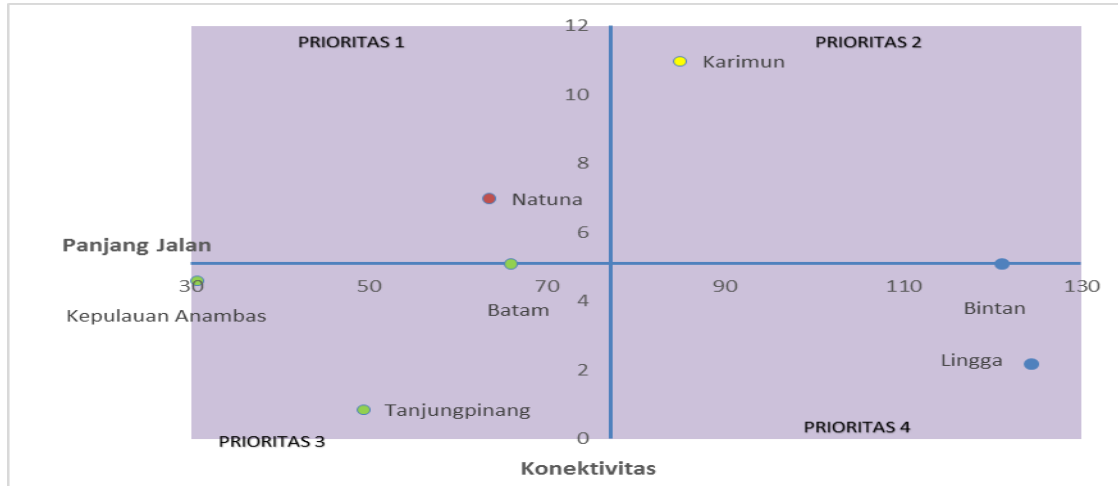
**Keterangan**

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di bawah rata-rata dan persentase air minum bersih di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di atas rata-rata dan persentase air minum bersih di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di bawah rata-rata dan persentase air minum bersih di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak di atas rata-rata dan persentase air minum bersih di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Persentase RT Miskin Menggunakan Air Layak semakin banyak semakin baik
 Persentase air minum bersih semakin banyak semakin baik

Panjang Jalan Kondisi Baik	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis
----------------------------	--



Keterangan

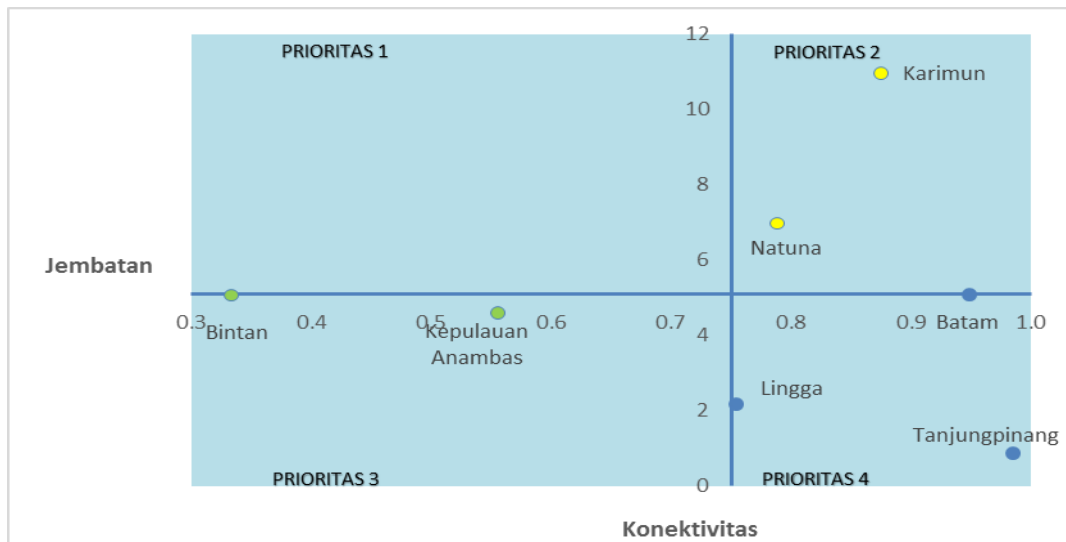
- Prioritas 1 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Panjang Jalan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Panjang Jalan Kondisi Baik semakin panjang semakin baik

Tingkat konektivitas antar wilayah strategis semakin kecil/dekat semakin bagus

Jembatan Berkondisi Baik	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis
--------------------------	--



Keterangan

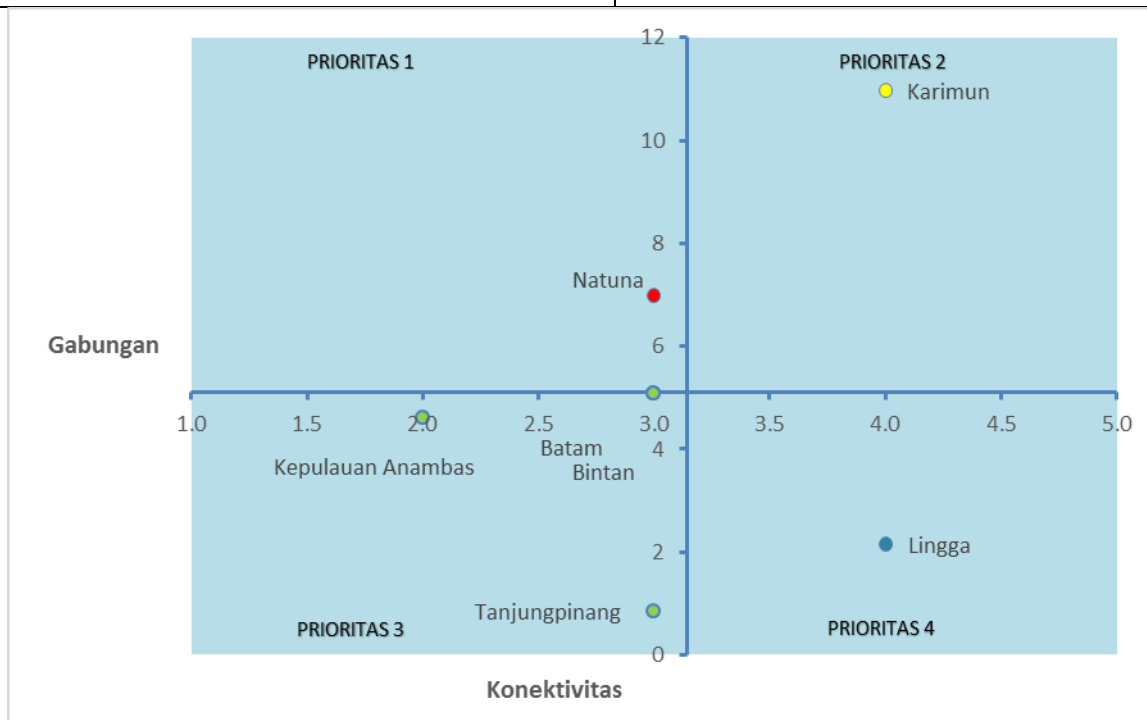
- Prioritas 1 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Panjang Jembatan Kondisi Baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Jembatan Berkondisi Baik semakin panjang semakin baik

Tingkat konektivitas antar wilayah strategis semakin kecil/dekat makin bagus

Gabungan	Tingkat konektivitas antar wilayah strategis
----------	--



- Prioritas 1 : Kab/kota yang panjang indikator dalam kondisi baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang panjang indikator dalam kondisi baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota panjang indikator dalam kondisi baik di bawah rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang panjang indikator dalam kondisi baik di atas rata-rata dan Tingkat konektivitas antar wilayah strategis di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri

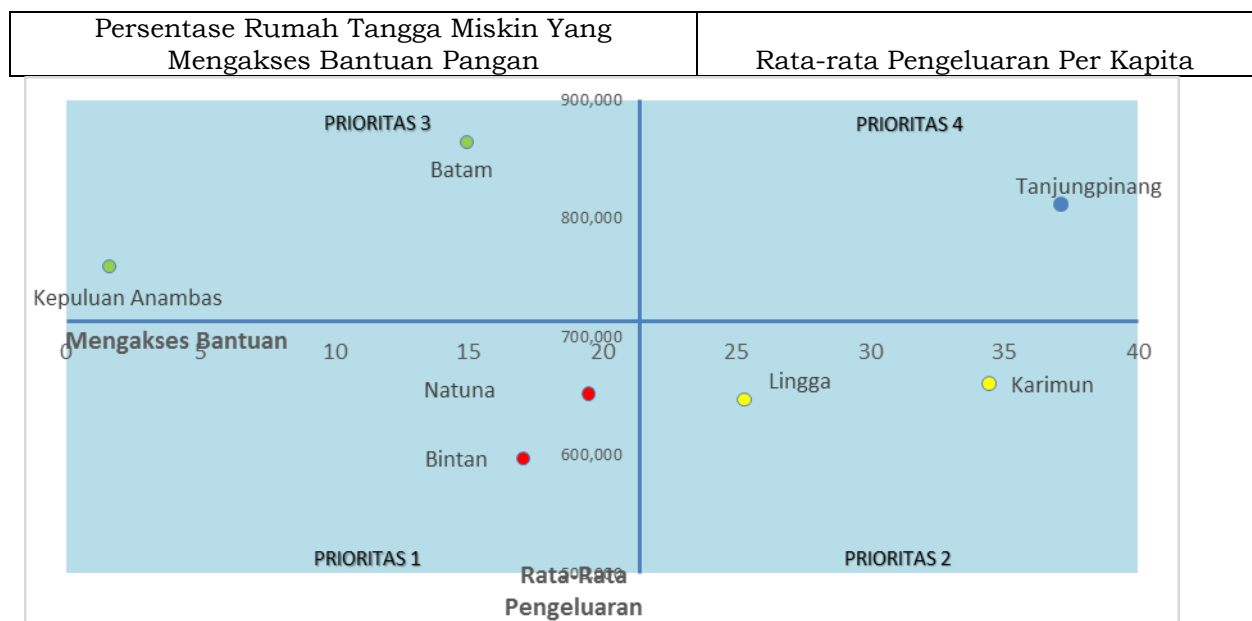
Catatan:

Skor Gabungan semakin besar semakin baik

Tingkat konektivitas antar wilayah strategis semakin kecil/dekat makin baik

DIMENSI KATAHANAN PANGAN

Daerah	% Pengeluaran Perkapita Makanan RT Miskin	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan
Kepulauan Riau			
Karimun	68.28	660223	34.44
Bintan	54.22	597333	17.06
Natuna	60.15	651900	19.49
Lingga	62.39	647081	25.31
Kepulauan Anambas	60.39	759333	1.61
Batam	58.93	864510	14.95
Tanjungpinang	49.94	810815	37.17

**Keterangan**

- Prioritas 1 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di bawah rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 2 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di atas rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di bawah rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 3 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di bawah rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri
- Prioritas 4 : Kab/kota yang Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan di atas rata-rata dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita di atas rata-rata 7 kab/kota di Kepri

Catatan:

Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mengakses Bantuan Pangan semakin banyak makin baik

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita semakin besar semakin baik